



LAPORAN BADAN PANGAN NASIONAL PERIODE BULAN JULI TAHUN 2024

**BADAN PANGAN NASIONAL
JAKARTA, AGUSTUS
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR



Dalam rangka mendukung pencapaian kinerja program dan kegiatan lingkup Badan Pangan Nasional, sebagai tindak lanjut pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2024, Badan Pangan Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap bulan dan dilaporkan dalam Laporan Bulanan Badan Pangan Nasional.

Badan Pangan Nasional mendapat alokasi tambahan anggaran untuk bagian anggaran (BA) 125 Badan Pangan Nasional melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp. 9.050.825.059.913. Sesuai DIPA Badan Pangan Nasional Revisi Ke-10 Nomor: **SP DIPA- 125.01.1.690590/2024** tanggal 22 Juli 2024, sehingga total alokasi anggaran menjadi sebesar **Rp. 15.722.461.932.000**. Anggaran tersebut perlu dipantau pemanfaatannya selama bulan Juli Tahun 2024 untuk mendorong penggunaan anggaran seefisien dan seefektif mungkin.

Hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan tersebut dapat dijadikan bahan masukan untuk meningkatkan kinerja pelayanan di unit kerja eselon I dan unit kerja eselon II. Selain itu, data dan informasi yang digunakan dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dapat menjadi referensi untuk penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan.

Diperlukan keterlibatan pihak terkait, baik internal maupun eksternal Badan Pangan Nasional dalam penyusunan laporan ini. Kami menyadari bahwa penyusunan laporan kegiatan Badan Pangan Nasional periode bulan Juli Tahun 2024 belum sempurna, untuk itu kami harapkan masukan dan kritik membangun untuk penyempurnaan laporan ke depan. Semoga laporan Badan Pangan Nasional periode bulan Juli Tahun 2024 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta 7 Agustus 2024
Sekretaris Utama,



Sarwo Edhy

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
1.3 Metode Penyusunan Laporan	2
BAB II RENCANA KINERJA OUTPUT	3
BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN	11
3.1 Realisasi Fisik dan Keuangan	11
3.2 Monitoring Kegiatan Prioritas	19
3.3 Kegiatan Kepala Badan Periode Bulan Juli Tahun 2024	91
BAB IV PENUTUP	104
4.1 Kesimpulan	104
4.2 Permasalahan	104
4.3 Rekomendasi	105

DAFTAR TABEL



Tabel 1	Pagu Blokir Sampai Bulan Juli Sesuai DIPA Revisi ke-10 Badan Pangan Nasional Tahun 2024	3
Tabel 2	Pagu Anggaran Badan Pangan Nasional Sesuai DIPA Revisi Blokir AA Tahun 2024.....	3
Tabel 3	Target Fisik dan Keuangan Bulan Juli Tahun 2024 Sesuai DIPA Revisi ke-10 Badan Pangan Nasional	5
Tabel 4	Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja Bulan Juli Tahun 2024	11
Tabel 5	Realisasi Keuangan dan Fisik Bulan Juli Tahun 2024 Per Ouput dan Komponen Lingkup Badan Pangan Nasional	12
Tabel 6	Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Pangan Nasional Posisi Sampai Bulan Juli Tahun 2024	19
Tabel 7	Realisasi Keuangan Bulan Juli Tahun 2024 Per Kegiatan Lingkup Badan Badan Pangan Nasional	20

DAFTAR LAMPIRAN



Lampiran 1. Lampiran III DIPA Revisi ke-10 Badan Pangan Nasional TA 2024 Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan	106
Lampiran 2. Realisasi Anggaran dan Fisik Badan Pangan Nasional Periode Juli Tahun 2024	107

BAB I PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 Badan Pangan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, amanat ini dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024 sesuai Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2022. Sebagaimana pasal 5 pada perbadan tersebut, Kepala Badan perlu melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Badan Pangan Nasional. Pemantauan dan Evaluasi dilakukan secara periodik, Kepala Badan menugaskan pimpinan masing-masing unit kerja eselon I (UKE-1) di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Pada tahun 2024 Badan Pangan Nasional melaksanakan 4 (empat) kegiatan yaitu: 1) Pemantapan ketersediaan dan stabilisasi pasokan dan harga pangan; 2) pengendalian kerawanan pangan dan pemantapan kewaspadaan pangan dan gizi; 3) pemantapan panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; dan 4) dukungan manajemen dan teknis lainnya Badan Pangan Nasional. Sesuai dengan dinamika perencanaan, kegiatan tersebut dijabarkan dalam 27 (dua puluh tujuh) Klasifikasi Rincian Output (KRO) dengan 55 (lima puluh lima) Rincian Output (RO) berdasarkan DIPA revisi 10 Nomor: SP.DIPA-125.01-0/2024 Tanggal 22 Juli 2024 untuk Badan Pangan Nasional (125.01) melalui alokasi anggaran sebesar Rp. 15.722.461.932.000 (Lima Belas Triliyun Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah). Dari alokasi anggaran tersebut, sesuai dinamika anggaran, telah dilaporkan pada periode bulan Juli Tahun 2024.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan, dan penggunaan anggaran selama bulan Juli Tahun 2024 dituangkan dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan Badan Pangan Nasional posisi bulan Juli Tahun 2024. Sesuai target pada bulan Juli sebesar 0,18% atau sebesar Rp. 28.202.599.000,- dari total anggaran Badan Pangan Nasional sebesar Rp. 15.722.461.932.000,-. (Lima Belas Triliyun Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Milyar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).



Penetapan target berdasarkan lembar ke-III Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan Berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2024 Nomor SP DIPA-125.01.1.690590/2024 Revisi ke-10 tanggal 22 Juli Tahun 2024.

Hasil dari pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan output kegiatan dan penggunaan anggaran selama bulan Juli Tahun 2024 dituangkan dalam bentuk laporan pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan Badan Pangan Nasional bulan Juli Tahun 2024. Laporan ini sebagai catatan rekaman realisasi fisik dan keuangan selama bulan Juli Tahun 2024 serta hasil evaluasi menuju perbaikan kualitas pelaksanaan kegiatan selanjutnya. Ruang lingkup laporan ini mencakup keseluruhan output Badan Pangan Nasional Tahun 2024 baik fisik maupun keuangan. Melalui laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hasil pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Badan Pangan Nasional di tahun berjalan. Laporan ini sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan kinerja Badan Pangan Nasional pada periode pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang

1.2 Tujuan

1. Mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan melalui realisasi fisik dan keuangan lingkup Badan Pangan Nasional posisi bulan Juli Tahun 2024.
2. Melakukan pemantauan terhadap realisasi fisik dan keuangan berdasarkan target pada bulan Juli Tahun 2024.

1.3 Metode Penyusunan Laporan

1. Mengumpulkan data dan informasi target dan capaian program, kegiatan, KRO dan Output dari UKE 1 dan UKE 2 dan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dari Kementerian Keuangan.
2. Menganalisis data target fisik dan keuangan berdasarkan lembar ke-III DIPA dengan data realisasi fisik dan keuangan berdasarkan aplikasi SAKTI.
3. Menyajikan hasil analisis dalam laporan.

BAB II RENCANA KINERJA OUTPUT

Rencana kinerja output merupakan pencapaian dari kinerja outcome di level Badan Pangan Nasional untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja Badan Pangan Nasional selama Tahun 2024. Untuk dapat merealisasikan alokasi ABT Tahun 2024, telah terbit Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan TA 2024 nomor SP.DIPA-125.01.1.690590/2024 Revisi ke-10 Tanggal 22 Juli 2024. Rencana kinerja output pada bulan Juli Tahun 2024 akan dilihat dari dukungan pencapaian output/RO dan komponen sebagaimana target sesuai halaman III DIPA Revisi ke-10 Tahun 2024. Sebagaimana lembar ke-III DIPA Revisi ke-10 pada bulan Juli ditargetkan realisasi anggaran sebesar Rp. 28.202.599.000,- atau 0,18 persen dari total pagu sebesar Rp. 15.722.461.932.000,- sampai dengan periode laporan Juli terdapat alokasi anggaran yang masih di blokir sebesar Rp.22.431.086.000,- dengan rincian per kegiatan pada Tabel 1 dan alokasi anggaran sesuai pagu DIPA Revisi ke-10 dan pagu revisi blokir sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 1.
Pagu Blokir Sampai Bulan Juli Sesuai DIPA Revisi Ke-10
Badan Pangan Nasional Tahun 2024

URAIAN		PAGU BLOKIR (Rp)
JUMLAH SELURUHNYA		22.431.086.000
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	19.544.148.000
HA.6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	8.292.278.000
HA.6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	5.177.606.000
HA.6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	6.074.264.000
WA	Program Dukungan Manajemen	2.886.938.000
WA.6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	2.886.938.000

Tabel 2.
Pagu Anggaran Badan Pangan Nasional Bulan Juli
Sesuai DIPA Revisi ke-10 dan Revisi Blokir AA
Tahun 2024

URAIAN		PAGU	
		DIPA	REVISI
JUMLAH SELURUHNYA		15.722.461.932.000	15.700.030.846.000
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	15.609.991.714.000	15.590.447.566.000
HA.6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	15.506.869.258.000	15.498.576.980.000
HA.6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	52.765.620.000	47.588.014.000
HA.6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	50.356.836.000	44.282.572.000
WA	Program Dukungan Manajemen	112.470.218.000	109.583.280.000
WA.6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	112.470.218.000	109.583.280.000

Laporan Badan Pangan Nasional Periode Bulan Juli tahun 2024 khusus akan melaporkan pencapaian kinerja Satker Pusat (690590) Badan Pangan Nasional dengan target pada periode bulan Juli sebagaimana dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3.
Target Fisik dan Keuangan Bulan Juli Sesuai DIPA Revisi ke-10 Badan
Pangan Nasional Tahun 2024

URAIAN		PAGU NON BLOKIR DIPA REV-10 2024		TARGET BULAN JULI	
		ANGGARAN (Rp)	FISIK	ANGGARAN (0,18 %)	FISIK
JUMLAH SELURUHNYA		15.700.030.846.000		28.300.431.478	
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	15.590.447.566.000		28.097.985.085	
HA.6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	15.498.576.980.000		27.912.364.664	
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	4.080.798.000	18 rekomendasi	7.345.436	
ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	966.718.000	1 rekomendasi	1.740.092.	
ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.119.080.000	12 rekomendasi	2.014.344	
ABR.003	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	1.995.000.000	5 rekomendasi	3.591.000	
AEA	Koordinasi	14.873.048.000	3 Kegiatan	31.791.827	
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	406.850.000	1 Kegiatan	732.330	
AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi	6.267.323.000	1 Kegiatan	11.281.181	
AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	8.198.875.000	1 Kegiatan	19.778.315	
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	2.901.375.000	26 NSPK	5.222.475	

URAIAN		PAGU NON BLOKIR DIP A REV-10 2024		TARGET BULAN JULI	
		ANGGARAN (Rp)	FISIK	ANGGARAN (0,18 %)	FISIK
AFA.001	NSPK Ketersediaan Pangan	499.375.000	6 NSPK	898.875	
AFA.002	NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.302.000.000	9 NSPK	2.343.600	
AFA.003	NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	1.100.000.000	11 NSPK	1.980.000	
BEC	Bantuan Produk	15.435.192.954.000	125601122 NSPK	27.783.347.317	
BEC.001	Penyaluran Cadangan Pemerintah	15.435.192.954.000	125601122 NSPK	27.783.347.317	
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	2.500.000.000	125 kel. kelompok	4.500.000	
QDD.001	Pangan yang Terdistribusi	2.500.000.000	125 kel. kelompok	4.500.000	
QMA	Data dan Informasi Publik dan Informasi Publik	20.078.805.000	13 Layanan	46.047.609	
QMA.001	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	6.374.585.000	3 Data	16.334.253	
QMA.002	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	15.000.000.000	9 Data	26.856.612	
QMA.003	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	12.117.140.000	1 Data	2.856.744	
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	18.950.000.000	17 unit	34.110.000	
RAG.001	Sarana Logistik Pangan	16.950.000.000	12 Unit	30.510.000	
RAG.002	Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.000.000.000	5 Unit	3.600.000	
6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	47.588.014.000		94.978.116	
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	7.761.197.000	13 Rekomendasi	20.430.000	

URAIAN		PAGU NON BLOKIR DIP A REV-10 2024		TARGET BULAN JULI	
		ANGGARAN (Rp)	FISIK	ANGGARAN (0,18 %)	FISIK
ABR.001	Rekomendasi Kebijakan ngendalian Kerawanan Pangan	3.123.000.000	1 Rekomendasi	7.421.400	
ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	4.638.197.000	12 Rekomendasi	13.008.600	
AEA	Koordinasi	17.884.667.000	2 Kegiatan	33.252.246	
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	5.111.197.000	1 Kegiatan	10.260.000	
AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	12.773.470.000	1 Kegiatan	22.992.246	
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1.800.000.000	9 NSPK	3.240.000	
AFA.001	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	400.000.000	4 NSPK	720.000	
AFA.002	NSPK Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1.400.000.000	5 NSPK	2.520.000	
QEA	Bantuan Masyarakat	17.851.550.000	180.001 orang	33.500.790	
QEA.001	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan	13.765.000.000	180.000 orang	26.145.000	
QEA.002	Bantuan Pangan Masyarakat dalam rangka kewaspadaan pangan dan gizi	4.086.550.000	1 orang	7.355.790	
QMA	Data dan Informasi Publik	2.290.600.000	2 Data	4.555.080	0
QMA.001	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	1.035.000.000	1 Data	2.295.000	0
QMA.002	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1.255.600.000	1 Data	2.260.080	0
HA.6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	44.282.572.000		90.642.305	0

URAIAN		PAGU NON BLOKIR DIP A REV-10 2024		TARGET BULAN JULI	
		ANGGARAN (Rp)	FISIK	ANGGARAN (0,18 %)	FISIK
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	2.200.400.000	11 rekomendasi	4.497.120	
ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	152.000.000	3 rekomendasi	540.000	
ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	2.048.400.000	8 rekomendasi	3.957.120	
AEA	Koordinasi	22.919.912.000	20 Kegiatan	4.411.225.980	
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	7.922.818.000	11 Kegiatan	15.664.936	
AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	10.521.222.000	8 Kegiatan	20.288.200	
AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.475.872.000	1 Kegiatan	8.159.125	
AFA	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	2.065.000.000	13 NSPK	4.050.000	
AFA.001	NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan	465.000.000	4 NSPK	1.170.000	
AFA.002	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	1.400.000.000	7 NSPK	2.520.000	
AFA.003	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	200.000.000	2 NSPK	360.000	
PCA	Perizinan Produk	1.516.475.000	400 Produk	3.081.600	

URAIAN		PAGU NON BLOKIR DIPA REV-10 2024		TARGET BULAN JULI	
		ANGGARAN (Rp)	FISIK	ANGGARAN (0,18 %)	FISIK
PCA.001	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	1.516.475.000	400 Produk	3.081.600	
PEH	Promosi	4.130.000.000	1 Kegiatan	9.079.200	
PEH.001	Promosi Pangan B2SA	4.130.000.000	1 Kegiatan	9.079.200	
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	1.940.000.000	6 kelompok masyarakat	4.086.000	
QDD.001	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	1.940.000.000	6 kelompok masyarakat	4.086.000	
QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	2.272.825.000	1 Laporan	4.091.085	
QIA.001	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	2.272.825.000	1 Laporan	4.091.085	
QMA	Data dan Informasi Publik Publik	992.660.000	1 Data	2.628.000	
QMA.001	Data Situasi Konsumsi Pangan	992.660.000	1 Data	2.628.000	
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	6.245.300.000	8 Unit	15.017.040	
RAG.001	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	6.245.300.000	8 Unit	15.017.040	
125.01. WA	Program Dukungan Manajemen	109.583.280.000		202.446.392	
6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	109.583.280.000		202.446.392	
AEC	Kerjasama	2.824.972.000	1 Dokumen	5.220.000	

URAIAN		PAGU NON BLOKIR DIP A REV-10 2024		TARGET BULAN JULI	
		ANGGARAN (Rp)	FISIK	ANGGARAN (0,18 %)	FISIK
AEC.001	Kerja Sama Bidang Pangan	2.824.972.000	1 Dokumen	5.220.000	
BMA	Data dan Informasi	4.649.943.000	1 Layanan	9.446.544	
BMA.001	Data dan Informasi Pangan	4.649.943.000	1 Layanan	9.446.544	
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	81.947.742.000	7 Layanan	148.186.400	
EBA.956	Layanan BMN	672.000.000	1 Layanan	1.296.000	
EBA.957	Layanan Hukum	1.391.900.000	1 Layanan	2.700.000	
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	3.422.000.000	1 Layanan	6.300.000	
EBA.959	Layanan Protokoler	921.000.000	1 Layanan	1.755.000	
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	950.000.000	1 Layanan	1.800.000	
EBA.962	Layanan Umum	10.715.694.000	1 Layanan	19.360.134	
EBA.994	Layanan Perkantoran	63.875.148.000	1 Layanan	114.975.266	
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	622.900.000	38 Unit	3.428.820	
EBB.951	Layanan Sarana Internal	622.900.000	38 Unit	3.428.820	
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	3.400.336.000	342 orang	6.480.000	
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	3.400.336.000	342 orang	6.480.000	
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	16.137.387.000	34 Dokumen	29.684.628	
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6.780.083.000	15 Dokumen	6.925.460.000	
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.000.000.000	6 Dokumen	1.800.000	
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.962.000.000	1 Dokumen	3.531.600	
EBD.965	Layanan Audit Internal	6.395.300.000	12 Laporan	11.887.200	

BAB III

PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Realisasi Keuangan dan Fisik

Sesuai dengan DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2024, Badan Pangan Nasional akan melaksanakan 4 (empat) kegiatan yang terdiri dari 55 output/RO dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15.722.461.932.000,-. Alokasi anggaran tambahan melalui DIPA Revisi ke-10 Nomor: SP.DIPA-125.01.1.690590/2024 pertanggal 22 Juli 2024, Badan Pangan Nasional mendapat alokasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp.9.050.253.080.000,- (Sembilan Triliun Lima Puluh Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah), sehingga total alokasi anggaran di Badan Pangan Nasional menjadi Rp.15.722.461.932.000, untuk pelaksanaan 55 output/RO lingkup Badan Pangan Nasional. Pelaksanaan output/rincian output untuk mendukung capaian kinerja Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen. Realisasi keuangan pada bulan Juni Tahun 2024 diperoleh dari aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan. Realisasi keuangan per belanja dan realisasi fisik bulan Juli tahun 2024 per output lingkup Badan Pangan Nasional disajikan pada Tabel 4 dan Tabel 5.

Tabel 4.

Realisasi Keuangan Per Jenis Belanja Bulan Juli Tahun 2024

NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1.	Belanja Pegawai	48.599.711.000	21.359.944.991	43,95
2.	Belanja Barang	15.618.404.086.000	79.556.221.710	0,51
3.	Belanja Modal	33.027.049.000	3.811.185.000	11,54
TOTAL		15.700.030.846.000	104.727.351.701	0,67

Tabel 5.
Realisasi Keuangan dan Fisik Bulan Juli Tahun 2024
Per Output dan Komponen Lingkup Badan Pangan Nasional

URAIAN		TARGET BULAN JULI		REALISASI BULAN JULI	
		ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN	FISIK
JUMLAH SELURUHNYA		28.300.431.478		23.691.863.113	
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	28.097.985.085		14.130.547.752	
HA.6875	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	27.912.364.664		3.025.170.921	
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	7.345.436		340.672.658	
ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	1.740.092	1 rekomendasi	139.481.695	0
ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.014.344	12 rekomendasi	158.213.619	1
ABR.003	Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	3.591.000	5 rekomendasi	42.977.344	0
AEA	Koordinasi	31.791.827	3 kegiatan	902.765.388	
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	732.330	1 Kegiatan	1.768.500	0
AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi	11.281.181	1 Kegiatan	299.696.592	0
AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	19.778.315	1 Kegiatan	601.300.296	0
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	5.222.475	26 NSPK	281.527.123	
AFA.001	NSPK Ketersediaan Pangan	898.875	6 NSPK	44.493.474	1
AFA.002	NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.343.600	9 NSPK	138.606.528	0
AFA.003	NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	1.980.000	11 NSPK	98.427.121	2



URAIAN		TARGET Bulan Maret		REALISASI	
		ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN	FISIK
BEC	Bantuan Produk	27.783.347.317	125601122 NSPK	0	0
BEC.001	Penyaluran Cadangan Pemerintah	27.783.347.317	125601122 NSPK	0	0
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	4.500.000	125 kel. Masyarakat	141.664.000	
QDD.001	Pangan yang Terdistribusi	4.500.000	125 kel. Masyarakat	141.664.000	0
QMA	Data dan Informasi Publik dan Informasi Publik	46.047.609	13 Layanan	1.358.541.752	
QMA.001	Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	16.334.253	3 Data	203.691.141	1
QMA.002	Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	26.856.612	9 Data	1.146.104.211	2
QMA.003	Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	2.856.744	1 Data	8.746.400	1
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	34.110.000	17 Unit	0	
RAG.001	Sarana Logistik Pangan	30.510.000	12 Unit	0	0
RAG.002	Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	3.600.000	5 Unit	0	0
6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	94.978.116		7.698.022.677	
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	20.430.000	13 rekomendasi	819.740.887	
ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	7.421.400	1 rekomendasi	614.042.677	
ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	13.008.600	12 rekomendasi	205.698.210	0
AEA	Koordinasi	33.252.246	2 kegiatan	555.102.042	0

URAIAN		TARGET Bulan Maret		REALISASI	
		ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN	FISIK
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	10.260.000	1 Kegiatan	66.068.777	36
AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	22.992.246	1 Kegiatan	489.033.265	0
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	3.240.000	9 NSPK	79.625.000	
AFA.001	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	720.000	4 NSPK	0	0
AFA.002	NSPK Kewaspadaan Pangan dan Gizi	2.520.000	5 NSPK	79.625.000	5
QEA	Bantuan Masyarakat	33.500.790	180.001 orang	6.033.514.748	
QEA.001	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan	26.145.000	180.000 orang	4.665.119.940	0
QEA.002	Bantuan Pangan Masyarakat dalam rangka kewaspadaan pangan dan gizi	7.355.790	1 orang	1.368.394.808	0
QMA	Data dan Informasi Publik	4.555.080	2 Data	210.040.000	0
QMA.001	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	2.295.000	1 Data	60.800.000	0
QMA.002	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	2.260.080	1 Data	149.240.000	0
HA.6877	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	90.642.305		3.407.354.154	0
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	4.497.120	11 rekomendasi	376.445.624	0
ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan	540.000	3 rekomendasi	0	0
ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	3.957.120	8 rekomendasi	158.213.619	0
AEA	Koordinasi	4.411.225.980	20 kegiatan	2.522.224.597	
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan	15.664.936	11 Kegiatan	748.098.546	0

	Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan				
AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	20.288.200	8 Kegiatan	885.203.715	0
AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	8.159.125	1 Kegiatan	888.922.336	0
AFA	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria	4.050.000	13 NSPK	54.704.000	
AFA.001	NSPK Penganekaragaman Konsumsi Pangan	1.170.000	4 NSPK	14.750.000	0
AFA.002	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	2.520.000	7 NSPK	30.030.000	0
AFA.003	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	360.000	2 NSPK	9.924.000	0
PCA	Perizinan Produk	3.081.600		99.732.318	
PCA.001	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	3.081.600		99.732.318	
PEH	Promosi	9.079.200	1 Kegiatan	200.055.340	
PEH.001	Promosi Pangan B2SA	9.079.200	1 Kegiatan	200.055.340	0
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	4.086.000	6 Kelompok Masyarakat	98.946.020	0
QDD.001	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	4.086.000	6 Kelompok Masyarakat	98.946.020	0

URAIAN		TARGET Bulan Maret		REALISASI	
		ANGGARAN	FISIK	ANGGARAN	FISIK
QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	4.091.085	1 Laporan	49.485.435	0
QIA.001	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	4.091.085	1 Laporan	49.485.435	0
QMA	Data dan Informasi Publik	2.628.000	1 Data	5.760.820	
QMA.001	Data Situasi Konsumsi Pangan	2.628.000	1 Data	5.760.820	
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	15.017.040	8 Unit	0	
RAG.001	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	15.017.040	8 unit	0	
125.01. WA	Program Dukungan Manajemen	202.446.392		9.561.315.361	
6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	202.446.392		9.561.315.361	
AEC	Kerjasama	5.220.000	1 Dokumen	33.399.393	
AEC.001	Kerja Sama Bidang Pangan	5.220.000	1 Dokumen	33.399.393	
BMA	Data dan Informasi	9.446.544	1 Layanan	454.649.380	
BMA.001	Data dan Informasi Pangan	9.446.544	1 Layanan	454.649.380	
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	148.186.400	7 Layanan	7.652.673.358	
EBA.956	Layanan BMN	1.296.000	1 Layanan	49.820.350	
EBA.957	Layanan Hukum	2.700.000	1 Layanan	83.144.040	
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	6.300.000	1 Layanan	644.634.087	
EBA.959	Layanan Protokoler	1.755.000	1 Layanan	126.637.820	
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	1.800.000	1 Layanan	56.265.739	
EBA.962	Layanan Umum	19.360.134	1 Layanan	1.081.841.073	



EBA.994	Layanan Perkantoran	114.975.266	1 Layanan	5.610.330.249	
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	3.428.820	38 unit	30.500.000	
EBB.951	Layanan Sarana Internal	3.428.820	38 unit	30.500.000	
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	6.480.000	342 orang	30.500.000	
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	6.480.000	342 orang	200.075.412	
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	29.684.628	34 Dokumen	200.075.412	
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6.925.460.00	15 Dokumen	401.651.492	
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.800.000	6 Dokumen	63.000.760	
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	3.531.600	1 Dokumen	143.074.566	
EBD.965	Layanan Audit Internal	11.887.200 (kolom ini ok semua)	12 Laporan (kolom ini ok semua)	582.291.000	

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa target bulanan menjadi sangat kecil karena Badan Pangan Nasional mendapat alokasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) volume anggarannya dari DIPA awal meningkat sebesar Rp. 9.050.825.059.913 menjadi 15.722.461.932.000. Hal tersebut akan berimbas terhadap target serapan bulanan secara keseluruhan terutama Badan, sedangkan untuk masing-masing kegiatan (Deputi) punya target serapan masing-masing kegiatan sehingga target dan realisasinya mendekati persen normal, kecuali Deputi I (Deputi yang menerima ABT sebesar 9 T), tetapi pada saat target per kegiatan disandingkan dengan target Badan secara keseluruhan menyebabkan angka menjadi ribuan persen karena target badan kecil dibanding target kegiatan mengikuti pagunya masing-masing yang cenderung normal.

Sebagaimana Tabel 5 di atas, output kegiatan Fisik yang ter-realisasi pada bulan Juli Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan untuk KRO: a) ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Pangan untuk RO Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, b) AEA Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monitoring dan Pelaporan untuk RO Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan, Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, dan Koordinasi Distribusi dan Cadangan Pangan, c) AFA Norma, Standar, Prodsedur, dan Kriteria (NSPK) untuk RO NSPK Ketersediaan Pangan dan RO NSPK Ketersediaan Pangan, dan NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan; d) QMA Data dan Informasi Publik untuk RO Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan.
2. Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi untuk KRO: a) ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan untuk RO Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan, dan Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi b) AEA Koordinasi untuk RO Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan, dan Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kewaspadaan Pangan dan Gizi, c) AFA Norma, Standar, Prodsedur, dan Kriteria (NSPK) untuk RO NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan, dan Kewaspadaan Pangan dan Gizi, d) BEA Bantuan Masyarakat untuk RO Bantuan Pangan Masyarakat dalam rangka kewaspadaan pangan dan gizi, e) Data dan Informasi Publik untuk RO Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan.
3. Kegiatan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan untuk KRO: a) ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan untuk RO Rekomendasi Kebijakan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan b) AEA Koordinasi untuk RO Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, dan Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan c) AEH Promosi untuk RO Promosi Pangan B2SA, d) AFA Norma, Standar, Prodsedur, dan Kriteria (NSPK) untuk RO Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan dan Penganekaragaman Konsumsi Pangan, c) PCA Perizinan Produk untuk RO

Perijinan, e) QIA Pengawasan dan pengendalian produk untuk RO pengawasan, f) QMA Data dan Informasi Publik untuk RO Data Situasi Konsumsi Pangan. Realisasi anggaran Badan Pangan Nasional berdasarkan aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan sampai bulan Juli mencapai Rp 487.943.503.171 atau 3,11 % berdasarkan pagu Revisi dan 2,59% berdasarkan pagu DIPA. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 6 berikut.

Tabel 6.
Pagu dan Realisasi Anggaran Badan Pangan Nasional
Posisi sampai bulan Juli Tahun 2024

URAIAN		PAGU		REALISASI		
		DIPA	REVISI	SP2D	%DIPA	%REVISI
JUMLAH SELURUHNYA		15.722.461.932.000	15.700.030.846.000	487.943.503.171	2,59%	3,11%
HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	15.609.991.714.000	15.590.447.566.000	427.709.199.275	2,74%	2,74%
HA.687 5	Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	15.506.869.258.000	15.498.576.980.000	390.658.785.366	2,51%	2,52%
HA.687 6	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	52.765.620.000	47.588.014.000	20.268.403.010	38,41%	42,59%
HA.687 7	Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	50.356.836.000	44.282.572.000	16.782.010.899	33,33%	37,90%
WA	Program Dukungan Manajemen	112.470.218.000	109.583.280.000	60.234.303.896	53,55%	54,97%
WA.68 74	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	112.470.218.000	109.583.280.000	60.234.303.896	53,55%	54,97%

Target anggaran bulan Juli Tahun 2024 sebesar Rp. 28.300.431.478 realisasi anggaran sebesar 83,72% atau setara Rp. 23.691.863.113. Rincian per kegiatan sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7.
Realisasi Keuangan Bulan Juli Tahun 2024
Per Kegiatan Lingkup Badan Pangan Nasional

Program dan Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Badan Pangan Nasional	28.300.431.478	23.691.863.113	83,72
6875. Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	27.912.364.664	3.025.170.921	10,84
6876. Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	94.978.116	7.698.022.677	8105,05
6877. Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	90.642.305	3.407.354.154	3759,12
WA6874. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	202.446.392	9.561.315.361	4722,88

Dari Tabel 7 di atas, realisasi keuangan tertinggi pada kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi dengan capaian 8105,05 %. Hal ini disebabkan karena terbayarkannya belanja pegawai dan belanja operasional lainnya, sedangkan kegiatan lainnya secara realisasi keuangan sudah berjalan terutama untuk penyiapan pelaksanaan kegiatan pada periode selanjutnya.

3.2 Monitoring Kegiatan Prioritas

Hasil monitoring kegiatan prioritas lingkup Badan Pangan Nasional selama bulan Juli Tahun 2024 sesuai dengan capaian realisasi keuangan sebagaimana Tabel 7, kegiatan fisik yang mendukung pencapaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kegiatan Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.** Kegiatan ini dilaksanakan oleh Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, dengan realisasi anggaran pada bulan Juli Tahun 2024 sebesar Rp. 3.025.170.921,- dengan kegiatan prioritas bidang sebagai berikut:

1.1. Direktorat Ketersediaan Pangan dengan kegiatan:

1. Rapat Koordinasi Kajian Kebutuhan Beras Khusus

Tujuan rapat ini adalah untuk penyampaian hasil akhir kegiatan kajian penetapan kebutuhan impor beras khusus 2024 yang dilaksanakan pada minggu ke-1 bulan Juli 2024 dengan poin sebagai berikut:

- a. Importir menyampaikan produksi beras ketan dalam negeri belum mencukupi dari segi stok yang mengakibatkan harga ketan yang cukup mahal, sehingga disarankan untuk membuka kembali izin impor beras ketan dengan tetap mempertimbangkan produksi beras ketan lokal.
- b. Importir merasa diperlukan kajian lebih lanjut jika ingin melakukan substitusi beras khusus impor karena harga beras khusus lokal yang dikembangkan saat ini terdapat perbedaan cukup signifikan dari segi bentuk (kualitas) dan harga.
- c. Saat ini harga beras japonica di *end user* (horeka) berkisar di antara Rp 17.000- Rp 20.000/kg sedangkan beras lokal premium sekitar Rp 15.000/kg. Harga CNF japonica +/- \$650/ton (naik). Akibatnya banyak petani yang sudah mulai banyak menanam beras japonica rentang 2012-2018 tidak lagi menanam japonica akibat kalah bersaing dengan impor.
- d. PHRI menyarankan dibuatkan platform digital untuk melakukan tracking kebutuhan beras khusus seluruh hotel di Indonesia, Tujuannya adalah untuk memudahkan proses rekapitulasi data kebutuhan yang nantinya diajukan kepada BUMN sebagai pihak importir
- e) Faktor yang mempengaruhi realisasi impor tidak mencapai 100%, yaitu (1) masa terbit PI kurang sesuai dengan waktu panen di luar negeri, (2) Covid-19 pada tahun 2020-2021 menyebabkan penurunan permintaan, dan (3) keterlambatan penerbitan PI 2022-2023.
- e. Pertimbangan yang digunakan dalam memprediksi perkembangan kebutuhan
- f. Proyeksi GDP perkapita sampai tahun 2031 meningkat rata-rata 2%-4%.

2. Penyusunan Proyeksi Neraca Daging Sapi/Kerbau Tahun 2024

Pertemuan ini bertujuan untuk menyepakati data proyeksi neraca daging sapi/kerbau update bulan Juli tahun 2024 dengan poin sebagai berikut

- a) Stok awal pada proyeksi neraca pangan tahun 2024 sebesar 96.756 ton merupakan stok dari *cold storage* pelaku usaha (sumber : Ditjen PKH kementan)
- b) Data produksi sapi/kerbau lokal merupakan realisasi pemotongan yang tercatat, meliputi data realisasi pemotongan di RPH, TPH dan laporan oleh dinas (termasuk pemotongan hewan kurban) yang didata oleh BPS secara regular.

Data produksi lokal bulan Jan-Jun adalah realisasi pemotongan reguler BPS dan bulan Jul-Des merupakan potensi produksi dari Ditjen PKH Kementan

- c) Produksi sapi/kerbau lokal tahun 2024 sebesar 1.885.028 ekor atau setara daging 369.277 ton. Dimana produksi lokal pada bulan Juli sebesar 692.913 ekor, merupakan data pemotongan reguler dan pemotongan kurban. Data pemotongan kurban yang dilaporkan oleh dinas meliputi sapi lokal yang dipotong untuk kurban sebesar 534.328 ekor, sapi eks-impor sebanyak 709 ekor dan kerbau sebesar 12.917 ekor, sehingga total pemotongan untuk kurban sebesar 547.954 ekor
- d) Pemotongan sapi/kerbau bakalan impor tahun 2024 sebesar 120.914 ton, terdiri dari realisasi pemotongan bakalan impor Jan-Jun sebesar 60.457 ton dan perkiraan pemotongan Jul-Des sebesar 60.457 ton (Ditjen PKH Kementan).
- e) Total produksi sapi/kerbau tahun 2024 yaitu sebesar 490.191 ton, terdiri dari produksi lokal sebesar 1.885.028 ekor atau setara daging 369.277 ton dan pemotongan sapi/kerbau bakalan impor sebesar 445.470 ekor atau setara daging 120.914 ton.
- f) Rencana Impor daging sapi/kerbau tahun 2024 sebesar 315.593 ton (berdasarkan penghitungan stok akhir tahun 2024 untukantisipasi kebutuhan Januari-Februari 2025), terdiri dari : 290.352 ton (Rakortas 28 Maret 2024), 1.592 ton (realisasi di Januari 2024 perpanjangan PI 2023), Februari-Juli 2024 realisasi, dan 23.649 ton rencana usulan tambahan impor tahun 2024 (tambahan ini sudah termasuk untuk kebutuhan industri 416,37 ton).

Data impor Jan-Jun merupakan angka realisasi dari LNSW dan Kemendag, Jul-Des merupakan potensi impor dengan rata-rata realisasi 30.000 ton/bulan.

- g) Kebutuhan daging sapi/kerbau tahun 2024 sebesar 765.962 ton, dengan menggunakan angka konsumsi sebesar 2,72 kg/kap/thn yang diestimasi berdasarkan rata-rata kenaikan 4 tahun terakhir (1,7%)
- h) Didapat neraca akhir tahun 2024 sebesar 136.578 ton yang diprediksikan memenuhi 2 bulan kedepan sebagai antisipasi kebutuhan Januari-Februari 2025.
- i) Rencana Tindak Lanjut: akan dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan Kemenko Bidang Perekonomian, Kemendag, Kementan dan BPS untuk menyepakati data pada proyeksi neraca daging sapi/kerbau nasional tahun 2024.

3. Progres Pengembangan Aplikasi Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2024

Pertemuan ini bertujuan untuk melanjutkan pembahasan progress dan penyempurnaan pengembangan aplikasi proyeksi neraca pangan dengan poin sebagai berikut:

- a) Saat ini server `proyeksineracapangan.badanpangan.go.id` sedang tidak dapat diakses, sehingga segala update pengembangan dilakukan sementara di domain `neraca.aksespangan.com`, dan akan disesuaikan oleh pengembang pada web dengan domain badan pangan.
- b) Progres pengembangan aplikasi secara keseluruhan sudah mencapai 90% dengan rincian:
 - Perbaikan pada rumus ketahanan stok di beranda dan di dashboard setelah login.
 - Hak akses untuk provisi hanya bisa melihat email dan password kab/kota di wilayahnya

4. Pertemuan finalisasi proyeksi neraca daging/kerbau tahun 2024

Pertemuan ini bertujuan untuk memfinalisasi penyusunan dan menyepakati data Proyeksi Neraca Daging Sapi/Kerbau Update Bulan Juli Tahun 2024 terutama pada data konsumsi dengan poin. Pertemuan ini juga mengkonfirmasi :

- a) Pada perhitungan ulang data proyeksi neraca daging sapi/lembu diusulkan 4 alternatif dengan pendekatan sebagai berikut:
 - * Alternatif 1 yaitu menggunakan angka konsumsi 2,75 kg/kap/th dan stok akhir sebesar 136 ribu ton
 - * Alternatif 2 yaitu menggunakan angka konsumsi 2,75 kg/kap/th dengan usulan impor sebesar 77.889 ton
 - * Alternatif 3 yaitu menggunakan angka konsumsi 2,715 kg/kap/th dan stok akhir sebesar 136 ribu ton
 - * Alternatif 4 yaitu menggunakan angka konsumsi 2,715 kg/kap/th dengan usulan impor sebesar 77.889 ton
- b) Telah disepakati perubahan angka konsumsi daging sapi/kerbau 2,9 kg/kap/th menjadi 2,75 kg/kap/th berdasarkan estimasi data konsumsi rumah tangga (susenas 2023) dan data konsumsi non rumah tangga (Bapok tahun 2017) BPS
- c) Dilakukan kesepakatan dengan penggunaan angka konsumsi 2,75 kg/kap/th

5. Rapat Pembahasan Perhitungan Alokasi Penambahan Rencana Kebutuhan Impor Daging Lembu Konsumsi reguler Tahun 2024

Pertemuan ini bertujuan untuk menyosialisasikan mekanisme perhitungan alokasi penambahan rencana kebutuhan impor daging lembu konsumsi reguler tahun 2024 kepada K/L terkait dengan poin :

- a) Kementerian/Lembaga yang mengikuti jalannya rapat pada prinsipnya menyerahkan mekanisme perhitungan pembagian penambahan alokasi kuota impor kepada Badan Pangan Nasional sesuai dengan kewenangannya.
- b) Asisten Deputi Pengembangan Agribisnis Peternakan dan Perikanan, Kemenko Bidang Perekonomian menyampaikan bahwa yang terpenting mengedepankan asas transparansi dan berkeadilan proporsional serta mempertimbangkan Kinerja Perusahaan.
- c) Perwakilan Direktorat Impor, Kementerian Perdagangan menyampaikan bahwa nantinya Kementerian Perdagangan akan mengevaluasi perusahaan yang over realisasi dengan memberikan sanksi tentunya dengan prinsip kehati-hatian.
- d) Perwakilan LNSW, Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa LNSW akan men-support sistem untuk input datanya.
- e) Perwakilan Direktorat Statistik Distribusi, BPS menyampaikan bahwa sebagai bahan masukan sebaiknya realisasi per kode HS dilakukan ditahap awal mengingat ada beberapa perusahaan yang over realisasi serta memperhitungkan % realisasi terhadap kuota impornya.
- f) Perwakilan Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK menyampaikan bahwa harus dipastikan tersedia rujukan data utama dalam Rakortas dan Rakornis, dalam hal ini rujukan datanya adalah SINAS NK. Selain itu terkait dengan perusahaan yang over realisasi harapannya LNSW dapat memfasilitasi suatu alur sistem yang dapat memberikan peringatan apabila realisasi impor sudah melebihi kuota impor.
- g) Direktur Pengelolaan Layanan, Data, dan Kemitraan LNSW menyampaikan bahwa Badan Pangan Nasional sudah dapat melakukan input hasil verifikasi volume di SINAS NK namun belum bisa dialirkan kepada Pelaku Usaha menunggu penetapan perubahan NK Triwulan II Tahun 2024 oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

6. Pertemuan Verifikasi Kebutuhan Impor Daging Lembu Konsumsi Reguler Tahun 2024

Pertemuan ini bertujuan untuk melakukan input data hasil verifikasi kebutuhan impor daging lembu konsumsi reguler di SINAS NK. Hasil pertemuan telah melakukan input data hasil verifikasi penghitungan ulang Rencana Kebutuhan impor daging lembu konsumsi reguler di SINAS NK dari 45 perusahaan per uraian barang dengan total data sebanyak 513.

7. Pertemuan sosialisasi uji coba aplikasi neraca pangan Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Barat

Pertemuan ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi uji coba aplikasi neraca pangan kabupaten/kota dan untuk mempersiapkan aplikasi proyeksi neraca pangan sebelum resmi launching pada tanggal 29 Juli 2024 dengan poin sebagai berikut:

- a) Penyusunan proyeksi neraca pangan penting dilakukan bagi seluruh daerah baik Provinsi maupun Kab/Kota. Dengan adanya aplikasi proyeksi neraca pangan yang terbaru diharapkan dapat memudahkan, serta menghasilkan data yang tepat dan akurat.
- b) Realisasi dana dekon provinsi jawa barat sebesar 41%, sedangkan realisasi dekon Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat sebesar 39%. Angka realisasi ini masih kecil. Diharapkan bagi DKPP Jabar maupun Kab/Kota dapat segera meningkatkan realisasi dekon mengingat sudah memasuki semester kedua tahun 2024 dengan target realisasi dekon yang diharapkan adalah 60-70%.
- c) Beberapa kendala yang disampaikan oleh Kab/Kota terkait penyusunan neraca pangan dan penginputan pada aplikasi, antara lain:
 - Keterbatasan data yang tersedia dan SDM menyebabkan kesulitan dalam mendapatkan data yang tepat terutama terkait barang masuk dan barang keluar sehingga data neraca yang dihasilkan terlalu besar atau terlalu kecil/defisit.
 - Beberapa Kab/Kota kurang mengikuti perkembangan data Susenas atau data jumlah penduduk terbaru yang dipublish oleh BPS, sehingga mengeluhkan adanya perbedaan hasil yang dibuat baik pada aplikasi lama maupun aplikasi baru.
- d) Tindak Lanjut:
 - Pengguna Provinsi dan Kab/Kota dapat berkonsultasi lebih lanjut terkait penyusunan proyeksi neraca pangan dan penginputan data pada aplikasi kepada tim teknis neraca pangan.

- Sembari melakukan uji coba penginputan data, tim proyeksi neraca pangan Provinsi dan Kab/Kota akan meng cross check dan menginformasikan apabila terdapat error pada aplikasi atau angka konversi yang berbeda.

1.2 Direktorat Stabilisasi dan Pasokan Harga

A. Regulasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)

1. Rapat Koordinasi SPHP Livebird

Dalam rapat tersebut diambil satu kesepakatan bahwa perlu adanya sinergi bersama antara pelaku pangan khususnya produsen yaitu peternak kecil, Perusahaan integrator, RPA untuk bersama – sama menjaga harga agar harga tidak tertekan semakin turun dengan cara melakukan upaya semaksimal mungkin sesuai dengan peran masing-masing.

2. Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Kab. Kebumen

Bapak Kepala Badan Pangan Nasional menyampaikan hasil ratas bahwa penyaluran bantuan beras akan dilanjutkan hingga bulan desember 2024. Perum BULOG juga diharapkan dapat meningkatkan volume serapaan dan sarana fasilitas dryer. Kebijakan importasi dilakukan untuk menjaga keseimbangan ketersediaan pangan di dalam negeri. Dirjen PSP menyampaikan kegiatan pompanisasi untuk menguatkan pertanaman padi di musim tanam terdekat, serta bantuan benih padi dan penetapan alokasi pupuk subsidi berdasarkan alokasi subsidi pupuk. Kondisi cadangan air tanah setiap daerah berbeda beda sehingga menjadi tantangan keberhasilan pompanisasi ketika sudah menipis ketersediaan air.

3. Rapat Koordinasi Produksi Kebutuhan Beras di Indonesia Bagian Barat dalam rangka Pembahasan Sistem Logistik Untuk Komoditas Beras

Tujuan Rakor ini adalah menghimpun masukan dari Kementerian/Lembaga dalam pembuatan Perpres Penguatan Sistem Logistik Nasional (SISLOGNAS) yang salah satu poinnya memasukan penjaminan ketersediaan barang pokok dan penting (bapokting) untuk mengurangi disparitas harga di daerah tertinggal.

4. Harmonisasi RPerpres Perubahan Perpres Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan CPP.

Urgensi dan pertimbangan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dilakukan perubahan adalah untuk mengoptimalkan penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah menjaga ketersediaan pangan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui penugasan kepada Perum Bulog dan/atau BUMN dengan poin sebagai berikut:

- Penetapan CPP Jagung untuk kebutuhan konsumsi dan kebutuhan pakan ternak.
- Penetapan jumlah CPP berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat Kementerian/lembaga yang dikoordinasikan oleh Badan Pangan Nasional.
- Perencanaan CPP jangka pendek (1 th), menengah (5 th) & panjang (>5 th).
- Pengelolaan CPP memperhatikan stok akhir tahun yang ditetapkan Kepala Badan.
- Pelepasan CPP ditambahkan melalui mekanisme pemusnahan.
- Penyaluran CPP dilaksanakan secara rutin untuk SPHP (sepanjang tahun) dan bantuan Pangan (minimal 6 bulan). Penyaluran CPP dilaksanakan berdasarkan hasil rapat koordinasi tingkat kementerian/lembaga.
- Penambahan pembebasan PPN, PPh dan bea masuk untuk penugasan CPP
- Pemerintah memberikan kompensasi atas semua biaya yang dikeluarkan oleh Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan, termasuk margin dengan mempertimbangkan harga pembelian CPP oleh Pemerintah.
- Penambahan APIP untuk melakukan reviu atas semua biaya.
- Penggantian dana CPP tahun berjalan untuk penyelenggaraan CPP belum selesai/revisi belum selesai Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan dapat diberikan penggantian dana CPP paling tinggi 50%.

5. Rakor HAP Jagung, Telur Ayam Ras dan Daging Ayam Ras di Tingkat Konsumen

Rapat bertujuan utk sosialisasi Perbadan No. 6 tahun 2024 sekaligus membahas rencana penyesuaian lampiran Peraturan Badan No. 6 tahun 2024 tentang harga batas atas DOC broiler dengan tindak lanjut pertemuan sebagai berikut :

- a. Perbaikan lampiran Perbadan No. 6 Tahun 2024 akan sesegera mungkin dilakukan berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Surat Keputusan Kepala Badan.
- b. Akan dilakukan rapat terbatas dengan Ditjen PKH Kementan dan pelaku usaha dalam penyesuaian harga LB.
- c. Akan dilakukan diskusi dengan asosiasi BUMD yang ada.
- d. List data Sistem Resi Gudang akan diinformasikan pihak Kementerian Perdagangan kepada pihak Bapanas terkait tindak lanjut penyaluran jagung.

B. Panel Harga Pangan

1. Bimbingan Teknis (Bimtek) Panel Harga pangan

Bimtek Panel Harga Pangan dilaksanakan untuk menyamakan persepsi masing-masing Petugas Enumerator dan Pengolah Data terkait Panel Harga Pangan sebagaimana Pedoman Umum Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Beberapa hal yang ditekankan sebagai evaluasi terhadap kesalahan Petugas Enumerator dalam Input data harga:

- a. Pemilihan dan penetapan lokasi pemantauan, responden dan enumerator harus sesuai metode yang telah ditetapkan.
- b. Pengumpulan data oleh enumerator dilaksanakan sesuai metode panel agar mendapatkan data yang akurat.
- c. Pelaksanaan validasi data secara rutin oleh petugas pengolah data Provinsi.
- d. Perubahan/penggantian petugas harus segera dilaporkan ke Pusat dan membuat SK perubahan.
- e. Kinerja petugas enumerator dengan presensi < 70% dalam melaporkan data harga perlu dilakukan evaluasi.

2. Perkembangan Panel Harga Pangan Periode Juli 2024

Harga rata-rata nasional pangan pokok strategis tingkat produsen per 31 Juli 2024 yang di bawah HPP/HAP yaitu Ayam ras (17,36% HAP), Minyak Goreng Curah (14,99% > HET), Beras SPHP Zona 3 (0,50% > HET), dan Beras Premium Zona 1 (0,45% > HET). Komoditas yang termasuk perlu diintervensi yaitu Beras Premium Zona 2-3 dan beras Medium Zona 1-3.

Komoditas dengan harga rata - rata nasional di bawah HET/HAP atau dalam kondisi normal yaitu Kedelai biji kering, Bawang Merah, Jagung tingkat peternak, Cabai merah keriting, Cabai rawit merah, Daging sapi, Daging ayam ras, Telur ayam ras. Tepung terigu, garam, Gula konsumsi dan Ikan.

3. Pengembangan Aplikasi Panel Harga Pangan

Pengembangan Aplikasi Panel Harga Pangan memasuki tahap penyelesaian dan penyempurnaan Fase 1 (satu) Aplikasi Enumerasi dan Fase 2 (dua) Aplikasi Harga Pangan, serta proses mutasi database dari aplikasi lama ke aplikasi yang baru dikembangkan untuk kegiatan launching Panel Harga Pangan. Pencapaian pengembangan Panel Harga Pangan pada Fase 1 (satu) sebagai berikut:

- a. Penyesuaian wilayah Provinsi dan Kab/Kota sesuai dengan kode wilayah dari Kementerian Dalam Negeri serta pengaturan wilayah kab/kota IHK (Indeks Harga Konsumen) sesuai Badan Pusat Statistik.
- b. Management profil, presensi, pengguna internal, admin, verifikator, pengguna enumerator pusat, sektor komoditas dinamis, serta komoditas pusat.
- c. Pengaturan harga acuan meliputi HAP/HET/HPP.
- d. Penyampaian list data master usaha, laporan survei data harga tingkat Provinsi dan Kab/Kota, rekapitulasi data, wilayah pemantauan survei, survei kelengkapan komoditas, serta outlier laporan harian.
- e. Pengaturan verifikasi hasil survey serta perhitungan jumlah survey yang disetujui ataupun ditunda

Pencapaian pengembangan Panel Harga Pangan pada Fase 2 (dua) sebagai berikut:

- a. Penyampaian kuesioner dinamis
- b. Penyampaian data peta tingkat provinsi hingga kab/kota, tabel dinamis peta dengan perbandingan harga acuan terhadap rata-rata nasional, filter tabel peta multi provinsi dan kab/kota, filter status komoditas pangan yang perlu diintervensi, waspada dan aman, serta tooglesort tabel peta.
- c. Penyampaian infografis harga komoditas pangan, filter infografis sampai tingkat provinsi dan kab/kota, serta unduh infografis.
- d. Penyampaian tabel harga dinamis yang menampilkan harga terendah dan tertinggi tingkat provinsi dan kab/kota, filter tabel harga sampai tingkat provinsi dan kab/kota, serta unduh tabel dinamis.
- e. Penyampaian infografis harga pangan internasional dan pengaturan data panel internasional.
- f. Penyampaian fitur honorarium enumerator.

4. Monev SPHP dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Kota Bogor

Sebelum pemantauan pasokan dan harga, monev diawali dengan uji keamanan pangan segar untuk komoditas kentang, selada, cabai merah keriting, cabai rawit merah, ayam dan ikan kembung. Adapun komponen yang diuji meliputi pengujian formalin, dan timbal serta pengujian rapid test residu pestisida. Bapak Anas selaku Direktur PPSKMP mengungkapkan bahwa apabila uji rapid test menunjukkan hasil positif maka sampel akan diuji ulang melalui laboratorium terakreditasi yang selanjutnya ditelusuri sumbernya, lalu dilakukan pembinaan.

Hasil uji laboratorium untuk komoditas kentang, selada, CMK, CRM, ayam, dan ikan kembung menunjukkan negatif dan masih dalam batas toleransi yang aman. Harga komoditas pangan relatif stabil, tetapi ada sedikit kenaikan pada Minyakita yaitu Rp500, sementara untuk disparitas harga antar daerah, cenderung melandai dan turun. Adapun kendala yang dihadapi masyarakat saat ini yaitu daya beli masyarakat kurang, tetapi ketersediaan dan pasokan aman.

5. Monev SPHP dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Kota Tangerang Selatan

Monitoring Pasokan dan Harga Pangan serta Pengujian Keamanan Pangan Segar di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan di Pasar Serpong pada tanggal 9 Juli 2024. Kegiatan tersebut dilakukan secara terpadu oleh Direktorat SPHP, Direktorat PPSKMP, Pusdatin, dan Biro PKH yang dipimpin oleh Kepala Pusdatin Bapanas dan didampingi oleh Kepala DKPPP Kota Tangerang Selatan, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Jakarta dan Banten, Pinca Perum Bulog Tangerang, dan Perwakilan DKP Prov. Banten. Harga komoditas pangan saat ini relatif stabil dengan ketersediaan cukup aman.

6. Monev SPHP dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Kota Depok

Berdasarkan pemantauan, diketahui bahwa Pedagang di dalam Pasar Cisalak mengaku sudah tidak menjual beras SPHP lagi karena kurangnya peminat dari konsumen terakhir masuk pada tahun 2023 dengan ukuran 50 kg sebanyak 10 karung namun habis dalam jangka waktu yang lama sehingga saat ini pedagang tidak mengambil beras SPHP lagi. Namun, diluar pasar cisalak terdapat 1 kios penjual beras SPHP 5kg dijual dengan Harga RP 62.500/kg.

Pedagang mengaku stok tiap kedatangan sebanyak 2 ton dan saat ini sisa 500 kg di Gudang. Pedagang pasar pada umumnya menyampaikan bahwa mereka mengalami penurunan peminat karena banyak pedagang di luar pasar yang menjual dengan Harga lebih murah (karena tidak bayar ongkos sewa lahan). Namun, pihak pasar mengaku Harga sewa di pasar sudah termasuk murah sekitar Rp 1.400.000/tahun namun masih saja banyak pedagang luar yang enggan bergabung ke dalam pasar. Pengujian keamanan pangan segar dilakukan pada komoditas sayur, bawang dan lainnya (total 10 komoditas) dengan hasil pengujian Negatif (Kualitas Pangan Aman). Komponen yang diuji meliputi pengujian terhadap formalin, timbal, dan residu pestisida.

7. Monev SPHP dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Kabupaten Tangerang

Berdasarkan pemantauan, diketahui bahwa Beras SPHP dari BULOG dipasok untuk 2 (dua) toko di Pasar Gudang Tigaraksa. Di salah satu kios ditemukan beras SPHP yang dibuka kemasannya dan menurut pedagang, hal ini dilakukan karena permintaan konsumen yang membeli beras secara eceran 1 – 2 liter.

Pada saat pemantauan, pedagang sudah diberikan edukasi bahwa beras SPHP kemasan 5 (lima) kg tidak boleh dijual dengan membuka kemasan.

Hal tersebut menjadi perbaikan untuk Perum BULOG dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten serta stakeholder terkait untuk mengawasi penjualan beras SPHP. Pengawasan Keamanan Pangan bersama dengan Badan Pangan Nasional dan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, Tim Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah 24 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang melaksanakan pengawasan pangan segar di Pasar Gudang Tigaraksa Kabupaten Tangerang Provinsi Banten pada 18 Juli 2024. Pengambilan sampel pada 6 (enam) komoditas Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan 2 Pangan Segar Asal Hewan (PSAH) untuk dilakukan pengujian cepat keamanan pangan segar.

Berdasarkan pengujian cepat/ rapid test PSAT yaitu cabai rawit merah, bawang merah, bawang putih, wortel, timun, dan tomat menunjukkan hasil negatif residu pestisida, timbal, dan merkuri. Sementara itu, rapid test terhadap 1 (satu) sampel daging ayam dan 1 sampel ikan kembung negatif formalin. Pemantauan juga dilaksanakan di Gudang Bulog Cikande. Gudang Bulog Cikande memiliki 3 komplek pergudangan, masing-masing komplek gudang ada 3 unit bangunan gudang, total ada 9 unit gudang.

Kapasitas tiap gudang 10.000 ton. Saat kunjungan tersedia 17.500 ton beras. Serapan dalam negeri sebanyak 800 ton. Asal gabah atau beras dari wilayah Kabupaten Tangerang, Lebak, Pandeglang dan Kabupaten Serang. Kondisi harga gabah Rp 7.000 - 7.200/kg dan kadar air maksimum 14%. Serapan dalam negeri berkisar 800 ton. Gudang Bulog Cikande II termasuk dalam wilayah kerja Perum BULOG Cabang Tangerang yang memasok ke wilayah Kota Tangerang, Banten dan Lebak. Selain itu, juga memasok di wilayah Sumatera, Kalimantan apabila kekurangan. Beras asal Importasi dari Thailand dan Vietnam, total 17.500 ton. Penyaluran bantuan pangan beras sejak bulan Januari dan saat ini 15.174 Ton/KPM. Penyaluran beras SPHP sejak Januari sd saat ini 21.000 ton.

8. Monev SPHP dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Purwakarta

Kondisi Pasokan dan Harga Pangan terpantau dalam kondisi yang aman. Hanya ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan adalah Cabai Rawit Merah (3 hari terakhir). Selain itu juga ada komoditas yang mengalami penurunan harga dalam seminggu terakhir seperti Bawang Putih (Turun Rp 500/kg), Bawang Merah (Turun Rp 2.000).

Dalam monev juga dilakukan pengujian keamanan pangan segar. Ada 2 pengujian yang dilakukan diantaranya Uji Formalin dan Uji Pestisida. Uji Formalin dilakukan pada komoditas Daging Ayam Ras. Sedangkan, Uji Pestisida dilakukan pada komoditas terong, CRM, CMK, Bawang Merah, Bawang Putih, Timun, dan Kacang Panjang. Hasil dari pengujian tersebut didapat bahwa tidak ditemukan formalin pada Daging Ayam Ras, dan tidak ditemukan pestisida pada terong, CRM, CMK, Bawang Merah, Bawang Putih, Timun, dan Kacang Panjang. Pemantauan juga dilakukan ke Gudang BULOG Ciwangi Kab. Purwakarta. Terdapat 1 Unit Gudang dengan kapasitas 3.500 ton.

Saat kunjungan stok beras sebesar 2.218 ton. Serapan beras dalam negeri 2.400 ton. Asal beras dari wilayah Subang, Purwakarta, Karawang. Harga beli Rp 11.000/kg dan kadar air 14%. Beras asal Importasi 1.800 ton. Penyaluran bantuan pangan beras sejak bulan Januari sampai dengan saat ini 5.233.500 26 kg. Saat ini akan disalurkan 872.250 kg bantuan pangan beras. Penyaluran beras SPHP sejak Januari sd 25 Juli 1.523 ton.

Tindak lanjut monev antara lain Kepala daerah bersama satgas pangan polri dan pengelola pasar diharapkan dapat melakukan monitoring harga dan pengujian keamanan pangan secara rutin berkoordinasi dengan Bapanas dan Dinas yang menangani pangan setempat.

9. Monev SPHP dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Kab. Bekasi

Untuk harga cabai rawit merah dalam 1 minggu terakhir ini terus naik dari harga sebelumnya 70.000/kg dan untuk hari ini Rp. 85.000/kg. Terdapat 2 kios yang menjual beras SPHP di Pasar Baru dengan stok saat ini di setiap kios kurang lebih 1 ton. Dalam monev juga dilakukan kunjungan ke Gudang Bulog Warung Bongkok, Cibitung Luas Gudang Bulog Warung Bongkok yaitu kurang lebih 4 Ha memiliki 8 unit dengan kapasitas setiap unit yaitu 3.500 ton. Gudang Bulog Warung Bongkok, Cibitung melakukan proses pengemasan untuk Bantuan Pangan tahap 3 pada bulan Agustus yang disalurkan di daerah Bekasi dan sekitarnya. Gudang Bulog Warung Bongkok, memiliki stok yang tersedia 14.000 ton (sesuai dengan target serapan BULOG) dan jumlah seluruh stok pada gudang Bulog cabang Karawang sebanyak 42.000 ton.

Ketersediaan beras berasal dari beras lokal kab. Karawang yang telah melalui masa panen raya pada bulan Mei, Juni, dan Juli dan importasi beras dari Thailand. Stok beras SPHP saat ini sebanyak kurang lebih 106 ton yang cukup untuk 1 bulan dan disalurkan ke Pasar Bekasi dan toko-toko terdekat. Untuk komoditas beras premium, gula konsumsi, dan minyak goreng berada di Gudang Bulog Purwosari.

10. Monev SPHP dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Kab. Bogor

Adanya penurunan pada pembelian daging ayam ras dikarenakan meningkatnya harga dari yang sebelumnya Rp. 35.000-Rp. 37.000/kg, selain itu faktor adanya persaingan harga dari pedagang yang berada diluar kios pasar mereka menjual dengan harga yang lebih murah. Untuk telur ayam ras dan cabai rawit merah mengalami kenaikan dari minggu sebelumnya. Telur ayam ras sebelumnya yaitu Rp. 26.000/kg dan untuk cabai rawit merah di harga sebelumnya Rp. 45.000-Rp. 60.000/kg. Stok beras SPHP saat ini ada sebanyak 100 ton.

Untuk stok beras premium sebanyak 1000 ton berasal dari Ngawi, Solo dan Subang. Harga beras premium Rp. 12.800-13.100/kg, untuk beras medium di harga Rp. 11.000-Rp. 12.000/kg dengan stok saat ini 60 ton. Monev juga dilaksanakan di Gudang BULOG Dramaga. Luas Gudang Bulog Dramaga sekitar 1.7 Ha dengan kapasitas gudang 2000 ton di 2 unit dan 1000 ton di 2 unit. Gudang Bulog Dramaga memiliki 4 mesin rebagging saat ini dan berencana akan menambah 2 unit dengan kapasitas setiap mesin 15 ton per hari.

Terkait kesiapan Penyaluran bantuan pangan beras tahap ketiga, stok sebanyak 5.700 ton dialihkan ke Gudang Bulog Karawang untuk penyaluran di bulan Agustus, sedangkan untuk bulan Oktober dan Desember stok dialihkan ke gudang sewa yang berada di Citeureup dikarenakan Gudang bulog dramaga sedang renovasi. BULOG telah berkoordinasi dengan Kab/Kota setempat terkait rencana penyaluran serta verifikasi dan validasi data PBP untuk penyaluran Bantuan Pangan Tahap ketiga dan dijadwalkan akan mulai penyaluran pada pekan depan. Stok beras SPHP saat ini sebanyak 400 ton yang cukup untuk 1 minggu dengan lokasi distribusi ke Kab. Bogor, Kota Bogor dan Kota Depok dengan pasar sejumlah kurang lebih 70 titik, selain itu juga mendistribusi ke 100 RPK yang ada di wilayah Bogor dan 50 toko yang ada di luar pasar.

11. Monev SPHP dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Kota Serang

Kondisi pasokan dan harga pangan terpantau dalam kondisi yang aman. Beberapa komoditas pangan yang mengalami kenaikan dalam satu minggu terakhir yaitu Beras Premium, Cabai Merah Keriting, Minyak Goreng Curah, dan Gula Konsumsi. Selain itu juga terdapat komoditas yang mengalami penurunan harga dalam seminggu terakhir seperti Beras SPHP, Cabai Rawit Merah, Bawang Merah, Bawang Putih, Daging Ayam Ras, dan Telur Ayam Ras.

C. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dan Gerakan Pangan Murah

1. Perkembangan Pelaksanaan GPM Pusat dan Daerah

SPHP GPM merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempermudah masyarakat memperoleh bahan pangan, dengan harga terjangkau dengan tujuan stabilisasi pasokan dan harga serta pengendalian inflasi pangan. Kegiatan SPHP GPM Tahun 2024 meliputi kegiatan GPM di 38 (tiga puluh delapan) provinsi dan 514 (lima ratus empat belas) Kabupaten/Kota. Komoditas pangan pada kegiatan SPHP GPM adalah komoditas pembentuk inflasi (volatile foods) antara lain beras, gula konsumsi, bawang putih, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, dan minyak goreng yang dapat disediakan oleh Perum BULOG, ID FOOD, BUMD Pangan, distributor, dan petani/peternak/poktan/gapoktan. Sedangkan komoditas lainnya seperti cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang merah, telur ayam ras, dan komoditas pangan lainnya yang dihasilkan petani/peternak/ poktan/gapoktan.

Pelaksanaan GPM sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 telah dilaksanakan sebanyak 579 kali pelaksanaan dengan rincian sebagai berikut: Pusat sebanyak 3 kali, Provinsi sebanyak 104 kali dan kabupaten/kota sebanyak 472 kali pelaksanaan. Pelaksanaan GPM dari Bulan Januari-Juli 2024 sebanyak 6.001 kali dengan rincian Pusat sebanyak 147 kali, Provinsi sebanyak 924 kali dan kabupaten/kota sebanyak 4.930 kali baik menggunakan anggaran APBN Pusat, Dekonsentrasi, APBD, maupun secara mandiri.

2. Perkembangan Penyaluran Beras SPHP periode Juli 2024

Berdasarkan laporan update tanggal 31 Juli 2024 realisasi SPHP beras di tingkat konsumen selama Bulan Juli sebesar 115.324.637 kg. Total realisasi secara nasional dari Januari hingga akhir Juli sebesar 924.495.332 kg atau setara 77,37% dari target penyaluran Tahun 2024 sebanyak 1.200.000.000 kg. Realisasi Penyaluran terdiri dari Pengecer sebesar 572.881.620 kg atau 61,7%, Distributor sebesar 305.474.964 atau 32,9%, Satgas pangan sebesar 35.282.823 atau 3,8%, Pemda sebesar 12.070.439 atau 1,3% dan BUMN sebesar 2.785.486 atau 0,3%.

3. Kegiatan HUT ke-3 Badan Pangan Nasional

Dalam rangka meramaikan perayaan Hari Ulang Tahun ke-3 Badan Pangan Nasional tanggal 29 Juli 2024, diselenggarakan berbagai kegiatan yang terangkum dalam acara Festival Pangan Nusantara dan Bapanas Awards. Direktorat SPHP melaksanakan seminar nasional gula bekerja sama dengan BRIN bertema “**Strategi Peningkatan Ketersediaan/Pasokan, Stabilisasi Harga dan Pencapaian Swasembada Gula Tebu di Indonesia**”.

Gerakan Pangan Murah di rangkaian acara Festival Pangan Nusantara, dan SPHP Awards di rangkaian acara Bapanas Awards.

1.3 Direktorat Distribusi Cadangan Pangan

Kegiatan prioritas dari Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan berdasarkan laporan:

1. Penyusunan rekomendasi kebijakan

Kajian margin cadangan pangan pemerintah dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan para pakar dan perwakilan instansi terkait, dengan tujuan untuk menetapkan margin keuntungan dalam penugasan kepada Perum BULOG dan/atau BUMN Pangan.

FGD ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan rekomendasi yang komprehensif mengenai penetapan margin keuntungan yang sebaiknya dalam bentuk persentase, sehingga dapat menyesuaikan dengan fluktuasi harga pangan yang terjadi. Kegiatan ini diharapkan dapat mendukung pengelolaan cadangan pangan yang lebih efektif dan efisien, serta memastikan ketersediaan pangan yang stabil di masyarakat.

2. Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan

a) Rapat Koordinasi Penyusunan Konsep Keptadan tentang Harga Pembelian Beras (HPB) untuk Penyelenggaraan CPP Tahun 2024

Rapat Koordinasi Penyusunan Konsep Keptadan tentang Harga Pembelian Beras (HPB) untuk Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Tahun 2024 diadakan untuk menghimpun saran dan masukan dari berbagai pihak terkait, termasuk pakar dan instansi pemerintah. Tujuan utama rapat ini adalah untuk merumuskan konsep yang efektif mengenai harga pembelian beras, yang akan menjadi acuan dalam pengelolaan cadangan pangan. Diskusi dalam rapat ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang mendukung efisiensi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan pangan, serta memastikan ketersediaan beras yang stabil di pasar.

b) Koordinasi Penguatan Sarana dan Prasarana Logistik Pangan Tahun 2024

Koordinasi Penguatan Sarana dan Prasarana Logistik Pangan Tahun 2024 difokuskan pada pengembangan dan peningkatan fasilitas logistik untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan nasional. Kegiatan ini mencakup penyediaan barang milik negara seperti cold storage, air blast freezer, dan reefer container, yang bertujuan untuk memperkuat sistem distribusi pangan dan mengurangi kerugian akibat kerusakan produk pangan.

Selain itu, koordinasi ini juga melibatkan sosialisasi dan penjangkaran usulan dari dinas pangan provinsi untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung ketahanan pangan secara berkelanjutan.

c) Rapat Koordinasi Persiapan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahap III Tahun 2024

Rapat Koordinasi Persiapan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pemberian Bantuan Pangan Tahap III Tahun 2024 bertujuan untuk memastikan kelancaran proses penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam rapat ini, dibahas mengenai anggaran yang telah disiapkan, dokumen penyaluran yang harus lengkap, serta konsep petunjuk teknis yang akan digunakan.

Selain itu, rapat ini melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari Badan Pangan Nasional, Perum BULOG, dan dinas pangan provinsi, untuk mengevaluasi pelaksanaan bantuan pangan sebelumnya dan merumuskan langkah-langkah strategis guna meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan di masa mendatang.

d) Rapat Koordinasi Evaluasi Bantuan Pangan Beras Tahap I dan Tahap II serta Persiapan Penyaluran Bantuan Pangan Tahap III Tahun 2024

Rapat Koordinasi Evaluasi Bantuan Pangan Beras Tahap I dan II serta Persiapan Penyaluran Bantuan Pangan Tahap III Tahun 2024 diadakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi penyaluran bantuan pangan yang telah dilakukan, serta merencanakan langkah-langkah untuk tahap selanjutnya. Dalam rapat ini, dibahas hasil evaluasi dari penyaluran sebelumnya, termasuk tantangan yang dihadapi dan perbaikan yang diperlukan. Selain itu, peserta rapat juga membahas strategi dan mekanisme penyaluran untuk tahap III, dengan fokus pada penguatan koordinasi antar instansi dan penyempurnaan dokumen penyaluran agar proses dapat berjalan lebih lancar dan tepat sasaran.

3. Penyaluran CPP untuk Pemberian Bantuan Pangan

Kegiatan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk pemberian bantuan pangan bertujuan untuk menyediakan pasokan pangan yang cukup dan tepat waktu kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam situasi darurat atau bencana. Penyaluran CPP dilakukan berdasarkan peraturan yang mengatur mekanisme dan prioritas distribusi, melibatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Kegiatan ini mencakup pengelolaan dan distribusi cadangan pangan, seperti beras, jagung, dan kedelai, yang dikelola oleh Perum BULOG, serta memastikan bahwa bantuan pangan dapat menjangkau kelompok masyarakat yang paling rentan, sehingga mendukung ketahanan pangan nasional secara keseluruhan.

4. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Keadaan Darurat

Kegiatan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) untuk Penanggulangan Bencana Alam dan Keadaan Darurat bertujuan untuk memberikan bantuan pangan secara cepat dan efektif kepada masyarakat yang terdampak bencana.

Penyaluran ini dilakukan sesuai dengan peraturan yang mengatur mekanisme distribusi pangan dalam situasi darurat, dengan prioritas pada daerah yang paling membutuhkan. Kegiatan ini melibatkan koordinasi antara Badan Pangan Nasional, pemerintah daerah, dan instansi terkait untuk memastikan bahwa cadangan pangan dapat disalurkan dengan tepat waktu dan sesuai kebutuhan, sehingga membantu mengurangi dampak krisis pangan akibat bencana.

5. Pelaporan Database Cadangan Pangan Pemerintah Pusat dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Kegiatan Pelaporan Database Cadangan Pangan Pemerintah Pusat dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bertujuan untuk mengintegrasikan dan memperbarui data cadangan pangan secara sistematis, guna mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam kebijakan ketahanan pangan. Hasil dari kegiatan ini mencakup pengumpulan dan pelaporan data cadangan pangan yang dikelola oleh Perum BULOG dan BUMN Pangan, serta pemerintah daerah, yang dilakukan secara rutin melalui aplikasi web. Data yang diperoleh memberikan gambaran yang akurat mengenai ketersediaan dan distribusi pangan, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam merespons kebutuhan pangan masyarakat dan mengantisipasi potensi krisis pangan.

6. Penguatan Sarana dan Prasarana Logistik Pangan

Kegiatan Penguatan Sarana dan Prasarana Logistik Pangan bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung ketersediaan serta distribusi pangan secara efisien dan berkelanjutan. Hasil dari kegiatan ini mencakup penyediaan berbagai fasilitas logistik, seperti cold storage dan freezer, yang diperlukan untuk menjaga kualitas pangan dan mencegah kerugian akibat kerusakan.

Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan koordinasi dengan dinas pangan provinsi untuk memastikan bahwa sarana dan prasarana yang disediakan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, serta mendukung stabilisasi pasokan dan harga pangan di seluruh wilayah.

6. **Kegiatan Pengembangan Database Cadangan Pangan Nasional**

Kegiatan Pengembangan Database Cadangan Pangan Nasional bertujuan untuk menciptakan sistem informasi yang terintegrasi dan akurat mengenai cadangan pangan, yang mencakup data dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Hasil dari kegiatan ini adalah tersedianya database yang diperbarui secara rutin, yang mendukung pengambilan keputusan strategis dalam kebijakan ketahanan pangan.

Melalui sistem aplikasi web, data cadangan pangan dapat diakses secara real-time, memungkinkan pemantauan yang lebih baik terhadap ketersediaan dan distribusi pangan, serta membantu dalam merespons kebutuhan masyarakat secara efektif.

2. Kegiatan Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, dengan realisasi anggaran pada bulan Juli Tahun 2024 sebesar Rp. 7.698.022.677,- dengan kegiatan prioritas bidang sebagai berikut:

2. 1. Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan

1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan berupa Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA). Kegiatan yang mendukung Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan melalui Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) meliputi beberapa poin penting sebagai berikut:

- a. *Focus Group Discussin* (FGD). Dilaksanakan untuk membahas indikator-indikator yang akan digunakan dalam penyusunan FSVA. FGD ini melibatkan berbagai pihak, termasuk kementerian, lembaga, dan pakar di bidang ketahanan pangan, untuk mendapatkan masukan dan dukungan data yang relevan.
- b. Pengumpulan Data Indikator. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber yang diperlukan untuk penyusunan FSVA. Data ini mencakup informasi tentang ketersediaan pangan, aksesibilitas dan kondisi gizi masyarakat di berbagai daerah.

- c. Pemetaan Kerentanan Pangan. Melakukan analisis untuk memetakan daerah-daerah yang rentan terhadap kerawanan pangan. Ini mencakup identifikasi wilayah yang memiliki tingkat kerawanan pangan yang tinggi berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
- d. Pengembangan Metodologi. Mengembangkan metodologi baru untuk penyusunan FSVA yang lebih akurat dan relevan. Ini termasuk pembaruan metodologi yang digunakan untuk mengukur status ketahanan pangan dan gizi di wilayah tertentu.
- e. Kolaborasi Lintas Sektor. Mendorong kolaborasi berbagai Kementerian/Lembaga untuk memastikan bahwa data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan FSVA saling melengkapi dan mendukung kebijakan yang holistik.
- f. Penyusunan Rencana. Berdasarkan hasil FSVA, menyusun rencana aksi mencakup langkah-langkah konkrit untuk mengatasi masalah kerawanan pangan yang teridentifikasi. Rencana ini akan menjadi panduan bagi pelaksanaan program-program intervensi di lapangan.
- g. Penyuluhan dan Sosialisasi. Melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pentingnya ketahanan pangan dan hasil dari FSVA. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program-program pengendalian kerawanan pangan.
- h. Monitoring dan Evaluasi. Menetapkan mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi implementasi rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari FSVA. Ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil efektif dalam mengatasi kerawanan pangan.

2. Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan berupa Koordinasi, sosialisasi, bimtek, monev dan pelaporan pengendalian kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Pemantauan Bencana Banjir di Kab. Cirebon, Jawa Barat. Kegiatan pemantauan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui kondisi terkini lokasi terdampak bencana banjir di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Upaya yang telah dilakukan oleh pemda dan para pihak terkait, yaitu:
 - * Tim Pusdalops BPBD Kab. Cirebon berkoordinasi dengan perangkat desa beserta instansi terkait untuk kegiatan *assesment*.
 - * BPBD Kab. Cirebon melakukan penyisiran lokasi terdampak untuk penanganan kedaruratan terutama evakuasi warga terdampak.

- b. Monev Pasokan dan Harga Pangan serta Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Pasar Tomang Barat. Dari pengambilan uji sampling ini didapati kondisi pangan segar di Pasar Tomang Barat dijamin aman dari residu pestisida dan cemaran zat-zat berbahaya seperti formalin, boraks, metanil, dan lain sebagainya. Uji formalin dan organophosphate carbanate test dilakukan terhadap beberapa komoditas pangan segar yang ada di kios pedagang pasar antara lain cabai, bawang, wortel, tomat, ayam, dan ikan. Pedagang pasar menyambut baik upaya ini dan berharap hasilnya juga dapat dilaporkan secara rutin untuk menjaga kualitas barang dagangan.
 - c. Diskusi Pengembangan Sagu untuk Mendukung Ketahanan Pangan. Diskusi dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 2024, bertujuan untuk mendiskusikan pemanfaatan pangan lokal dalam menunjang ketahanan pangan. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan industri sagu: (1) keberlanjutan sumberdaya, (2) target pasar, dan (3) harga produk. Bapak Halim menyampaikan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka pengembangan industri sagu: (a) Program peningkatan gizi dan Kesehatan dengan konsumsi beras analog berbahan baku sagu, (b) Mendorong pengembangan sumber alternatif pangan lokal melalui peraturan pemerintah, (c) Pemberian bantuan pangan beras sagu di wilayah penghasil sagu, dan (d) Edukasi dan promosi konsumsi beras sagu. Tindak lanjut yang akan dilakukan, yaitu penyusunan Roadmap Pengembangan Sagu dengan memperhatikan aspek keberlanjutan, target pasar dan harga.
 - d. Koordinasi dengan lintas K/L, OPD dan eselon I/II Lingkup Badan Pangan Nasional untuk mengikuti acara: Koordinasi dengan lintas Kementerian/Lembaga (K/L), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan eselon I/II di lingkungan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan pembahasan hasil revidi, mendapatkan dukungan data, serta memastikan keselarasan dalam penyusunan kebijakan dan program terkait ketahanan pangan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengendalian kerawanan pangan di Indonesia.
3. Penyusunan NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan berupa Penyusunan NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan
4. Beberapa kegiatan pendukung diantaranya:
- a. FGD Perbaikan Naskah Urgensi Rencana Pangan Nasional Tahun 2025-2029. FGD ini dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, secara hybrid di Hotel Savero Depok, bertujuan untuk: (1) Mendapatkan masukan dan dukungan data serta informasi, khususnya terkait bidang perikanan; dan (2) Mengkoreksi isi naskah urgensi rencana pangan tahun 2025-2029.

Tindak lanjut yang akan dilakukan: (1) Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan akan menyampaikan hasil koreksi naskah urgensi kepada Biro PKH; dan (2) Biro PKH selanjutnya akan melakukan pertemuan dengan pakar dan lintas K/L untuk penyempurnaan rancangan rencana pangan tahun 2025-2029, sebelum diusulkan dalam progsun.

b. FGD Persiapan Penyusunan NSPK tentang Tata Cara Penyusunan Program Kesiapsiagaan Krisis Pangan. FGD ini dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2024, di Hotel Margo Depok, bertujuan untuk mengidentifikasi tata cara penyusunan program kesiapsiagaan kebencanaan dan penanggulangan bencana dari BNPB dan Kementerian Sosial RI. Pertemuan ini membahas hal terkait:

- Tata cara kesiapsiagaan dalam penanggulangan bencana yang dilakukan BNPB melalui penyusunan rencana kontingensi;
- Database kebencanaan (peta risiko bencana) wilayah yang dapat digunakan sebagai informasi kesiapsiagaan;
- Program mitigasi bencana dengan memanfaatkan sistem pantauan dan risiko bencana (Inarisk);
- Peran Kemensos dalam penanggulangan bencana dari pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana.

Tindak lanjut yang dilakukan :

- Direktorat PKP NFA akan menyandingkan peta FSVA dengan Peta risiko Bencana BNPB untuk menentukan daerah-daerah lokus intervensi kesiapsiagaan krisis pangan.
- Direktorat PKP NFA akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan BNPB (Direktorat Pemetaan Evaluasi dan Risiko Bencana; Direktorat Kesiapsiagaan; dan Direktorat Mitigasi) dan Kemensos (Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam) untuk merumuskan juknis tata cara penyusunan program kesiapsiagaan krisis pangan.

5. Bantuan Pangan dalam Rangka Pengendalian Kerawanan Pangan berupa Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan

Kegiatan prioritas Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan yang dilakukan oleh Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan mencakup intervensi yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran pangan masyarakat di daerah rentan. Intervensi ini melibatkan penyaluran bantuan pangan kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan, dengan fokus pada daerah-daerah yang telah diidentifikasi sebagai lokasi intervensi berdasarkan analisis kerawanan pangan.

Kegiatan ini juga mencakup koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan stakeholder terkait untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan lancar dan akuntabel, serta berkontribusi dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut.

6. Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan berupa Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan

- a. *Ground Check Analysis* Kerawanan Pangan Berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi D.I.Yogyakarta.

Kegiatan *Ground Check Analysis* Kerawanan Pangan Berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga di Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi D.I.Yogyakarta bertujuan untuk mengkonfirmasi kondisi kerawanan pangan di lapangan melalui analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Kegiatan ini melibatkan koordinasi dan diskusi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan setempat, serta kepala kalurahan di wilayah tersebut. Hasil dari ground check menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti pendidikan, kemiskinan, dan kondisi rumah tangga lansia berpengaruh signifikan terhadap kerawanan pangan, sehingga informasi ini akan digunakan untuk menyempurnakan analisis dan merumuskan kebijakan yang lebih tepat dalam penanganan kerawanan pangan di daerah tersebut.

- b. *Ground Check Analysis* Kerawanan Pangan Berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga di Kab. Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.

Kegiatan *Ground Check* bertujuan untuk mengkonfirmasi hasil analisis kerawanan pangan berdasarkan karakteristik sosial ekonomi rumah tangga di Kabupaten Sambas, melibatkan berbagai pihak seperti Dinas Pangan dan Kepala Desa.

Analisis menunjukkan bahwa faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap kerawanan pangan di Kabupaten Sambas adalah pendidikan rendah (tamat SD/tidak sekolah), tingkat kemiskinan (7,08% pada 2023), dan rumah tangga lansia. Hasil ini sejalan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat.

- c. *Ground Check Analysis* Kerawanan Pangan Berdasarkan Karakteristik Sosial Ekonomi Rumah Tangga di Kab. Muaro Jambi dan Kab. Batang Hari, Provinsi Jambi.

Ground check dilaksanakan pada 10-12 Juli 2024 untuk mengkonfirmasi hasil analisis kerawanan pangan berdasarkan karakteristik sosial ekonomi rumah tangga di lapangan. Di Kabupaten Muaro Jambi, ditemukan 9 karakteristik yang mempengaruhi kerawanan pangan, dengan 3 yang paling berpengaruh adalah rumah tangga miskin, pendidikan kepala rumah tangga yang rendah, dan tidak adanya pasar permanen.

2. 2. Direktorat Kewaspadaan Pangan

1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi, dengan kegiatan pendukung, diantaranya:

- a. Analisis Situasi Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (Rilis Juli 2024)

Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) merupakan salah satu *tools early warning system* sebagai dasar kebijakan pangan dan gizi. Penyusunan SKPG sesuai dengan amanat dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 16 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi, yang disusun secara periodik oleh pemerintah pusat dan daerah secara berkala (bulanan). Penyusunan SKPG bulanan paling sedikit memuat aspek ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan.

Sesuai hasil SKPG Rilis Juli, menunjukkan bahwa berdasarkan hasil komposit, terdapat 1 Provinsi (2,63%) pada kategori “rentan” yaitu provinsi Papua; sedangkan sebanyak 28 Provinsi (73,68%) dalam kategori aman, dan sebanyak 9 Provinsi (23,68%) dalam kategori waspada, yaitu D I Yogyakarta, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat, dan Papua Barat Daya.

Berdasarkan indeks ketersediaan terdapat 11 provinsi (28,95%) dalam kategori waspada dan 27 provinsi (71,05%) dalam kategori aman. Berdasarkan indeks keterjangkauan terdapat 5 provinsi (13,16%) pada kategori waspada dan 33 Provinsi (86,84%) dalam kategori aman. Sedangkan berdasarkan indeks pemanfaatan terdapat 6 Provinsi (15,79%) dalam kategori “rentan”, yaitu: NTT, Sulawesi Barat, Papua, Papua Selatan, Papua Barat dan Papua Barat Daya, terdapat 10 provinsi (26,32%) pada kondisi waspada, dan 22 provinsi (57,89%) dalam kondisi aman.

- b. FGD PoU series 1: Pengenalan Data Susunan dan Indikator Ketahanan Pangan
Beberapa poin penting hasil diskusi dan pengenalan data susenas dan indikator ketahanan pangan sebagai berikut:

1. Data Susenas dilaksanakan 2 kali setiap tahun yaitu pada bulan Maret dan September.
2. Hasil Susenas bulan Maret digunakan untuk mengestimasi sampai level Kabupaten/Kota, sedangkan untuk bulan September digunakan untuk mengestimasi Provinsi dan Nasional.
3. Data Susenas terdiri dari 2 yaitu data susenas Konsumsi dan Pengeluaran (KP) dan KOR yang berisi profil karakteristik rumah tangga antara lain, Pendidikan Sosial Ekonomi dan Kesehatan Rumah Tangga.
4. Pengambilan data susenas dilakukan sekali dengan merecall konsumsi pengeluaran rumah tangga selama seminggu dengan mempertimbangkan SDM, Anggaran dan waktu, sedangkan idealnya dilakukan 2 kali oleh pencacah dengan mengisi buku harian.
5. Pemanfaatan data susenas digunakan untuk analisis FSVA dan IKP, FIES NBM, Prognosa dan Skor PPH.
6. Beberapa faktor yang mempengaruhi PoU yaitu Harga, Kelompok kesejahteraan, Kemiskinan, Pendidikan dan Budaya Lokal.
7. BPS diminta sekeretariat SDGs melakukan proyeksi PoU dari tahun 2024 sampai tahun 2030 dengan memperhatikan kaidah statistik. BPS Kab/Kota sudah diberikan pembekalan oleh BPS pusat untuk membuat prediksi dan membuat target PoU hingga tahun 2045.
8. PoU sudah masuk dalam indikator RPJMN dan indikator SDGs 2.1.1* (indikator yang dihasilkan sudah berstandar global, meliputi metodologi pengumpulan data, analisis, meta data indicator, cara penghitungannya).

c. FGD PoU series 2: Perhitungan PoU dan *Adjustmen* Data Kalori. Beberapa poin penting hasil diskusi dan perhitungan PoU dan *Adjustmen* Data Kalori sebagai berikut:

1. Indikator kerawanan pangan terdiri dari angka rawan pangan, PoU, dan FIES. Batasan asupan kalori pada Angka Rawan Pangan yaitu 1400 Kkal/kapita/hari sedangkan PoU yaitu Minimum Dietary Energy Requirement. Sehingga hasil PoU pada setiap wilayah memiliki batasan asupan kalori yang berbeda dengan memperhitungkan struktur anggota rumah. FAO merekomendasikan untuk menggunakan PoU dan FIES sebagai indikator Goals 2 SDGs (end of hunger) karena variabel yang digunakan untuk analisis lebih bervariasi.

2. Perhitungan PoU menggunakan data susenas KOR (informasi kelompok penduduk umur dan jenis kelamin), Susenas Konsumsi dan pengeluaran (konsumsi perkapita baik dari bahan makanan yang dimasak di rumah maupun konsumsi makanan dan minuman jadi), serta data Riskesdas (tinggi badan, Crude Birth Rate, angka kelahiran kasar, yang digunakan untuk pendekatan persentase ibu hamil).
 3. Pada Tahun 2018 – 2023 grafik PoU berbanding lurus dengan pola kemiskinan. Dan pada Tahun 2022 terjadi kondisi ekstrim yang mengakibatkan kurva PoU tidak normal dikarenakan terjadi kenaikan harga komoditas minyak goreng sehingga konsumsi perkapita menurun.
 4. BPS melakukan kajian mengenai PoU dengan menggunakan data Susenas pada tahun 2019-2020 dan data Podes. Berdasarkan hasil kajian variable yang mempengaruhi angka PoU adalah angka kemiskinan, jumlah anggota Rumah Tangga, komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin, angka kehamilan, pasar permanen, BPNT, dan akses air bersih.
 5. Standar BPS dalam melakukan perhitungan PoU berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh FAO. Sehingga dengan mengetahui tahapan perhitungan ini, maka dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan kebijakan maupun sebagai baseline intervensi program.
 6. Adjustment Konsumsi Kalori merupakan penetapan standar baku untuk satuan konversi sehingga menghasilkan nilai kalori yang seragam dan tidak bias. Perhitungan Adjustment Kalori menggunakan software SPSS dan Stata dengan sample perhitungan menggunakan sampel rumah tangga yang sudah dipilih secara mandiri.
2. Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kewaspadaan Pangan dan Gizi
- Beberapa kegiatan pendukung, di antaranya:
- a) NFA mendukung sinergi dan kolaborasi stakeholder pangan dalam mengurangi susut dan sisa pangan di Indonesia
- Permasalahan tata kelola sampah makanan tengah menjadi isu global saat ini, Pemerintah Indonesia memberikan perhatian serius dengan menempatkan isu tersebut ke dalam RPJMN 2025 - 2029. Dalam acara yang sama Bappenas juga sekaligus meluncurkan peta jalan pengelolaan susut dan sisa pangan. “Badan Pangan Nasional siap bersinergi untuk mengelola susut dan sisa pangan, mengingat Indonesia berada pada peringkat ketiga penghasil sampah makanan terbesar di dunia, setelah Amerika Serikat dan Arab Saudi,” ungkap Deputy Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan.

- b) Dukong Transformasi Ekonomi Hijau, NFA Implementasikan Kebijakan Ekonomi Sirkular Melalui Gerakan Selamatkan Pangan.

Bapanas telah menginisiasi gerakan 'Selamatkan Pangan' dengan membuat platform dan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan penyedia makanan, food hub, serta penerima manfaat. Kemudian difasilitasi kendaraan logistik pangan untuk mendistribusikan makanan berlebih dari pendonor ke penerima.

- c) Penyusunan regulasi mengatasi permasalahan food loss and waste (FLW) di Indonesia. NFA sedang mempersiapkan Naskah Urgensi untuk penyusunan RPerpres Penyelamatan Susut dan Sisa Pangan. Bersama lintas K/L, dan pemangku kepentingan bersinergi untuk mempersiapkan regulasi ini. Pentingnya regulasi ini agar terbentuk tata kelola penyelamatan pangan yang dapat diimplementasikan semua pihak.
- d) Focus Upaya penurunan kerawanan pangan dan gizi NFA susun Road Map Gerakan Selamatkan Pangan
- e) NFA Bersama Stakeholder Dorong Percepatan Rancangan Perpres susut dan Sisa Pangan
- f) Bersama Multi-Fora APEC, NFA Aktif Kawal Dokumen Ministerial Declaration on Food Security APEC-PPFS 2024
- g) Pembekalan Pemilihan Putra Putri Pariwisata Nusantara 2024
- h) Kunjungi Gudang Bulog Cibitung, NFA Fokus Pemantauan Kualitas dan Kuantitas Bantuan Pangan Beras

3. Bantuan Pangan Masyarakat dalam rangka Kewaspadaan Pangan dan Gizi.

Beberapa kegiatan pendukung diantaranya:

- a) Dukong Peningkatan Gizi Anak Sekolah, NFA hadiri Launching Kampanye ENOUGH
Kampanye ENOUGH yang diluncurkan hari ini akan berlangsung selama 3 tahun dari 2024 sampai 2026, kegiatan ini ditujukan untuk memberikan masukan kebijakan dan solusi yang sistemik kepada pemerintah sebagai bentuk kolaborasi pentahelix. Launching Kampanye ENOUGH dihadiri unsur pemerintah, donor, swasta, LSM, NGO dan kader kesehatan serta masyarakat. Dalam rangkaian acara launching disampaikan hasil penelitian anak/National Child Lad Research (CLR) tentang Situasi Remaja terkait Gizi, Kesehatan dan Perkawinan Anak. LCR dilakukan oleh tim yang terdiri dari 99 anak (60 perempuan, 33 laki-laki) berusia 12-17 tahun dari 11 Provinsi dan 28 Kab/Kota. Penelitian dilakukan melalui penyebaran kuesioner selama bulan Maret-Mei 2024, dengan responden 6969 anak berusia rata2 15 tahun di 34 Provinsi.

b) Kunjungan Lapang Survey Calon Lokasi Launching Kegiatan GENIUS TA 2024 di Provinsi Sumatera Selatan

Hasil kunjungan lapang Survey Calon Lokasi Launching Kegiatan GENIUS TA 2024 pada tanggal 23 – 24 Juli 2024 di Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

1. Survey Calon Lokasi Launching Kegiatan GENIUS TA 2024 yang akan dipusatkan di Kab. Ogan Komering Ilir (OKI) dilaksanakan perwakilan Tim GENIUS Direktorat KPG, perwakilan Dinas Ketahanan Pangan Dan Peternakan Provinsi Sumsel dan perwakilan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. OKI.
2. Konsep Launching GENIUS di Kabupaten OKI dilaporkan sbb:
 - Launching Kegiatan GENIUS TA 2024 akan dilaksanakan secara serempak nasional (30 kab/kota pada 10 Provinsi) direncanakan Jumat, 23 Agustus 2024.
 - Agenda: launching pemberian kudapan di GOR, penyerahan bantuan pangan simbolis, kunjungan ke Bulog, kunjungan ke pabrik beras Raja, Belitang Panen Raya (BPR) di Kramasan.
 - Lokasi Launching akan dilaksanakan di GOR Biduk Kajang Kayuagung Kab. OKI, berlokasi di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kab. OKI dan Masjid Agung Solihin.
3. Rencana Peserta Launching
4. Pengarahan siswa SD sekitar dan 3 SD penerima manfaat GENIUS 2024 Kab. OKI dengan rincian : SDN1 Seriguna: 192 siswa, SDN 1 Talang Pangeran: 196 siswa, SDN 1 Kotabumi: 140 siswa orang tua siswa.
5. Agenda kunjungan Kepala Badan Pangan Nasional setelah launching: Peninjauan ke Gudang Bulog Jua Jua Kab. OKI, dengan kapasitas gudang 3500 ton dan stok terupdate pada tanggal 23 Juli 2024 adalah 1300 ton yang berasal dari mitra lokal.
6. Kunjungan Kepala Badan Pangan Nasional ke salah satu pabrik beras terbesar di Sumatera Selatan, PT. Belitang Panen Raya (BPR).

c) Identifikasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL) SD penerima manfaat GENIUS tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Selatan.

Hasil identifikasi CPCL SD penerima manfaat GENIUS tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 1-3 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Tim GENIUS berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan, diterima oleh Kabid Ketersediaan dan Kerawanan Pangan serta PJ Pelaksana GENIUS Prov. Sulsel.
2. Rakor pertama penetapan penerima manfaat GENIUS tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan tanggal 13 Juni 2024 dengan usulan lokasi masing-masing Kabupaten.

3. Hasil verifikasi ke lokasi penerima manfaat GENIUS TA 2024 di Kab. Maros Prov Sulsel yaitu: (1) UPTD SDN 215 Inpres Taipa (205 siswa) merupakan SD penerima manfaat GENIUS TA 2023 yang konsisten melanjutkan GENIUS dengan memberikan kudapan, susu dan buah setiap hari senin di sekolah dengan swadaya orangtua dan komite sekolah; (2) UPTD SDN 48 Bontokapetta (259 siswa); mayoritas pekerjaan orangtua petani, buruh, dagang; terdapat fasilitas cuci tangan dengan sabun di depan masing masing kelas dan terdapat kantin sekolah namun belum optimal untuk penyediaan pangan sehat; (3) UPTD SDN 18 Belang-Belang (249 siswa), mayoritas pekerjaan orangtua petani, Terdapat fasilitas cuci tangan dan sabun di depan masing-masing kelas, memiliki kantin sekolah sehat.

4. Kunjungan dilanjutkan ke lokasi calon penyedia kudapan untuk SD penerima manfaat Kab. Maros dan Kota Pare-Pare yang berlokasi di Kab. Maros yaitu CV. Pandan Wangi Lestari Catering. Calon penyedia kudapan sudah memenuhi persyaratan dalam petunjuk teknis. Hasil pengecekan ke lokasi penyedia kudapan sebagai berikut:

- * CV. Pandan Wangi Lestari Catering memiliki Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Jasaboga yang diterbitkan tanggal 18 Juli 2022 oleh Dinkes Kab. Maros dan Sertifikat Kursus Penjamah Makanan dan penyedia telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai penjamah makanan (*food handler*) pada 28 Desember 2018.

- * Memiliki SOP penanganan kudapan, dapur yang bersih, serta tempat penyimpanan bahan baku yang baik.

d) Rakor verifikasi penerima manfaat GENIUS serta identifikasi calon lokasi launching GENIUS di Provinsi Jawa Timur.

Hasil rakor verifikasi penerima manfaat GENIUS serta identifikasi calon lokasi launching GENIUS di Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

1. Rakor verifikasi penerima manfaat GENIUS dibuka dan dipimpin oleh Kabid ketahanan pangan dinas provinsi dan dihadiri oleh perwakilan dinas Kota Probolinggo, Kab. Blitar, Kab. Tulungagung, dan AIPGI Prov. Jawa Timur.

2. Hasil verifikasi penerima manfaat GENIUS TA 2024 berjumlah 1700 siswa dengan detail:

- Kota Probolinggo (589 siswa): SDN Triwung Kidul 2 (174), SDN Triwung Kidul 3 (166), dan SDN Sumber Wetan 1 (249).
- Kab. Blitar (525 siswa): SDN Tingal 02 (187), SDN Ngaringan 03 (208), dan SDN Semen 02 (130)
- Kab. Tulungagung (586 siswa): SDN 2 Pucungkidul (219), SDN 1Kates (170), dan SDN 1 Sendang (197)

3. SK penetapan penerima maksimal tanggal 29 Juli dan selanjutnya dilakukan persiapan kontrak penyedia pada minggu pertama bulan Agustus.
4. Calon lokasi Launching GENIUS TA 2024 di Kabupaten Tulungagung, dengan kondisi:
 - Jarak dari Kota Surabaya ke Kab. Tulungagung sekitar 2,5 jam. - Tersedia tempat penginapan yang representative
 - Opsi pelaksanaan kegiatan yakni pada (1) Gor Lembu Peteng atau (2) Pendopo Tulungagung
 - Dukungan dinas Provinsi berupa kegiatan GSP (masak bersama) dengan target 300 orang. Selain itu, dinas Kabupaten akan mendukung dengan kegiatan GPM yang telah bekerja sama dengan Bulog, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan, Dinas Industri (UMKM), dan inkes (cek Kesehatan gratis), serta bekerjasama dengan diskominfo untuk promosi melalui banner/reklame di beberapa titik serta promosi melalui radio.
 - Usulan Kunjungan Kabadan setelah menghadiri launching yakni Pabrik Gula, Gudang Bulog dan/atau pasar Ngemplak

3. Kegiatan Pemantapan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, dengan realisasi anggaran pada bulan Juli Tahun 2024 sebesar Rp. 3.457.354.154,- dengan kegiatan prioritas bidang sebagai berikut:

3. 1 Direktorat Penganekaragaman Konsumsi Pangan

Beberapa kegiatan prioritas, di antaranya:

1. Audiensi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg)

Audiensi dengan Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara guna membahas percepatan pengesahan regulasi tentang pangan dalam rangka akselerasi penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan sebagai salah satu upaya mendukung terwujudnya Indonesia mandiri pangan serta meningkatkan kualitas konsumsi dan keamanan pangan melalui SDM yang sehat aktif dan produktif

2. Tindak lanjut kerjasama NFA dan IFSR

Sebagai tindak lanjut atas Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) dengan Indonesia Food Security Review (IFSR) pada program Makan Bergizi Gratis, dilaksanakan Sosialisasi dan Edukasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) kepada Petugas Dapur Umum Pelayanan Makan Bergizi Gratis pada Kamis di Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi.

3. Optimalisasi sumber pangan lokal untuk kebermanfaatan bagi warganya dengan turut aktif mengembangkan Rumah Pangan B2SA di wilayah masing-masing. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

4. Gelaran Bimtek PPH

Fokus menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Analisis Konsumsi Pangan Berbasis Pola Pangan Harapan (PPH) bagi Aparat Analis Konsumsi Pangan di 514 kabupaten/kota yang menangani urusan pangan di seluruh daerah Indonesia di Jakarta, Jumat di Hotel Grand City Hall Medan, Sumatera Utara pada tanggal 12 Juli 2024.

PPH merupakan instrumen penting yang menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat dan Daerah dalam memotret kualitas dan komposisi konsumsi pangan masyarakat suatu daerah.

Skor PPH yang ideal tentunya akan terwujud apabila setiap daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota di Indonesiaa memiliki capaian konsumsi pangan yang berkualitas mengarah pada pola komposisi pangan yang B2SA. Pemerintah Provinsi dan Daerah penting melakukan peniaian konsumsi pangan berbasis analisis PPH.

5. Pengembangan UMKM pangan lokal.

Diversifikasi pangan lokal sangat penting untuk mendukung kemandirian pangan nasional, oleh karena itu dukungan penuh kepada UMKM pangan lokal harus dilakukan agar dapat meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas produknya. pada saat kunjungan ke UMKM di Medan, yaitu Donat Kentang Donita dan Syifa Hidroponik (11/07/2024). Dalam kunjungan ini, diberikan dukungan berupa alat produksi kepada kedua UMKM tersebut. Dukungan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi operasional UMKM.

6. Rumah Pangan B2SA

Rumah Pangan B2SA sebagai sarana sosialisasi, edukasi dan implementasi ke masyarakat untuk mengubah mindset ke arah yang lebih baik dengan menerapkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman sehari-hari dalam rangka meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat. Langkah konkret tersebut terlihat pada saat sosialisasi dan edukasi Pola Konsumsi Pangan B2SA di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor pada Rabu 17 Juli 2024. Untuk memenuhi kebutuhan sumber pangan, dapat memanfaatkan sumber daya pangan lokal yang mudah ditemui di lingkungan sekitar sehingga memenuhi unsur beragam, bergizi seimbang, dan aman atau B2SA. Selain itu, sumber pangan tersebut juga terjangkau bagi masyarakat dan mudah diolah menjadi makanan yang enak dan sehat.

7. *B2SA Goes to School (BGtS)*

Pemerintah Kabupaten Paser bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional menggelar kegiatan *B2SA Goes to School (BGtS)* dengan menghadirkan 1.000 pelajar tingkat SD dan SMP dalam rangkaian acara Gebyar B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman) di arena Promosi Putri Petung, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Rabu tanggal 24 Juli 2024). *B2SA Goes to School (BGtS)* menjadi momentum penting untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang sejak usia dini.

Melalui Program ini, pelajar yang merupakan generasi muda tidak hanya mendapatkan pengetahuan tentang pangan beragam dan bergizi seimbang, tetapi juga akan terinspirasi untuk menerapkan pola hidup sehat dalam mengonsumsi makanan sehari-hari.

Kegiatan tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, orang tua dan anaknya untuk mulai mengonsumsi aneka ragam pangan yang memiliki unsur B2SA untuk mewujudkan generasi emas.

8. Audiensi dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sorong pada Selasa 30 Juli 2024 di Jakarta

Upaya meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan di Kabupaten Sorong. Menemui tantangan di lapangan masih cukup besar, terutama dalam hal distribusi dan edukasi masyarakat. Selain itu, kami juga fokus pada peningkatan keamanan pangan agar masyarakat mendapatkan pangan selain beragam dan bergizi seimbang, juga aman. Untuk itu diperlukan dukungan baik dalam bentuk bantuan teknis maupun program-program Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) yang dapat membantu meningkatkan penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan di Kabupaten Sorong.

Identifikasi kebutuhan dan memberikan solusi yang tepat, baik dalam hal penganekaragaman konsumsi maupun keamanan pangan, serta kampanye edukasi tentang pentingnya penganekaragaman pangan.

3. 2 Direktorat Perumusan Standar dan Keamanan Mutu Pangan

Beberapa kegiatan prioritas, di antaranya:

1. **Sampling Kajian Cemarkan Mikotoksin pada Pangan Segar**

Kegiatan ini menghasilkan pengumpulan data mengenai tingkat cemarkan mikotoksin pada pangan segar, yang bertujuan untuk menjamin keamanan pangan segar dari kontaminasi mikotoksin. Dengan melakukan sampling, diharapkan dapat mengidentifikasi potensi risiko dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Pengambilan sampel dilakukan di 12 provinsi di Indonesia, yakni Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DIY, Bangka Belitung, DKI Jakarta, NTT, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Barat dan Maluku.

2. **Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pengawasan terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan Segar di Daerah.**

Kegiatan dilaksanakan secara hybrid pada tanggal 18 Juli 2024 di Jakarta. Pelaksanaan harmonisasi ini sebagai salah satu tahapan penyusunan peraturan setelah tahap brainstorming, pembahasan dengan pakar dan stakeholder, serta konsultasi publik. Tindak lanjut dari rapat ini adalah diadakannya pertemuan 9 Laporan Bulan Juli 2024 Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan lanjutan oleh tim kecil untuk legal drafting harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pedoman Pengawasan terhadap terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan Segar di Daerah.

3. **FGD Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Batas Maksimal Residu Pestisida pada Pangan Segar di Peredaran**

FGD dilaksanakan secara luring pada hari Jumat, 19 Juli 2024, di Avenzel Hotel and Convention Ciibubur, Bekasi dengan mengundang Prof. Dr. Apt. Sri Noegrohati yang merupakan pakar keamanan pangan dari UGM. Pertemuan dimaksudkan untuk membahas draft Perbadan yang telah disusun guna mendapatkan saran dan masukan untuk penyempurnaan. Penyusunan didasarkan pada kajian paparan (exposure assessment) terhadap 358 jenis pestisida menggunakan angka konsumsi pangan. Berdasarkan kajian tersebut telah disusun usulan BMR Pestisida untuk tiap kelompok/jenis bahan pangan segar.

Sesuai tata cara penyusunan regulasi, selanjutnya akan dilaksanakan konsultasi publik Rancangan Perbadan ini untuk menjaring masukan dari stakeholder yang lebih luas.

4. Sidang Komtek Hasil Penilaian Sistem Manajemen Pengawasan keamanan Pangan Segar

Pada tahun 2024 telah dilaksanakan Penilaian Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah di 12 OKKPD provinsi dan pada kesempatan lalu telah terbit dan diserahkan Sertifikat Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar pada 4 Provinsi. Pada 19 Juli 2024 dilakukan sidang komtek hasil penilaian Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar untuk 8 provinsi, yaitu: Riau, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, DKI Jakarta, NTT, Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara dan Kepulauan Riau. Hasil dari sidang ini menentukan hasil akhir dari Sertifikat Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar dari tiap provinsi. Selain itu, didiskusikan juga masukan rekomendasi perbaikan dan peningkatan dari sistem manajemen OKKPD. Sertifikat direncanakan untuk diserahkan bersamaan pada acara BAPANAS Award pada 28 Juli 2024.

5. Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Batas Cemaran Maksimal dalam Pangan Segar di Peredaran

Harmonisasi diselerenggarakan pada tanggal 17 Juli 2024, di Bekasi yang dihadiri Tim Pokja Harmonisasi Kemenkumham, perwakilan Kementerian/Lembaga terkait serta internal Badan Pangan Nasional.

Harmonisasi ini menyepakati substansi dan harmonisasi dinyatakan selesai. Substansi yang diatur memuat ruang lingkup ketentuan umum, persyaratan (untuk cemaran logam berat, mikroba dan mikotoksin), pengujian, pengawasan, kaji ulang, sanksi administratif, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Selanjutnya Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan bersama Biro OSH akan melakukan penyempurnaan draft sesuai hasil pertemuan bersama tim harmonisasi Kemenkumham.

6. Penyampaian Paraf dan Koreksi/Perbaikan pada Naskah RPP Perubahan atas PP 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan ke Menteri Sekretaris Negara

Untuk mendukung percepatan penyelesaian RPP ini, Bapanas telah bersurat kepada Menteri Sekretaris Negara di tanggal 25 Juli 2024 terkait Penyampaian Paraf dan Koreksi/Perbaikan pada Naskah RPP perubahan atas PP 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

Pada surat disampaikan bahwa tahap penyampaian paraf telah selesai dilaksanakan dan diharapkan penetapan Naskah RPP perubahan atas PP 86 Tahun 2019 dapat disampaikan untuk diproses kepada Bapak Presiden RI.

Penyelesaian RPP ini sangat penting sebagai salah satu tindak lanjut koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi kebijakan terkait keamanan pangan pasca dibentuknya Bapanas sesuai Perpres 66 tahun 2021.

7. Pelatihan Legislative Drafting

Kegiatan Pelatihan Legislative Drafting ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi ASN di Kedeputan Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam penyusunan standar dan peraturan perundang undangan. Pelatihan ini diikuti oleh 30 orang peserta dengan 16 peserta dari Kedeputan 3 dan sisanya perwakilan Kedeputan 1, 2, dan sekretariat utama. Melalui pelatihan diharapkan meningkatkan ini dapat kapasitas peserta pelatihan dalam menyusun regulasi sehingga dapat menghasilkan regulasi yang baik dan dapat diimplementasikan oleh stakeholder terkait.

8. Rapat Lanjutan Pemahasan Draft Standar Kayumanis

Rapat ini dilaksanakan untuk membahas beberapa hal yang masih belum dibahas pada rapat sebelumnya, dan guna menyelesaikan penyusunan masukan Indonesia terhadap usulan draft standar kayu manis pada forum EWG CCSCH. Dalam pertemuan ini disepakati bahwa perlu dimasukkan varietas kayumanis asli Indonesia yaitu Cinnamon burmanii. Selanjutnya masukan terhadap draft pertama ini akan dikirimkan melalui platform EWG. Selain itu, akan menindaklanjuti penguatan varietas burmani dalam perdagangan internasional dengan pengusulan HS code tersendiri untuk varietas kayu manis tersebut kepada pihak terkait.

9. Penyampaian Posisi Indonesia pada Sirkulasi Pertama Electronic Working Group (EWG) Pembahasan Draft Standard for Cinnamon

Badan Pangan Nasional sebagai Mirror Committee Codex Committee of Spices and Culinary Herbs (CCSCH) telah melaksanakan rapat pembahasan draft standar kayumanis. Rapat tersebut menghasilkan kertas posisi Indonesia untuk kemudian disampaikan pada sirkulasi pertama pada EWG pembahasan draft standar kayumanis. Seluruh stakeholder terkait menyepakati masukan Indonesia terhadap draft standar kayumanis yang dibahas. Posisi Indonesia pada sirkulasi pertama pembahasan draft standard for cinnamon dari rapat telah dikirimkan pada 26 Juli 2024 melalui platform EWG Codex.

10. Coaching Clinic Keamanan Pangan Segar pada Festival Pangan Nusantara

Dalam rangka memeriahkan kegiatan Festival Pangan Nusantara Tahun 2024, Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan melaksanakan Coaching Clinic Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) pada tanggal 28 Juli 2024 di Plaza Timur Gelora Bung Karno. Dalam pelaksanaan kegiatan ini disediakan layanan konsultasi standar keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan segar serta perizinan pangan segar lainnya bagi pelaku usaha. Pada kegiatan ini juga dilakukan edukasi keamanan pangan

segar ke masyarakat, antara lain terkait prinsip dasar penyimpanan pangan, cara menyimpan pangan segar yang baik agar tetap segar, manfaat membaca label kemasan pangan dan lima kunci keamanan pangan.

11. Penyerahan Sertifikat Sistem Manajemen Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Kegiatan BAPANAS Awards

OKKPD Provinsi yang mendapatkan sertifikat tersebut yaitu: Riau, Sulawesi Utara, Kalimantan Timur, DKI. Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Kalimantan Utara dan Kepulauan Riau. Hasil penilaian 8 OKKPD Provinsi adalah 4 OKKPD sangat baik yaitu Riau, Sulawesi Utara, Kalimantan Timu dan Jakarta serta 4 OKKPD lainnya baik yaitu Kep. Riau, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, dan Kalimantan Utara.

12. Rapat Tindak Lanjut Inisiasi Kolaborasi Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Daerah

Pada kesempatan ini dilaksanakan tindak lanjut Inisiasi Kolaborasi Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Daerah antara Bapanas, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan dan Fakultas Pertanian Unsri sebagai bentuk menajalankan amanat penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren bidang pangan sub urusan keamanan pangan segar antara Badan Pangan Nasional dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan pada 29 Juli 2024 di Cibubur. Di kesempatan ini telah disusun dan didiskusikan draft Perjanjian Kerjasama (PKS) Sinergitas Penguatan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Di Provinsi Sumatera Selatan antara Bapanas dalam hal ini diwakilkan oleh Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan, dan Fakultas Pertanian Univesitas Sriwijawa.

13. Harmonisasi Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pengawasan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan di Daerah

Rapat dimaksudkan untuk melakukan penyempurnaan drafting oleh tim kecil berdasarkan masukan dan kesepakatan pada rapat harmonisasi sebelumnya pada tanggal 18 Juli 2024. Pada pertemuan sebelumnya telah disepakati bahwa substansi pengawasan Keamanan Pangan Daerah diintegrasikan dalam Perbadan No. 2 Tahun 2024, dalam bentuk amandemen Perbadan 2/2024 dengan menambahkan 1 bab khusus yang mengatur kewenangan daerah dan garis koordinasinya. Adapun tindak lanjut pada hasil rapat ini akan dilakukan penyempurnaan drafting oleh Biro Organisasi SDM dan Hukum (OSH), Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, serta Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Panga serta penyampaian permohonan izin presiden melalui Sekretariat Kabinet (Setkab).

3.3 Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan Mutu Pangan

Beberapa kegiatan prioritas, di antaranya:

1. Penerbitan Sertifikat SPPB PSAT dan Registerasi Izin Edar

Selama bulan Juli 2024, Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan telah menerbitkan 241 nomor pendaftaran/izin edar PSAT PL serta menerbitkan 11 Sertifikat SPPB PSAT. Sertifikat SPPB PSAT merupakan jaminan yang diberikan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan bahwa suatu produk pangan segar ditangani sesuai dengan standar sanitasi hygiene sehingga menghasilkan produk yang aman dan bermutu.

2. Pengawasan dan Monitoring Keamanan Pangan Segar di Pasar Rakyat

Lokasi monitoring yang dilaksanakan berupa: monitoring harga pangan pokok dan pengawasan keamanan pangan segar melalui pengambilan contoh dan pengujian residu pestisida dan formalin dengan rapid test kit di beberapa pasar, seperti Pasar Cisalak, Pasar Tomang, Pasar Serpong, Pasar Surya Kencana, Pasar Modern Cikopo, Pasar Rau, Pasar Gudang Tigaraksa, Pasar Baru. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sampel pangan segar, baik yang diuji residu pestisida maupun formalin menunjukkan hasil yang negatif, sehingga aman untuk dikonsumsi.

3. FGD Perumusan Indikator Keamanan Pangan

Rapat bertujuan untuk mengidentifikasi indikator keamanan pangan dan referensi serta hasil kajian yang dapat dijadikan bahan dalam menyusun Indeks Keamanan Pangan Nasional dengan poin sebagai berikut :

- a) Bappenas mendukung penyusunan Indeks Keamanan Pangan dan mengharapkan dapat segera diselesaikan sehingga dapat diakomodir dalam RPJMN 2025-2029 yang saat ini sedang berproses.
- b) Terdapat beberapa referensi indikator untuk mengukur Indeks Keamanan Pangan, sebagai berikut: Indeks Keamanan Pangan negara India (State Food Safety Index), Africa Food Safety Index (Africa Food Safety Index), Global Food Security Index, dan kajian SEAFast IPB.
- c) Untuk mendukung penilaian indikator dalam pengukuran indeks keamanan pangan, perlu dilakukan identifikasi kebutuhan data dukung dengan memperhatikan data-data terkait keamanan pangan yang tersedia di masing-masing K/L
- d) Tindak lanjut: Membentuk tim penyusunan indeks keamanan pangan, melibatkan K/L terkait keamanan pangan dan Kemendagri serta pakar; Menyiapkan konsep dasar indeks keamanan pangan sebagai bahan awal pembahasan tim penyusun dan ditargetkan penyusunan indeks ini dapat diselesaikan dan disosialisasikan pada Desember 2024

4. Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring Pasar Pas Aman di Pasar Sei Sikambing Kota Medan, Sumatera Utara

Hasil pengawasan sebagai berikut:

- a) Pengawasan dilaksanakan bersama-sama dengan sekretaris Dinas Ketapang, Hortikultura, tanaman pangan Prov. Sumut; Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kota Medan; Direktur Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan; Perwakilan Disperindag; perwakilan Dinas Kesehatan; Perwakilan BPOM dan Pimpinan; wakil pimpinan wilayah Bulog Kota Medan; pada hari Jumat 12 Juli 2024;
- b) Uji keamanan pangan dilakukan pada komoditas daging ayam, ikan kembung, buah jambu, sawi putih, cabai merah dan bawang merah. Hasil pengujian cepat residu pestisida dan formalin pada semua sampel menunjukkan hasil negatif; 16 Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Juli 2024;
- c) Hasil pemantauan kegiatan Pasar Pangan Segar Aman di Pasar Sei Sikambing menunjukkan bahwa kondisi pasar belum sepenuhnya tertata dengan baik berdasarkan zonasi namun kondisi higiene sanitasi cukup baik.

Dapat dilaporkan bahwa Tim ICS tetap konsisten melaksanakan SOP. Kolaborasi Tim Teknis cukup baik, dibuktikan dengan kontribusi dinas terkait dalam perbaikan infrastruktur pasar berupa toilet dan saluran pembuangan limbah.

Sebagai informasi lebih lanjut ditemukan beras dalam kemasan yang belum memiliki izin edar;

- d) Selain melaksanakan pengawasan keamanan dan mutu pangan, juga dilakukan pemantauan pasokan dan harga pangan. Pemantauan harga rata-rata pangan pokok dan strategis di Kota Medan adalah sebagai berikut: Beras Premium Rp. 15.000/Kg; Bawang Merah Rp. 28.000/Kg; Bawang Putih Rp.38.000/Kg; Cabai Merah Keriting Rp. 35.000/kg; Cabai Rawit Merah Rp. 40.000/Kg; Daging Sapi Lokal Rp. 130.000/Kg; Daging Ayam Rp. 30.000/Kg; Telur Ayam Rp.23.000/Kg; Gula Pasir Rp. 17.500/Kg; Ikan Kembung Rp. 35.000/Kg; Ikan tongkol Rp. 35.000/Kg; Ikan Bandeng Rp. 35.000/Kg; Garam konsumsi 10.000/Kg; Terigu Rp. 14.000/Kg; Beras SPHP Rp 62.500/5 Kg;
- e) Rencana tindak lanjut: akan dilakukan sosialisasi tentang izin edar dan koordinasi dengan petugas pasar terkait penataan letak kios agar disesuaikan berdasarkan zonasi.

5. Koordinasi dan Kunjungan Lapang/ Visitasi dalam rangka Percepatan Pemenuhan Protokol Ekspor Durian ke RRT di provinsi Sulawesi Tengah

Visitasi bertujuan untuk mengidentifikasi kesiapan kebun dan packing house (PH) untuk persiapan audit GACC yang akan dilaksanakan pada akhir Agustus hingga September untuk ekspor ke RRT. Berdasarkan hasil visitasi ke 10 PH, dapat dilaporkan beberapa poin, yaitu:

- a) Dari 10 PH, 7 PH merupakan lokasi yang disiapkan untuk audit GACC dan 3 PH merupakan lokasi baru yang berkomitmen untuk ikut audit GACC tahap pertama;
- b) Dari 10 PH, 7 PH memiliki kondisi infrastruktur baik, dan 3 PH masih memerlukan perbaikan infrastruktur sedang;
- c) Sebagian besar PH telah memiliki mitra petani pemasok baik dalam bentuk pengepul maupun kelompok tani, namun belum semuanya memiliki mitra petani teregistrasi atau sudah memiliki mitra petani registrasi dengan luasan yang relatif kecil;
- d) Sebagian besar PH perlu melakukan perbaikan layout agar tidak terjadi kontaminasi silang antara durian segar dengan durian kupas;
- e) PH perlu melakukan pembersihan durian segar untuk mencegah potensi kontaminasi dari OPT yang ada pada durian segar ke durian kupas;
- f) Beberapa PH masih terdapat celah-celah terbuka yang berpotensi masuknya hama dan perbaikan pada ruang ABF;

6. Rakornis Percepatan Ekspor Durian ke RRT

a) Rakornis Percepatan Pemenuhan Protokol Ekspor Durian ke RRT

Beberapa hal yang dibahas pada pertemuan ini adalah: Kemenkomarves menyampaikan timeline target untuk mencapai persetujuan protokol ekspor durian ke RRT. Dalam waktu dekat, akan dilaksanakan studi banding ke kebun dan PH di Thailand. Bapanas, Kementan, dan Barantin menyampaikan progres registrasi rumah kemas, registrasi kebun, dan Instalasi Karantina Tumbuhan (IKT) yang telah berjalan; 19 Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Juli 2024 Dinas TPH menyampaikan potensi dan keragaman durian lokal di Provinsi Sulawesi Tengah.

b) Rakor Percepatan Registerasi Rumah Kemas

Beberapa rumusan dalam Rakor Percepatan Registerasi Rumah Kemas adalah sebagai berikut:

1. OKKPP dan OKKPD telah menyiapkan 7 Packing House (PH) di Sulteng yang siap untuk melakukan ekspor durian beku ke RRT. Progres registrasi saat ini adalah: 1 PH sudah terbit registrasi rumah kemas, 3 PH menunggu proses penerbitan dalam minggu ini, 1 PH berproses melengkapi persyaratan, dan 2 PH berproses SPPB PSAT. Dalam minggu depan ditargetkan sudah ada 4 PH di Sulteng yang registrasi rumah kemas.
2. Dalam mendukung ekspor buah durian beku, PH di Sulteng didukung oleh luas kebun teregistrasi dengan kisaran 20 – 80 ha dan fasilitas Air Blast Freezer (ABF) dengan kapasitas pembekuan berkisar 2,5 – 14 ton/hari.
3. Berdasarkan fasilitas yang dimiliki, kapasitas produksi durian beku 7 PH yang ada di Sulteng dalam satu musim panen (4 bulan) adalah sekitar 6.900 ton durian beku (setara dengan 255 kontainer, masing-masing 27 ton atau setara dengan 20.700 ton buah durian segar). Kapasitas produksi ini dapat ditingkatkan sampai 13.800 ton durian beku dengan menambah waktu kerja menjadi 2 shift produksi.
4. Dengan kapasitas ABF tersebut, idealnya masing-masing PH harus memiliki luas kebun teregistrasi sebesar 125 – 500 ha, tergantung kapasitas ABF.
7. Pendampingan Kesiapan Ekspor Durian ke RRT serta Pengawasan Keamanan Pangan di Provinsi Bali.
8. Sidang Komisi Teknis OKKP Pusat

Telah dilaksanakan Rapat Komisi Teknis yang dilaksanakan secara hybrid pada Senin, 1 Juli 2024 di Hotel Aston Priority TB Simatupang dengan hasil sebagai berikut:

 1. Rapat Komtek (Komisi Teknis) dibuka oleh Direktur Pengawasan Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan dan dihadiri oleh Tim Komtek (Komisi Teknis), auditor terkait, dan fungsional lingkup Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Badan Pangan Nasional.
 2. Rapat ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi Penerbitan Sertifikat Penerapan Sanitasi Higiene Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB PSAT), sehingga proses audit dalam penerbitan SPPB-PSAT dapat lebih obyektif, tidak memihak dan dapat dipertanggungjawabkan.
 3. Pelaku usaha yang diajukan pada Rapat Komtek ini sejumlah 6 (enam) perusahaan yang merupakan importir buah, jamur, dan beras.
9. Monitoring Pasar “PASAMAN” dan Pengawasan Keamanan Pangan di Pasar Modern Batununggal Indah, Kota Bandung

1. Monitoring Pasar Pangan Segar Aman serta Pengawasan Keamanan Pangan, telah dilaksanakan di Pasar Modern Batununggal Indah, Kota Bandung sebagai berikut:

- a) Monitoring dan evaluasi harga pangan dan pengawasan keamanan pangan dilaksanakan oleh Tim Gabungan yang terdiri atas Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional, Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Dinas Ketahanan pangan dan peternakan provinsi Jawa Barat, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bandung, Pengelola Pasar Modern Batununggal indah kota Bandung serta Petugas Internal Control Sistem (ICS) Pasar Pangan Aman Pasar Batununggal Indah Kota Bandung ;
- b) Rangkaian kegiatan ini mencakup: monitoring harga pangan pokok dan pengawasan keamanan pangan segar melalui pengambilan contoh dan pengujian residu pestisida dan formalin menggunakan rapid test kit;
- c) Hasil pemantauan harga rata-rata pangan pokok di Pasar Modern Batununggal Kota Bandung relatif stabil hanya komoditas cabe merah keriting dan cabe rawit merah yg relatif lebih tinggi dari harga rata-rata nasional maupun Provinsi Jabar. Kondisi rata rata harga pangan adalah sebagai berikut: (1) Beras medium: Rp. 13.000/Kg; (2) Beras premium: Rp. 15.000/Kg; (3) Daging ayam karkas Rp. 38.000/kg; Daging sapi Rp 140.000/kg; (5) Bawang merah Rp. 32.000/kg; (6) Bawang putih Rp 45.000/kg; (7) Cabai merah keriting Rp 60.000/kg; (8) Cabai rawit merah Rp 90.000/kg; (9) Telur ayam Rp 29.000/kg; (10) Gula konsumsi Rp 17.000/kg;
- d) Pengambilan contoh pangan segar meliputi: (1) Komoditas cabe merah, bawang merah, tomat, untuk diuji residu pestisida; dan (2) Komoditas daging ayam dan ikan kembung untuk uji formalin.
- e) Hasil uji cepat menunjukkan bahwa sampel pangan segar, baik yang diuji residu pestisida maupun formalin menunjukkan hasil yang negatif, sehingga aman untuk dikonsumsi.

10. Koordinasi Perizinan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

Telah dilaksanakan kunjungan dalam rangka koordinasi perizinan pangan segar yang dilaksanakan pada 15-17 Juli 2024 di Provinsi Kalimantan Timur dengan hasil sebagai berikut:

1. Kegiatan koordinasi bertujuan untuk meningkatkan pelayanan perizinan penerbitan PB UMKU oleh OKKPD baik Provinsi maupun Kab/Kota di Wilayah Prov Kalimantan Timur;
2. Kunjungan ini dirangkai ke dalam 2 kegiatan yaitu:

- Pertemuan koordinasi yang dihadiri Perwakilan Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kab. Kutai Barat, Kab. Berau dan Kab. Paser.
- Pengawasan perizinan dan pelabelan di retail moderen Era Fresh Supermarket Kota Samarinda serta Pengawasan pre-market di Penggilingan Padi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) “Sumber Purnama” di Kab. Kutai Kartanegara dengan tim pengawas terdiri dari OKKPD Provinsi dan Kota Samarinda, Kab. Kutai Barat, Kab. Berau, Kab. Paser dan Kab. Kutai Kartanegara.

4. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional

Kegiatan dilaksanakan oleh Sekretariat Utama pada periode bulan Juli Tahun 2024 telah ter-realisasi anggaran sebesar Rp. 9.561.315.361,- dengan prioritas kegiatan fisik yang dilakukan sebagai berikut:

- a. **Biro Perencanaan, Kerjasama dan Hubungan Masyarakat**, melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

1. **Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi** selama bulan Juli Tahun 2024 melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembahasan *Multilateral Meeting* DAK Sub Bidang Pangan Tahun 2025 Berdasarkan hasil Rapat Pimpinan lingkup Bappenas dan hasil Panitia Kerja Pendahuluan Kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) bersama DPR-RI bahwa terdapat penambahan tematik DAK 2025, yaitu Kawasan Produksi Pangan Nasional (KPPN). DAK Tematik KPPN terdiri dari 2 sub bidang, yaitu sub bidang pertanian yang diampu oleh Kementerian Pertanian, dan sub bidang pangan yang diampu oleh Badan Pangan Nasional. Berdasarkan hasil multilateral meeting yang telah dilaksanakan tanggal 2-5 Juli 2024, telah disepakati menu, rincian menu, dan lokasi prioritas DAK Tematik KPPN. Usulan menu Badan Pangan Nasional yang telah masuk pada DAK Tematik KPPN, yaitu:

- a. DAK Fisik :

- Rehabilitasi Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dan sarana pendukungnya
- Penguatan Laboratorium Keamanan Pangan dan sarana pendukungnya

- b. DAK Non Fisik

- Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat
- Pengembangan Desa B2SA

2. Sosialisasi DAK Tematik KPPN

Dalam rangka persiapan pelaksanaan DAK, telah dilaksanakan Sosialisasi DAK Tematik KPPN oleh Bappenas dengan melibatkan Kementan, KemenPUPR, Kemenhub dan Badan Pangan Nasional dengan mengundang Prov/Kab/Kota yang menjadi lokasi prioritas pada tanggal 22 Juli 2024. Sebagai tindak lanjut telah dilaksanakan sosialisasi oleh Badan Pangan Nasional pada tanggal 24 Juli 2024 agar daerah yang menjadi lokasi prioritas dapat mempersiapkan usulan dan dokumen pendukung kelengkapan usulan. Pertemuan bertujuan untuk mensosialisasikan arah kebijakan, lokasi prioritas, bidang dan menu DAK serta mendorong kesiapan daerah dalam proses pengusulan DAK Tematik KPPN.

3. Pemutakhiran Rencana Kerja Tahun 2024

Dalam rangka mendukung akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, telah dilaksanakan pemutakhiran rencana kerja tahun 2024.

Pemutakhiran dilaksanakan dalam rangka penyesuaian pagu anggaran Badan Pangan Nasional menjadi sebesar Rp15.877.809.602.000,- yang terdiri dari program Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas sebesar Rp 15.757.739.384.000,- dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp120.070.218.000,-.

Perubahan pagu ini secara garis besar disebabkan disetujuinya Anggaran Belanja Tambahan untuk Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Bantuan Pangan, sehingga diperlukan pemutakhiran terhadap rencana kerja tahun 2024.

4. Revisi DIPA 9 dan 10

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan secara lebih efektif tanpa mengubah sasaran dan peruntukannya pada tahun 2024, maka dilaksanakan revisi DIPA 9 dan 10. Fokus utama revisi DIPA 9 adalah revisi rencana penarikan dana pada halaman III DIPA dan revisi kegiatan 1) belanja pegawai; 2) perjalanan dalam rangka koordinasi, monev, pembinaan; 3) sosialisasi, promosi panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan; 4) gerakan/kampanye/pameran panganekaragaman pangan berbasis B2SA; 5) pertemuan koordinasi; 6) evaluasi B2SA dan genius; 7) evaluasi bantuan pangan; serta 8) evaluasi intervensi pengendalian kerawanan pangan. Fokus utama revisi DIPA 10 dalam rangka Festival Pangan Nusantara Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2024.

5. Evaluasi Internal Implementasi SAKIP Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan di Bogor pada Tanggal 12-15 Agustus 2024.

2. Kegiatan Kerjasama Bidang Pangan, melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengikuti Virtual Meeting on the Principles to Prevent Food Loss and Waste (FLW) APEC PPFS tahap ke-4. 2.
- b. Mengikuti Virtual Meeting Pembahasan Draft Dokumen Ministerial Meeting on *Food Security* (MMFS) pada APEC-PPFS ke-4.
- c. Mengikuti Virtual Meeting on the Principles to Prevent Food Loss and Waste (FLW) APEC PPFS tahap ke-5.
- d. Mengikuti Virtual Meeting Pembahasan Draft Dokumen Ministerial Meeting on *Food Security* (MMFS) pada APEC-PPFS ke-5.
- e. Mengikuti Virtual Meeting on the Principles to *Prevent Food Loss and Waste* (FLW) APEC PPFS tahap ke-6.
- f. Mengikuti Virtual Meeting Pembahasan Draft Dokumen Ministerial Meeting on *Food Security* (MMFS) pada APEC-PPFS ke-6.
- g. Melaksanakan fasilitasi penambahan lingkup kerja sama Badan Pangan Nasional dan PT. Trans Digital Media (Detik.com) 8. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antara Badan Pangan Nasional dan Universitas Sriwijaya.
- h. Mengikuti proses dan menyampaikan bahan terkait persiapan pemberian penghargaan Agricola Medal dari FAO kepada Presiden RI.
- i. Mengikuti pelatihan Legal Drafting yang dilaksanakan oleh Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan bekerjasama dengan Indrayana Centre for Government, Constitution and Society (INTEGRITY).
- j. Mempersiapkan keynote speech Kepala Badan Pangan untuk kegiatan Green Economy Expo: Advancing Technology, Innovation AND Circularity.
- k. Meeting dengan World Food Programme (WFP) terkait tindak lanjut kerja sama.
- l. Melaksanakan fasilitasi dokumen PDLN dalam rangka Menghadiri Undangan Crystal Harvest Thailand - Ekspor Durian di Thailand (PDLN Juli 2024)
- m. Melaksanakan fasilitasi dokumen PDLN dalam rangka mengikuti Rangkaian 9th *APEC Food Security Ministerial Meeting (FSMM9) and Related Meetings* (APEC PPFS) di Peru.

3. Pemberian Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik dengan kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu:

- a. Penyusunan dan penerbitan publikasi cetak melalui majalah bulanan Media NFA Volume 3 Nomor 7, Juli 2024 dengan isu utama terkait Peringatan HUT Badan Pangan Nasional ke-3. Media NFA disebarluaskan di lingkup internal dan juga *stake holder* terkait.

b. Talkshow/ wawancara Kepala NFA di media TV/ Radio pada bulan Juli sebagai berikut :

1. Tanggal 5 Juli 2024 di RRI Pro 3 dengan Tema: **Penyusunan Regulasi Mengatasi Food Loss and Waste di Indonesia**
2. Tanggal 11 Juli 2024 di TV CNBC Indonesia dengan Tema : **RI 'Juara' Buang Makanan Saat Angka Stunting Masih Tinggi, Solusinya?**
3. Tanggal 20 Juli 2024 di Kominfo TV dengan Tema: **Stabilitas Pangan, Bentuk Ketahanan dan Kedaulatan Pangan Nasional**
4. Tanggal 26 Juli 2024 di Investor Daily TV dengan Tema : **INVESTOR DAILY TALK : Kolaborasi Kunci Wujudkan Ketahanan Pangan Berkelanjutan**

c. Pada bulan Juli 2024, NFA telah menerbitkan 56 siaran pers resmi dengan rincian sebagai berikut : 27 isu terkait ketersediaan dan stabilitas pangan, 5 isu terkait kerawanan pangan dan gizi, 16 isu terkait panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan dan 8 isu lainnya.

d. Pelayanan informasi publik yang diberikan kepada pemohon informasi publik dan terselesaikan sesuai batas waktu yang dipersyaratkan.

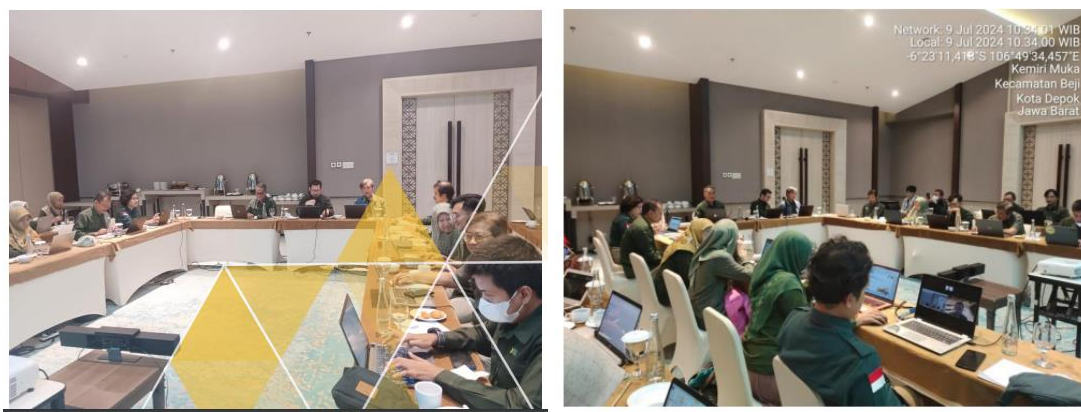
4.1 Kegiatan Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama dan Humas pada bulan Juli Tahun 2024

1. Sosialisasi Tindak Lanjut Pra Evaluasi Sakip Badan Pangan Nasional 2023-2024

Dalam rangka sosialisasi hasil Pra Evaluasi SAKIP Badan Pangan Nasional tahun 2023-2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2024 oleh KemenPAN-RB, perlu diadakan pertemuan untuk menindaklanjuti Hasil Pra Evaluasi SAKIP Badan Pangan Nasional Tahun 2023-2024. Evaluasi AKIP merupakan bagian dari siklus manajemen kinerja instansi pemerintah/unit kerja. Diharapkan para evaluator dapat memiliki acuan yang sama dalam melaksanakan evaluasi serta dapat mengembangkan secara terus menerus metode dan teknik evaluasi AKIP yang lebih optimal dan lebih efisien. Keberhasilan pelaksanaan evaluasi AKIP diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari implementasi SAKIP untuk meningkatnya kinerja instansi pemerintah/unit kerja serta meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah/unit kerja terhadap kinerjanya. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Pertemuan dilaksanakan di Hotel Santika Depok, pada Tanggal 9 Juli 2024, dalam rangka sosialisasi hasil Pra Evaluasi SAKIP Badan Pangan Nasional tahun 2023-2024 oleh KemenPAN-RB kepada seluruh Unit kerja Eselon II Lingkup Badan Pangan Nasional.

Peserta pertemuan adalah seluruh Perwakilan Unit Kerja Eselon II dan Kasubbag Tata Usaha Lingkup Badan Pangan Nasional, dan Tim Pengelola Kinerja Badan Pangan Nasional yang berasal dari UKE I dan UKE II berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Nomor : 912/HK.02.05/A/04/2024 Tanggal 19 April 2024. Anggaran penyelenggaraan pertemuan ini bersumber dari DIPA APBN Badan Pangan Nasional TA. 2024.



Dok. Kegiatan Sosialisasi Tindak Lanjut Pra Evaluasi Sakip Badan Pangan Nasional 2023-2024

2. Pertemuan Penyusunan Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja Badan Pangan Nasional 2024



Menindaklanjuti hasil Pra Evaluasi SAKIP Badan Pangan Nasional tahun 2023-2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2024 oleh KemenPAN-RB, perlu diadakan pertemuan untuk menindaklanjuti saran dan masukan terhadap Implementasi

SAKIP. Salah satu rekomendasi kemenPANRB adalah menyusun dokumen pohon kinerja untuk setiap unit kerja eselon II pada Instansi.

Pohon kinerja adalah alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang diperlukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan. Menyusun pohon kinerja sebenarnya seperti mengurai rute atau jalur kinerja yang secara logis dianggap paling terkait dan dibutuhkan dalam pencapaian outcome yang diinginkan.

Melalui pohon kinerja, instansi pemerintah diharapkan dapat mengenali rute logika yang dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi baru dalam mencapai kinerja.

Pertemuan dilaksanakan di Hotel Santika Depok, pada Tanggal 10 Juli 2024, dalam rangka pembahasan untuk menyusun pohon kinerja pada seluruh unit kerja eselon I dan eselon II Lingkup Badan Pangan Nasional sesuai hasil pra Evaluasi kemenPAN-RB terhadap Implementasi SAKIP Badan Pangan Nasional 2024.

Sasaran yang hendak dicapai dalam pertemuan ini adalah tersusunnya pohon kinerja dan cascading pada seluruh unit kerja eselon I dan eselon II Lingkup Badan Pangan Nasional sesuai hasil pra Evaluasi kemenPAN-RB terhadap Implementasi SAKIP Badan Pangan Nasional. Pemateri pada pertemuan ini adalah :

- Koordinator Tim Perencanaan Badan Badan Pangan Nasional.
- Koordinator Tim Perencanaan Kementerian Pertanian

Pertemuan dibuka oleh Kepala Biro perencanaan, Kerjasama dan Humas Badan Pangan Nasional dengan arahannya terkait dengan hasil Pra Evaluasi SAKIP Badan Pangan Nasional tahun 2023-2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2024 oleh KemenPAN-RB yang perlu dicermati untuk melengkapi dan menyempurnakan dokumen sesuai arahan Tim Evaluator Kemenpan RB. Salah satu dokumen yang harus disiapkan adalah Pohon Kinerja dan Cascading Kinerja.

Pemaparan Penyusunan Penjenjangan Kinerja (Cascading) Tahun 2023-2024 Kementerian Pertanian:

- Setelah memahami tentang pohon kinerja dan model logis, selanjutnya diharapkan lebih memiliki pemahaman dasar tentang tahapan penjenjangan kinerja. Hal ini karena penyusunan pohon kinerja akan menjadi dasar dalam penjenjangan kinerja instansi pemerintah.
- Untuk menyusun penjenjangan kinerja, terdapat serangkaian tahapan yang perlu dilakukan oleh instansi pemerintah. Karena ini merupakan tahapan, maka seharusnya instansi pemerintah tidak melewati satu tahapan dan 'lompat' ke tahapan lainnya. Secara umum, terdapat 5 tahapan yang perlu dilalui.

Tahap I sampai dengan Tahap IV adalah tahap penyusunan pohon kinerja. Tahap V adalah tahap untuk menerjemahkan pohon kinerja dalam komponen perencanaan dan struktur organisasi.

4.2. Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum

Hasil monitoring kegiatan prioritas lingkup Badan Pangan Nasional selama bulan Juli Tahun 2024 sesuai dengan capaian realisasi keuangan sebagaimana tabel 3, kegiatan fisik yang mendukung pencapaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum pada bulan Juli telah melaksanakan kegiatan antara lain:

1. Pada bulan Juli dalam pelaksanaan KRO/RO EBA 956 Layanan BMN telah merealisasikan Rp. 49.820.350,- atau sebesar 7,41%.
2. Pada bulan Juli dalam pelaksanaan KRO/RO EBA 959 Layanan Protokoler telah merealisasikan Rp. 126.637.820,- atau sebesar 13,75%.
3. Pada bulan Juli dalam pelaksanaan KRO/RO EBA 962 Layanan Umum telah merealisasikan Rp. 1.081.841.073,- atau sebesar 10,10%.
4. Pada bulan Juli dalam pelaksanaan KRO/RO EBA 994 Layanan Perkantoran merealisasikan komponen pembayaran Gaji dan Tunjangan bulan Juli sebesar Rp. 3.796.022.093,- atau sebesar 7,81%, Komponen Operasional dan Pemeliharaan Kantor sebesar Rp. 1.814.308.156,- atau sebesar 11,88%. Sedangkan untuk KRO EBB 951 Komponen Layanan Sarana Internal dan KRO/RO EBD 955 Komponen Layanan Manajemen Keuangan melaksanakan beberapa kegiatan, berupa:
 - a. Rapat Koordinasi Percepatan Anggaran Badan Pangan Nasional TA 2024
 - b. Rapat Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I TA 2024 Badan Pangan Nasional
 - c. Rapat Rekonsiliasi Pertanggungjawaban APBN
 - d. Kegiatan Hari Jadi ke 3 Badan Pangan Nasional
5. Pada bulan Juli KRO/RO EBB 962 Layanan Sarana dan Prasarana Internal Komponen Layanan Sarana Internal telah merealisasikan Rp. 30.500.000,- atau sebesar 4,90%.

Kegiatan Kepala Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum Bulan Juli 2024

Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kepala Biro Keuangan, Pengadaan dan Umum pada bulan Juli 2024, diantaranya sebagai berikut:

1. Rapat Koordinasi Percepatan Anggaran Badan Pangan Nasional TA 2024

Dalam rangka Koordinasi Percepatan Anggaran Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2024.

Kegiatan Rakor ini diadakan pada tanggal 2 Juli 2024. Dilaksanakan melalui daring Zoom Meeting dan dihadiri oleh Kepala Biro KPU, Inspektur Badan Pangan Nasional, PPK lingkup satker pusat Badan Pangan Nasional, PPSPM, Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan, seluruh Staf Pengelola Keuangan satker pusat dan satker dekonsentrasi Badan Pangan Nasional.

2. Rapat Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I TA 2024 Badan Pangan Nasional

Dalam rangka kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2024 Badan Pangan Nasional, kegiatan diadakan pada tanggal 17 - 19 Juli 2024. Bertempat di Hotel Grand Mercure Setiabudi Bandung, kegiatan dihadiri oleh seluruh pengelola keuangan lingkup satker Pusat dan satker Dekonsentrasi Badan Pangan Nasional.

3. Rapat Rekonsiliasi Pertanggungjawaban APBN

Dalam rangka Rekonsiliasi Pertanggungjawaban APBN, kegiatan diadakan pada tanggal 22 - 23 Juli 2024. Bertempat di Ruang Rapat Nusantara I Gd. E Lt. II Badan Pangan Nasional, kegiatan dihadiri oleh seluruh pengelola keuangan lingkup satker Pusat Badan Pangan Nasional.

4. Kegiatan Hari Jadi ke 3 Badan Pangan Nasional

Dalam rangka Kegiatan Hari Jadi ke 3 Badan Pangan Nasional, diadakan pada tanggal 28 - 29 Juli 2023, Bertempat di Hotel Sultan dan Parkir Timur Gelora Bung Karno Senayan. Diikuti oleh seluruh Pegawai lingkup Badan Pangan Nasional.

4.3. Biro Organisasi, Sumberdaya Manusia dan Hukum

Pada Bulan July 2024, Biro Organisasi SDM dan Hukum telah melaksanakan pemantauan. Kegiatan yang dilakukan oleh Biro Organisasi SDM dan Hukum sebagai berikut:

a. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

Organisasi dan tata Kelola Internal memperoleh alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 950.000.000 (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan realisasi pada bulan July berdasarkan SP2D 2024 sebesar Rp.513.539.244,- (Lima ratus tiga belas juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) atau 54,06% (lima puluh empat koma nol enam persen). Dalam layanan ini melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Undangan Rapat Paripurna BAPOR KORPRI Dalam rangka persiapan mengikuti BAPOR KORPRI di Sumatera Selatan pada tahun 2025 mendatang
- 2) Sosialisasi Organisasi Profesi KAKPN Sosialisasi pembentukan organisasi profesi KAKPN dengan tujuan untuk mendorong keterlibatan aktif pejabat fungsional Analisis Ketahanan Pangan dalam organisasi profesi di seluruh Indonesia.
- 3) Rekonsiliasi Tunjangan Kinerja Bulan Juni Tahun 2024 Rapat rekonsiliasi tunjangan kinerja bulan Juni Tahun 2024.
- 4) Koordinasi Pelaksanaan UJIKOM/ Asesmen Mansos AKP Pelaksanaan asesmen manajerial dan sosial kultural sebagai tahapan lanjut dalam pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional AKP Nasional Tahun 2024
- 5) Rapat Persiapan Evaluasi Kelembagaan untuk Meningkatkan Skor Peringkat Komposit Evaluasi Kelembagaan Badan Pangan Nasional



Dok. Rapat Persiapan Evaluasi Kelembagaan Badan Pangan Nasional

6) Pembahasan Internal Input Portal Reformasi Birokrasi (RB)

Proses penginputan rencana aksi Reformasi Birokrasi Badan Pangan Nasional dan Portal RB Kementerian PAN RB

7) Knowledge Exchange Meeting Penyelarasan Jabatan Fungsional, Kemenpan RB
Mengikuti rapat kegiatan pertukaran pengetahuan dalam pengelolaan jabatan fungsional antar Instansi Pembina yang diadakan oleh Kementerian PAN RB

8) Sosialisasi Organisasi Profesi KAKPN di Banten, Jawa Barat, dan Jawa Tengah
Sosialisasi pembentukan organisasi profesi KAKPN dengan tujuan untuk mendorong keterlibatan aktif pejabat fungsional Analis Ketahanan Pangan dalam organisasi profesi di seluruh Indonesia

9) Penyusunan Sertifikat Rekomendasi Kelulusan UJIKOM JF AKP
Proses penyusunan sertifikat rekomendasi JF AKP bagi keseluruhan peserta
Kegiatan dalam rangka pengembangan organisasi profesi jabatan fungsional Analis Ketahanan Pangan yang baru dibentuk yaitu Komunitas Analis Ketahanan Pangan Nasional (KAKPN), mempelajari dari pengalaman Asosiasi Profesi JF Sumber Daya Manusia Aparatur dan Perhimpunan Penyuluh Pertanian.

b. Sumberdaya Manusia

Layanan Manajemen Sumber Daya Manusia memperoleh alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 3.400.336.000 (Tiga miliar empat ratus juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) dan realisasi pada bulan July 2024 sebesar Rp.1.507.560.865,- (Satu milyar lima ratus tujuh juta lima ratus enam puluh ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah) atau 44,34% (empat puluh empat koma tiga puluh empat persen).

Pada bulan July 2024 telah melaksanakan Kegiatan sebagai berikut:

- 1) **Sidang Etika dan Disiplin Pegawai Badan Pangan Nasional.** Pelaksanaan sidang etika oleh tim etika disiplin pegawai dilakukan sebagai tindak lanjut atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai Badan Pangan Nasional.
- 2) **Rapat Pleno Pembahasan Usulan ASN Pangan Terbaik di Lingkungan Badan Pangan Nasional.** Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Badan Pangan Nasional, perlu memberikan penghargaan kepada Pegawai ASN yang memiliki kinerja terbaik dan mampu menerapkan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK. Pemberian penghargaan terhadap ASN terbaik di lingkungan Badan Pangan Nasional (Anugerah ASN Pangan Terbaik) tahun 2024 diberikan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau triwulanan.

Diharapkan dengan pemberian penghargaan ini dapat mendorong dan meningkatkan motivasi ASN lainnya untuk bekerja lebih baik dan meningkatkan kinerjanya.

Untuk mendapatkan kandidat ASN Pangan Terbaik perlu dilaksanakan penilaian terhadap usulan calon penerima penghargaan oleh Tim Penilai sebagaimana Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2024 tentang Tim Penilai Anugerah ASN Pangan Terbaik di lingkungan Badan Pangan Nasional tahun 2024. Tim Penilai akan melakukan penilaian untuk mendapatkan 3 (tiga) kandidat untuk masing-masing kategori, yaitu 3 (tiga) kandidat PNS terbaik dan 3 (tiga) kandidat PPPK terbaik, yang selanjutnya akan disampaikan kepada Sekretaris Utama untuk ditetapkan.

- 3) Pelantikan sejumlah pejabat administrator dan pejabat pengawas lingkup Badan Pangan Nasional oleh Kepala Badan Pangan Nasional.

Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) Arief Prasetyo Adi melantik sejumlah pejabat administrator dan pejabat pengawas lingkup Badan Pangan Nasional di Jakarta, Kamis 18 Juli 2024. Pada Kesempatan tersebut Kepala Badan Pangan Nasional mengingatkan kembali akan pentingnya integritas kepada seluruh pegawai.

- 4) **Penyusunan petikan SK Penyesuaian gaji ASN**

Penyusunan petikan gaji ASN dilakukan agar setiap ASN Badan Pangan Nasional mendapatkan berkas SK penyesuaian gaji tahun 2024 maka perlu dibuat petikan SK penyesuaian gaji tahun 2024 bagi seluruh ASN Badan Pangan Nasional.

- 5) **Sosialisasi Indeks Profesionalitas ASN**

Menindaklanjuti surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 41/90/BBM.02.01/SD/K/2024 tanggal 20 Juni 2024 perihal Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023, Badan Pangan Nasional telah melaksanakan sosialisasi tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023 di lingkungan Badan Pangan Nasional.

- 6) **Pelaksanaan Senam Pagi Bagi Pegawai Badan Pangan Nasional**

Dalam rangka meningkatkan rasa kebersamaan antar pegawai dan menggiatkan olahraga di lingkungan Badan Pangan Nasional, telah dilaksanakan kegiatan olahraga/jalan sehat bersama bersama Bapak Kepala Badan Pangan Nasional setiap 2 (dua) minggu sekali di Halaman Kantor Badan Pangan Nasional Jalan Harsono RM No.3, Ragunan, Jakarta Selatan.

7) Sosialisasi Indeks Sistem Merit dan Penyiapan Data Dukung Sistem Merit

Dalam rangka mendukung upaya penguatan Reformasi Birokrasi, Badan Pangan Nasional sebagai lembaga pemerintahan non kementerian (LPNK) yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, kami bermaksud turut serta dalam penilaian penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN Tahun 2024. Untuk kelancaran teknis penggugahan data dukung pertama kali ke dalam aplikasi SIPINTER (Sistem Informasi Penilaian Mandiri Penerapan Sistem Merit), Badan Pangan Nasional mengundang perwakilan dari KASN sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi sekaligus persiapan pemenuhan bukti dukung penilaian Sistem Merit tahun 2024.

8) Penyerahan Penghargaan Anugerah ASN Pangan Terbaik 2024

Dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Badan Pangan Nasional, maka perlu diberikan penghargaan kepada Pegawai ASN yang memiliki kinerja terbaik dan mampu menerapkan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK. Sebagai proses tindak lanjut, telah diterbitkan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 1234/SM.06.09/06/2024 tentang Pemberian Anugerah ASN Pangan Terbaik di lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2024.

Penetapan Penerima Anugerah ASN Pangan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Penerima Penghargaan Anugerah ASN Pangan Terbaik di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2024, yang sebelumnya telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai ASN Pangan Terbaik 2024 dengan hasil akhir diberikan penghargaan kepada 5 (lima) ASN Pangan Terbaik kategori PNS dan 3 (tiga) ASN Pangan Terbaik kategori PPPK.

Sesuai dengan isi dari Surat Edaran Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Nomor 1234/SM.06.09/06/2024 tentang Pemberian Anugerah ASN Pangan Terbaik di lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2024, bahwa pegawai yang telah ditetapkan sebagai pemenang berhak mendapatkan penghargaan. Sehubungan dengan hal tersebut, telah dilaksanakan kegiatan penyerahan Anugerah ASN Pangan Terbaik pada hari Minggu, 28 juli 2024 di hotel The Sultan Hotel & Residence Jakarta Jl. Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKJ 10270.

9) Daftar Cuti Pegawai Badan Pangan Nasional Bulan Juli Tahun 2024

Pelaksanaan Proses Cuti Pegawai Cuti merupakan kegiatan rutin Biro Organisasi SDM dan Hukum dalam rangka pelayanan administrasi kepegawaian. Pada bulan July 2024, jumlah pegawai yang melaksanakan cuti adalah sebanyak 64 orang ASN di lingkup Badan Pangan Nasional dengan lama cuti yang bervariasi.

c. Layanan Hukum

Layanan Hukum memperoleh alokasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 1.391.900.000 (Satu milyar tiga ratus Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus rupiah) dan realisasi pada bulan July 2024 sebesar Rp.641.617.380 (Enam ratus empat puluh satu juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus delapan puluh satu rupiah) atau 46,10% (empat puluh enam koma sepuluh persen). Kegiatan yang telah dilaksanakan pada bulan Juli 2024 sebagai berikut:

1) Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

Biro Organisasi, SDM, dan Hukum bersama dengan Direktorat di lingkungan Badan Pangan Nasional melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan bulan Juli 2024, sebagai berikut:

- a. Rancangan Peratura Presiden atas Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Tugas Belajar
- b. Rancangan Peraturan Presiden (Rpeperes) tentang Penguatan Sistem Logistik (Kemenko Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri)
- c. Rancangan Peraturan Presiden (Rpeperes) No.125 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah
- d. Rancangan Peraturan Pemerintah No.5 tahun 2021 tentang Penyeleggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko
- e. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2016 dan RPP turunan tentang Undang-undang (UU) No.21 Tahun 2019, pasal 25 (Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi RI)
- f. Rancangan Peraturan Presiden (RPepres) tentang Perencanaan Pangan ke Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui aplikasi Sistem Informasi Perencanaan hukum (SIRENKUM)
- g. Rancangan Naskah Akademik Undang – Undang Penyelamatan Pangan (Kewaspadaan Pangan & gizi)

- h. Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras dan Daging Ayam Ras
- i. Rancangan Peraturan Presiden tentang Penguatan Sistem Logistik Nasional (Harmonisasi)
- j. Rancangan Naskah Akademik RUU Pencegahan dan Penurunan Susut dan sisa pangan
- k. Rancangan Peraturan Presiden Nomor 61 tahun 2024 tentang Neraca Komoditas sebagai pengganti Perpres No.32 tahun 2022 tentang Neraca Komoditas
- l. Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perubahan PP.No.5 Tahun 2021 tentang Perijinan Berusaha terkait dengan NSPK Sanksi Administratif, dan Pengawasan Sub Sektor Pangan Segar
- m. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan
- n. Rancangan Peraturan Presiden tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik TA 2025
- o. Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Batas Maksimal Cemarkan dalam Pangan Segar di Peredaran
- p. Rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Pangan Nasional
- q. Rancangan Peraturan Kalteng tentang Pengendalian dan Pengawasan Distribusi gabaH

Badan Pangan Nasional/ National Food Agency (NFA) terus melakukan upaya penguatan sistem pengawasan keamanan pangan segar baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Setelah sebelumnya terbit Perbadan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengawasan terhadap Pemenuhan Persyaratan Keamanan, Mutu, Gizi, Label, dan Iklan Pangan Segar, kali ini NFA juga sedang berproses terhadap Penyusunan Rancangan Perbadan Pengawasan Pangan Segar di Daerah.

Dalam rangka mensinergikan peran seluruh sektor Kementerian/Lembaga, Kementerian Hukum dan HAM bersama NFA telah melaksanakan harmonisasi Rancangan Perbadan tersebut secara hybrid pada Kamis 18 Juli 2024 di Jakarta.

Rapat dibuka oleh Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan II dan dipimpin oleh Ketua Tim Harmonisasi KemenkumHAM. Perwakilan NFA diantaranya Karo Organisasi, SDM, dan Hukum (OSH) dan Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Deputy Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan selaku pemrakarsa Rancangan Perbadan tersebut. Kegiatan harmonisasi telah melibatkan Kementerian/Lembaga terkait seperti Setkab, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkumham, Kemendagri, KKP, Bappenas, dan Kementerian Pertanian.

Rancangan Perbadan Pengawasan Pangan Segar di Daerah telah melalui beberapa proses penyusunan regulasi sesuai peraturan perundang-undangan, diantaranya tahap brainstorming, pembahasan dengan pakar dan stakeholder, serta konsultasi publik. kemenkumHAM bersama Badan Pangan Nasional menargetkan pengesahan dan pengundangan dapat selesai pada bulan Agustus 2024 agar dapat segera diimplementasikan oleh Dinas yang menangani Pangan di Daerah.

Badan Pangan Nasional bersama Kementerian Hukum dan HAM telah sampai pada tahap harmonisasi Rancangan Perbadan Batas Maksimal Cemaran bersama Kementerian/Lembaga terkait.

Rancangan Perbadan nantinya akan mengatur beberapa batas maksimal cemaran berupa cemaran logam berat, mikroba dan mikotoksin khususnya pada PSAT yang ada di peredaran, juga metode pengujiannya serta mekanisme pengawasan di lapangan,” jelas Yusra Egayanti selaku Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan NFA. “Regulasi batas cemaran yang telah ada sebelumnya terus diperbaharui dengan kajian-kajian, baik kajian primer melalui pengambilan data langsung di masyarakat maupun kajian sekunder.

Pemerintahan digital merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan ekosistem digital. Pemanfaatan teknologi dan informasi di seluruh elemen pemerintah ini menjadi fondasi penting untuk meningkatkan layanan pemerintah kepada publik. Dalam menyelenggarakan pemerintahan digital atau dikenal dengan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Badan Pangan Nasional, perlu disusun payung hukum agar pelaksanaan pemerintahan digital sesuai dengan standar dan bermanfaat. Pertemuan dilakukan bersama Tim Koordinasi Nasional SPBE untuk membahas lanjutan substansi rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) tentang Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Badan Pangan Nasional.

“Perbadan yang telah disepakati diharapkan dapat membantu kami menerapkan SPBE di Badan Pangan Nasional sebagai dasar pelaksanaan transformasi digital,” ungkap Kelik. Tim Koordinasi Nasional SPBE yang hadir diantaranya perwakilan dari Kemen PPN/Bappenas, BRIN, BSSN, dan Kemen PANRB menyampaikan masukan untuk penyempurnaan rancangan Perbadan. Turut hadir, perwakilan unit kerja eselon II NFA selaku Tim Koordinasi SPBE di NFA.

UU Pangan No. 18/2012 dan Perpres No. 66/2021 telah mengamanatkan kepada NFA untuk melaksanakan fungsi pengawasan keamanan pangan, khususnya untuk pangan segar, termasuk dalam penyusunan NSPK sebagai acuan bagi seluruh stakeholder dan sebagai instrumen pengawasan di lapangan. NFA melalui Direktorat Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan saat ini sedang menyusun rancangan Perbadan terkait Batas Maksimal Residu (BMR) Pestisida pada Pangan Segar di Peredaran.

Proses yang dilakukan mengikuti kaidah dan tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentunya dengan melibatkan seluruh stakeholder termasuk para pakar. Pada Jumat, 19 Juli 2024 di Bekasi telah dilakukan FGD dengan mengundang Prof. Dr. Apt. Sri Noegrohati yang merupakan pakar keamanan pangan dari UGM. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk membahas draft Perbadan yang telah disusun guna mendapatkan saran dan masukan untuk penyempurnaan. Kami akan memastikan angka BMR yang ditetapkan nanti sudah berdasarkan kajian risiko dengan juga membandingkan standar/regulasi internasional, sehingga tidak hanya melindungi masyarakat sebagai konsumen, tetapi juga dapat dipenuhi pelaku usaha berdasarkan prinsip ALARA atau *as low as reasonably achievable*.” Ujar Yusra Egayanti, Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan NFA.

2) Penyusunan Naskah Perjanjian

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional menjalin kerja sama dengan Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan (stakeholder). Penyusunan naskah perjanjian yang disusun pada bulan Juli 2024 adalah Menyempurnakan dan merumuskan draft Perjanjian Kerjasama Antara Badan Pangan Nasional dengan PT. ASDP Indonesia Ferry.

3) Penyusunan Instrumen Hukum

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyusunan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan advokasi hukum dilakukan beberapa penyusunan instrument hukum lainnya, sebagai berikut:

- a. Penyempurnaan Rancangan Keputusan Deputi tentang Juknis Ketersediaan Pangan
- b. Penyempurnaan Petunjuk Teknis Direktorat Ketersediaan Pangan
- c. Penyempurnaan Keputusan Kepala Badan Nasional tentang Panitia Penyelenggara Peringatan Hari Lahir Badan Pangan Nasional ke-3 Tahun 2024
- d. Penyempurnaan Rancangan Indeks Hak Asasi Manusia Indonesia lingkup Kementrian Hukum an Ha Asasi Manusia
- e. Penyempurnaan Rancangan Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Lingkup Badan pangan Nasional
- f. Penyempurnaan Rancangan Surat Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Perubahan Harga Gabah dan Beras
- g. Penyampaian Keputusan DPD RI tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi RPerda dan Perda terkait Ketahanan Pangan (Hasil Sidang Paripurna ke-10 DPD RI masa sidang IV Tahun Sidang 2023 – 2024 tanggal 5 April tahun 2024
- h. Penyempurnaan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Tim Pelaksana Penugasan Impor Beras Kepala Perum Bulog tahun 2023
- i. Penyempurnaan Keputusan Tim Pengelola inerja di Lingkungan Sestama
- j. Penyempurnaan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Perubahan atas Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras
- k. Penyempurnaan Rancangan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Untuk Bantuan Pangan Beras Tahap Ketiga Tahun 2024
- l. Penyempurnaan Rancangan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Tim Pengawas Kearsipan Internal Badan Pangan Nasional
- m. Penyempurnaan Rancangan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Dinamis di Lingkungan Badan Pangan Nasional.
- n. Penyempurnaan Surat Keputusan Pemberian Penghargaan Integrasi Data Pangan Inovatif
- o. Penyempurnaan Surat Keputusan Nasional tentang Pengguna Akun SAKTI

Pelaksanaan Kegiatan Advokasi Hukum

Laporan hasil Terkait pemberian pembinaan hukum dianggap perlu melakukan Tindakan Perlindungan Hukum Preventif yaitu perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya permasalahan hukum) lingkungan Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Biro OSH adalah:

Perkenalan Kantor Pengacara, melalui surat masuk dari Managing Partner dari SGP Law Office Jakarta yang beralamat di MTH Square GF 4/A4 Jl.MT Haryono Kav.10 Jakarta, terkait penanganan Perkara Korupsi, baik Kejaksaan Agung, Kepolisian dan KPK, serta penanganan perkara di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

4.4. Pusat Data dan Informasi Pangan

Telah melaksanakan kegiatan prioritas sebagai berikut:

4.4 1. Tata Kelola SPBE

a. Kebijakan:

Penyusunan Peraturan Badan tentang Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Badan Pangan Nasional telah sampai ke tahap harmonisasi.

b. Manajemen:

- 1) Telah disusun draf pedoman pelaksanaan manajemen SPBE meliputi manajemen pengetahuan dan perubahan, masih diperlukan penyusunan pedoman SPBE di lingkup manajemen aset TIK, manajemen layanan dan manajemen SDM.
- 2) Telah dimulai kegiatan Audit TIK untuk aplikasi, infrastruktur dan keamanan. Batas akhir pelaksanaan audit TIK ini adalah tanggal 21 Agustus 2024.
- 3) Telah dilakukan inventarisasi aplikasi TIK yang ada dan akan dibangun oleh unit kerja di Badan Pangan Nasional melalui rapat tanggal 18 Juli 2024.

c. Tata Kelola:

Tim Koordinasi SPBE dalam proses mempersiapkan bukti dukung untuk Penilaian Mandiri SPBE di tahun 2024. Batas akhir penilaian dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2024.

d. Layanan:

Belum dilakukan kegiatan dan koordinasi terkait Layanan SPBE.

e. Penyusunan Draf SK Peta Rencana dan Arsitektur SPBE 2024 :

- 1) Telah disusun arsitektur SPBE di lingkup Badan Pangan Nasional untuk semua domain.
- 2) Sedang disusun lampiran untuk pengesahan peta rencana dan arsitektur SPBE 2024 yang nantinya akan disahkan menjadi SK Arsitektur SPBE 2024 menggantikan SK 84.2/2023.

f. Pengisian Arsitektur SPBE di SIA SPBE :

- 1) Telah dilakukan pengisian arsitektur as-is
- 2) Telah dilakukan pengisian arsitektur to-be

4.4.2 Kelola Server Pusat Data Nasional

a. Detail penggunaan resource PDNS 1 Kominfo oleh Badan Pangan Nasional, sebagai berikut:

- 1) vCPU dari yang dialokasikan sebanyak 284 GHz sudah terpakai 218 GHz atau 77%.
- 2) Memory dari yang dialokasikan sebanyak 436 GB sudah terpakai 388 GB atau 89%.
- 3) Storage dari yang dialokasikan sebanyak 13,6 TB sudah terpakai 12,98 TB atau 95%.
- 4) Menggunakan 19 vApps, dari total VM sebanyak: 44 VM dengan status power on VM sebanyak: 41 VM.
- 5) Dilakukan penambahan VM, untuk PERPUS-NFA, 4 vCPU, 6 GB RAM, 100GB HDD.

b. Penggunaan resource pada PDNS2 darurat, restore data pasca terkena serangan ransomware di PDNS2: 4 VM untuk SIPG, restore dari backup: - 32 vCPU; 96 GB RAM; 3,148 TB HDD.

4.4.3. Server Kendali IT

Penggunaan resource pada Ruang Pusat Kendali IT NFA adalah sebagai berikut:

- 1) vCPU dari yang dialokasikan sebanyak 134,4 GHz sudah terpakai 11,96 Ghz atau 9%.
- 2) Memory dari yang dialokasikan sebanyak 1023,52 GB sudah terpakai 445,07 GB atau 43%.
- 3) Storage dari yang dialokasikan sebanyak 25,34 TB sudah terpakai 1,6 TB atau 6%.
- 4) Total VM running 15 dari 16 VM, total host terkoneksi 1 host.

4.4.4 Jaringan Internet

Traffic main link FA BW selama bulan Juli 2024:

a. *In bound* (download)

- 1) Current: Besar bandwidth yang terakhir tercatat selama periode Juli 2024 sebesar 11,91 MB.
- 2) Average: Besar bandwidth rata-rata selama periode Juli 2024 sebesar 11,94 MB.
- 3) Maximum: Besar bandwidth maksimal selama periode Juli 2024 sebesar 54,31 MB.

b. *Outbound* (upload)

- 1) Current: Besar bandwidth yang terakhir tercatat selama periode Juli 2024 sebesar 1,29 MB.
- 2) Average: Besar bandwidth rata-rata selama periode Juli 2024 sebesar 33,67 MB.
- 3) Maximum: Besar bandwidth maksimal selama periode Juli 2024 sebesar 165,68 MB.

c. Koneksi Advice ke AP

Total Client yang mengakses jaringan Internet NFA selama bulan Juli 2024 rata-rata mencapai 435 device per/hari.

d. Fortiget

Total File, Source dan Aplikasi yang terblokir selama bulan Juli 2024:

- 1) IPS : Terdapat 0 serangan Intrusion Prevention dengan predikat High.
- 2) AntiVisru : 0 File terdeteksi virus
- 3) Anomali : 458 Source terdeteksi Critical
- 4) Web Filter : 112 Source Web Filter yg terdeteksi berbahaya
- 5) SSL : 1 Source IP yang ter blokir
- 6) Aplikasi Control : 345 Source Aplikasi Control yang sudah terblok
- 7) Forwart Traffic : 2559 Traffic Destination yang terblokir
- 8) Aplikasi/URL yang sering terblokir selama bulan Juli 2024: Game, Catce, Malware, Pornografi, Iklan Negatif, Icmp_floot (tujuan serangan ini adalah untuk membanjiri jaringan atau sistem target dengan lalu lintas yang berlebihan, sehingga menghabiskan sumber daya dan membuat sistem tidak responsif atau tidak dapat diakses).

5. Helpdesk (SAPA)

Permohonan Layanan yang diajukan selama bulan Juli 2024 yaitu:

- a. Total request zoom di bulan Juni ada 14 permintaan zoom, yang berasal dari Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan, Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Distribusi dan Cadangan Pangan, Kewaspadaan Pangan dan Gizi, dan Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum.
- b. Permintaan data: Permohonan Data Indeks Ketahanan Pangan

6. Pembangunan SI Pangan dan Gizi dan Portal Satu Data Pangan (SDP)

- a. Pusdatin Pangan telah menyampaikan mekanisme embed visualisasi SAS ke portal kepada pihak ketiga.
- b. Rapat progress perkembangan Portal SDP pada tanggal 12 Juli 2024, dengan rumusan sebagai berikut:
 - 1) Konfirmasi server yang dibutuhkan 2 VM: 1 VM untuk aplikasi+database aplikasi, 1 VM untuk menyimpan data.
 - 2) Tampilan color palette beranda menyusul akan disesuaikan.
 - 3) Gambar pada katalog aplikasi sesuaikan ukurannya 50% -> seperti yang ada di portal Kemenparekraf.
 - 4) Secara paralel tim Pusdatin akan menyiapkan link2 SIPG yang existing supaya 2 minggu ke depan sudah kelihatan tampilannya.
 - 5) Pada Kontak tambahkan WA pusdatin dan email pusdatin -> mekanismenya bisa direct ke Whatsapp dan untuk email langsung muncul form yang nanti pesannya bisa langsung masuk ke Pusdatin. Nomor Whatsapp: 0851 8686 7734 dan email: pusdatin@badanpangan.go.id. Setelah dilakukan elaborate oleh tim Mitra Talenta Group, saran untuk infografis sebaiknya menggunakan format image.
- c. Rapat progress perkembangan Portal SDP pada tanggal 26 Juli 2024, dengan rumusan sebagai berikut:
 - 1) Pihak ketiga menyampaikn tampilan dummy untuk menu dataset.
 - 2) Terdapat kolom pencarian dataset di halaman awal menu dataset. Apabila dataset yang dicari oleh pengguna tidak ada, maka akan diarahkan ke aplikasi SAPA.
 - 3) Untuk saat ini yang baru diuji coba adalah data dengan mekanisme unggah manual ke Portal SDP.

- 4) Perlu ada penambahan pop up feedback dari pengguna yang mengunduh dataset.
- 5) Menu Visualisasi. Pada dashboard superset, diperlukan konfigurasi sehingga muncul option 'embed dashboard' pada visualisasi data yang akan diintegrasikan ke dalam portal SDP.
- 6) Untuk integrasi visualisasi data dari SAS, juga masih terdapat kendala, dimana SAS tidak bisa tampil di local.
- 7). Monev integrasi aplikasi :
 - a. Integrasi FSVA melalui SPLP
 - 1) Total 8 subscriber (Diskominfo Kota Balikpapan, Diskominfo Kota Yogyakarta, Diskominfo Kab. Halmahera Utara, Diskominfo Kabupaten Buleleng, Diskominfo Kab. Wonogiri, API Badan Pangan, Admin, dan Diskominfo Kab. Banjar). Tidak ada penambahan subscriber.
 - 2) 0 Total Success Request
 - 3) 0 Total Traffic
 - b. Integrasi Panel Harga melalui SPLP :
 - 1) Total 19 subsriber. Berikut daftar aplikasi Kementerian/Lembaga/Daerah yang terintegrasikan dengan Panel Harga
 - 2) 334 Total Success Request.
 - 3) 447 Total Traffic.
 - c. Integrasi Neraca Bahan Makanan melalui SPLP
 - d. Kegiatan integrasi aplikasi juga dilakukan melalui webapi.badanpangan.go.id untuk instansi pemerintah yang membutuhkan integrasi aplikasi tetapi belum mengimplementasikan SPLP dan pihak non pemerintah.
 - e. Dalam web-API ada beberapa API aplikasi yang sudah siap untuk dibagi pakai, antara lain:
 - 1) Panel Harga Pangan
 - 2) FSVA
 - 3) SKPG
 - 4) Sigap Nasional
 - 5) Sipsat
 - 6) Sinmb
 - f. Total verifikasi pengguna pada web API Badan Pangan Nasional:
 - * pengguna terblokir: 0, pengguna aktif: 10, total pengguna: 10.

8). Monitoring sistem :

Memonitoring kinerja sistem, deteksi dan penanganan gangguan, serta penyediaan dukungan operasional agar sistem dan aplikasi lingkup Badan Pangan Nasional berjalan lancar, diantaranya Derawan, FSVA, Neraca Bahan Makanan, Panel Harga, Sigap Nasional, SKPG, Statistik, Temali, Badan Pangan Nasional (Web Utama), Ruang IT Control, dan E-Pegawai (Absensi).

Pemantauan operasional sistem lingkup Badan Pangan Nasional bulan Juli 2024 berkisar antara 87%- 99,95%. Pada tanggal 02 Agustus 2024 telah ditambahkan objek pemantauan terhadap SIPG yang perlu dipantau setelah recovery dari insiden PDNS.

9) *Backup Cloudnesia*

Secara umum *back up cloud* untuk ke-6 aplikasi berjalan dengan baik. Untuk sinkronisasi atau replikasi database PostgreSQL pada setiap VM berstatus sync pada server master, ini mengindikasikan bahwa proses sinkronisasi atau replikasinya berjalan dengan baik. Hybrid Backup Recovery melakukan backup data dari 6 server on premise setiap harinya dan hasil backup tersebut disimpan di Hybrid Backup Recovery Alibaba Cloud untuk di-restore pada 6 instance yang ada di Alibaba Cloud.

10) Pengembangan Intranet (SIM ASN, FORM, SIPENA)

- a. Menambahkan data pegawai pada SIMASN NFA dengan sinkronisasi data BKN dengan kolom NIP untuk pegawai dan menginput manual untuk PPNNP (sesuai tabel Pegawai dan PPNNP dari OSH).
- b. Menambahkan user SSO pegawai mutasi dan PPNNP yang belum memiliki akun SSO manual melalui admin SSO dan sinkron db intra hris.users yang sesuai dari db sso public.oauth_users.
- c. Sinkronisasi manual dengan menginputkan username intra untuk Pegawai dan PPNNP s di SIMASN NFA.
- d. Sinkronisasi data NIP untuk PPNNP dengan menyesuaikan data pada E-Pegawai berupa username bukan NIK.
- e. Menambahkan fitur hapus data PPNNP bagi user SIMASN dengan role sebagai administrator.
- f. Membuat tombol untuk login ke E-Pegawai/presensi melalui SSO pada laman www.epegawai.badanpangan.go.id.

11) Keamanan Siber

- a. Badan Pangan Nasional telah mengikuti kegiatan National Cyber Exercise (NCE) bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kewaspadaan nasional terhadap adanya insiden siber.

Peningkatan kapabilitas secara individu maupun tim dalam melakukan identifikasi, deteksi, proteksi, penanggulangan, pemulihan insiden siber serta saling berbagi informasi terbaru antar organisasi maupun lintas sektor terkait insiden yang terjadi sehingga dapat mereduksi potensi resiko. Hingga saat ini kegiatan NCE telah diikuti sebanyak 5258 Peserta.

- b. Kegiatan National Cyber Exercise (NCE) dilaksanakan dengan konsep Cyber Drill Test berupa simulasi yang mencakup berbagai tingkat keterampilan mulai dari pemula hingga lanjutan dalam menghadapi setiap potensi ancaman siber. Peserta akan dihadapkan dengan permasalahan ancaman siber yang menuntut respon yang tepat dan efektif yaitu dengan skenario yaitu malware stealer dan penanganan insiden siber lainnya sehingga kegiatan NCE ini membantu CSIRT dalam memperkuat kesiapsiagaan dan pengetahuan dalam menghadapi serangan siber yang lebih kompleks.

12) Pendampingan Pembangunan Aplikasi

- a. Panel Harga Pangan: Penyediaan server staging untuk keperluan testing dan launching, pemberian akses ke console play store untuk keperluan pendaftaran aplikasi ke google play store.
- b. Satu Data Pangan : embed visualisasi SAS di aplikasi portal sudah bisa, beberapa infografis sudah ditampilkan berdasarkan produsen data dan aspeknya, sesuai penawaran dan permintaan spesifikasi server sedang disiapkan. Secara keseluruhan yaitu terdiri dari 52 Task telah tercapai 38 Task dengan presentase 73,08%.
- c. Sistem Informasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan (AKP): Melakukan pendampingan dengan menambahkan menu (link pengumuman) dan upload pengumuman Hasil Akhir Uji Kompetensi JF AKP Tahun 2024 sesuai permintaan dari OSH.
- d. Pengembangan aplikasi Sistem Pengendalian Kerawanan Pangan dan Gizi dari Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi.

- e. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Pengembangan Aplikasi di Lingkup Badan Pangan Nasional yang dilakukan secara hybrid di Depok, Kamis 18 Juli 2024. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pembahasan terkait mekanisme pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi layanan di lingkup NFA sebagai upaya peningkatan Layanan Pusat Data dan Informasi Pangan (Pusdatin Pangan).

13. Hasil Pengumpulan Data Ketahanan Pangan

Melakukan monitoring pertukaran data antara BPS dan Badan Pangan Nasional melalui aplikasi Transdata BPS selama bulan Juli, diantaranya KSA Padi (Luas Panen dan Produksi Padi), Data Ekspor berdasarkan Negara Tujuan, Data Ekspor berdasarkan Kode HS, Nilai Tukar Petani,

Jumlah Horeka, Inflasi dan Indeks Harga Konsumen, Inflasi Pangan Bergejolak. Data-data tersebut juga telah disampaikan kepada produsen data di Bapanas, yang sebelumnya membutuhkan data tersebut melalui aplikasi cloud Bapanas. Sementara itu data yang diberikan oleh Bapanas ke BPS adalah Harga Produsen dan Harga Konsumen Periode bulan sebelumnya (Juni) dan Prognosa Neraca Pangan Nasional posisi data bulan Juni.

14. Partisipasi dalam pelaksanaan SDI

- a. Menyiapkan Data Prioritas Badan Pangan Nasional tahun 2023 yang akan disampaikan ke Sekretariat SDI.
- b. Lokakarya Forum Masyarakat Statistik (FMS), yang diselenggarakan pada hari Rabu, 17 Juli 2024 di Hotel Westin Jakarta. 1) Tujuan pelaksanaan lokakarya untuk berdiskusi bersama tentang data ketahanan pangan untuk mendukung penyusunan kebijakan Pembangunan yang tepat agar mencapai outcome ketahanan pangan dan kesejahteraan Masyarakat. FMS merupakan wadah yang bersifat non struktural untuk meningkatkan kualitas data yang dihasilkan oleh BPS.

Tindak lanjut: Perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak dalam upaya reformasi kualitas data. Pentingnya ketersediaan dan akses terhadap data yang baik tersebut akan mendukung perencanaan, monitoring, dan perumusan kebijakan pembangunan.

15. Kolaborasi Pembina Data (Statistik dan Spasial)

- a. Telah dilaksanakan Workshop Evaluasi Implementasi Kualitas Data dan Proses Bisnis Kegiatan Statistik di Badan Pangan Nasional. Rapat diselenggarakan secara hybrid di Hotel Avenzel Bekasi pada Selasa, 23 Juli 2024.

Tujuan penyelenggaraan Workshop Evaluasi Implementasi Kualitas Data dan Proses Bisnis Kegiatan Statistik adalah untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi BPS atas hasil penilaian Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) tahun 2023. Sebagai tindak lanjut hasil pertemuan:

- a) Pedoman Pelaksanaan Satu Data Pangan yang telah disusun oleh Pusdatin Pangan perlu direviu kembali.
 - b) Produsen data perlu mengisi matriks implementasi proses bisnis kegiatan statistik termasuk 6 dimensi penjaminan kualitas data.
 - c) Pusdatin Pangan akan melakukan evaluasi dan menyusun tindak lanjut berdasarkan matriks yang telah diisi oleh Produsen Data tersebut.
- b. Monitoring pengajuan rekomendasi kegiatan statistik Kompilasi Data Penyusun Indeks Ketahanan Pangan (IKP) di Indonesia dari Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan. Pada tanggal 5 Juli 2024, BPS telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Kelayakan untuk kegiatan tersebut.
 - c. Memeriksa pengajuan rekomendasi kegiatan statistik Survei Panel Monitoring Stok Pangan Strategis Nasional dari Direktorat Ketersediaan Pangan. Selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2024, BPS telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Kelayakan untuk kegiatan tersebut.
 - d. Memeriksa pengajuan rekomendasi kegiatan statistik Kompilasi Data Situasi Konsumsi Pangan Nasional dari Direktorat Penganekaragaman dan Konsumsi Pangan. Saat ini proses pengajuan masih dalam tahap pemeriksaan BPS.

16. Penyusunan Standar Data dan Metadata

Memperbaiki pengajuan standar data statistik dari direktorat Ketersediaan Pangan, tentang definisi konsep Komoditas Pangan di aplikasi INDAH BPS.

17. Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Menyusun petunjuk teknis (juknis) sebagai tindak lanjut PKS antara Badan Pangan Nasional dan Kementerian Perdagangan tentang Pertukaran Data dan/atau Informasi Perdagangan dan Pangan dalam rangka Optimalisasi Sistem Informasi Perdagangan dan Sistem Informasi Pangan dan Gizi. Draf juknis disampaikan ke Kemendag untuk dikoreksi.

Selanjutnya akan dilakukan pembahasan petunjuk teknis bersama antara Pusdatin Badan Pangan Nasional dan PDSI Kementerian Perdagangan.

18. Pemantauan realiasi anggaran

- a. Realisasi hingga akhir bulan Juli secara SP2D Rp 2.367.639.794,- atau 50,92%.
- b. Realisasi hingga akhir bulan Juli secara akrual Rp 3.735.924.294,- atau 80,34%.

19. Arsip Persuratan selama bulan Juli tahun 2024:

- a. Jumlah Surat Masuk: 83
- b. Jumlah Surat Keluar: 61

4.5 Inspektorat

Hasil monitoring kegiatan prioritas Inspektorat selama Bulan Juli Tahun 2024 sesuai dengan capaian realisasi keuangan. Kegiatan fisik Layanan Audit Internal yang dilaksanakan Inspektorat yang mendukung kegiatan Badan Pangan Nasional pada periode Bulan Juli Tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

1. Uji petik reviu lanjutan bantuan pangan Tahap I ke Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Jawa timur pada Tanggal 4-11 Juli 2024. Kegiatan uji petik merupakan bagian dari rangkaian kegiatan pengawasan untuk memastikan bahwa kondisi di lapangan sesuai dengan proses dan kriteria yang ada. Proses uji petik diawali dengan kegiatan entry meeting pada setiap kantor wilayah bulog yang merupakan operator pelaksanaan kegiatan bantuan pangan. Selanjutnya dilakukan wawancara terhadap penerima dengan melakukan kunjungan ke kelurahan tempat PBP berada. Hasil uji petik akan dikompilasi dalam satu Laporan Hasil Reviu (LHR).

2. Kompilasi Data Hasil Reviu Setelah dilaksanakan kegiatan desk reviu serta uji petik. Proses selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan kompilasi data, pelaksanaan kegiatan kompilasi data berlokasi di Bogor pada tanggal 12-14 Juli 2024. Kegiatan dilaksanakan dengan melanjutkan desk reviu melihat kelengkapan dokumen penyaluran bantuan pangan yang terdiri dari Dokumen BAST penerima, BAST Pengganti, BAST Perwakilan serta BAST rencana Penyaluran. Output dari kegiatan ini adalah kertas kerja catatan hasil reviu penyaluran bantuan pangan.
3. Reviu RKA KL Pagu Indikatif Badan Pangan Nasional Kegiatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Badan Pangan Nasional yaitu Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKAKL) yang dilaksanakan pada tanggal 15-16 Juli 2024. Pagu indikatif ini merupakan salah satu dari bagian yang ada di dalam pagu anggaran. Untuk pagu indikatif ini umumnya dibuat pada bulan Maret atau bulan ke-3. Pagu indikatif juga merupakan salah satu Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang mana nantinya akan diberikan oleh Lembaga Pemerintah sebagai pedoman dalam menyusun Renja atau Rencana Kerja. Lembaga pemerintah atau Kementerian dalam kurun waktu selama 1 tahun ke depan yang mana setiap tahunnya pagu tersebut akan selalu dibuat. Dalam proses reviu poin penting yang menjadi perhatian adalah penggunaan akun belanja sesuai ketentuan, penyesuaian jumlah dan nilai belanja terhadap output yang dihasilkan serta kelengkapan dokumen pendukung yang menjadi dasar penggunaan harga satuan. Reviu lanjutnya yang akan dilaksanakan adalah reviu RKA KL Pagu Definitif Sama seperti pagu indikatif, pagu definitif ini merupakan bagian dari pagu anggaran yang ada di dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN.
4. Reviu Laporan Keuangan UAKPA/B Lingkup badan Pangan Nasional Semester I Tahun 2024 Reviu Keuangan adalah Penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan oleh auditor Aparat Pengawasan Intern K/L yang kompeten untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa akuntansi telah diselenggarakan berdasarkan Standar akuntansi Indonesia (SAI) dan Laporan Keuangan telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dalam upaya membantu Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang berkualitas.

5. Uji Petik Reviu Bantuan Pangan Tahap I lanjutan Kegiatan uji petik tambahan dilaksanakan di kantor wilayah DKI Jakarta-Banten pada tanggal 22-26 Juli 2024. Uji petik ini untuk memperkaya serta menganalisis pelaksanaan penyaluran bantuan pangan tahap I. tim dibagi menjadi 4 (empat) Lokasi Kabupaten Lebak, Pandeglang, Serang serta Tangerang dan Tangerang Selatan.
6. Reviu Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kegiatan reviu dilaksanakan pada tanggal 22-24 Juli 2024 dan 29-31 Juli 2024 . Reviu ini dilaksanakan untuk memastikan bahwa hasil pemeriksaan BPK-RI telah ditindaklanjuti oleh unit kerja. Proses reviu dilaksanakan dengan penyusunan kertas kerja, konfirmasi 9 kepada pihak-pihak terkait. Serta perhitungan kembali mengenai nilai temuan yang sesuai.
7. Reviu Laporan Keuangan Tingkat K/L Badan Pangan Nasional Reviu ini dilaksanakan 25-27 Juli 2024. merupakan reviu lanjutan atas reviu laporan keuangan satuan kerja (satker) semester I. Setelah satker menyelesaikan penyusunan laporan keuangan yang telah direviu. Biro keuangan, Pengadaan dan Umum (KPU) menyusun laporan keuangan Tingkat Kementerian/Lembaga.
8. Reviu atas pengadaan mobil laboratorium keliling Reviu dilaksanakan pada tanggal 26-27 Juli 2024 untuk mengecek progress pengadaan mobil keliling. Catatannya adalah sebagai berikut :
 - a. Kegiatan pemantauan terhadap progres pengadaan mobil laboratorium keliling dipimpin oleh Deputi III Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, dihadiri oleh Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa, PPK Kedeputian III dan Tim Inspektorat Badan Pangan Nasional.
 - b. Pengadaan 7 (tujuh) unit mobil laboratorium keliling keamanan pangan merupakan kegiatan pada Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Tahun Anggaran 2024 bekerja sama melalui Nota Pesanan yang dilaksanakan oleh PT Sanggar Karya Karoseri (Jalan Raya Banjaran KM 16 Bojong Sereh Banjaran-Kabupaten Bandung).
 - c. Ketujuh mobil tersebut dialokasikan untuk diserahkan kepada Dinas Pangan Provinsi di Jambi, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Utara. Dari 7 unit, diantaranya 1 (satu) unit mobil laboratorium keliling keamanan pangan telah terlebih dahulu diserahkan ke Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura 10 Provinsi Bali sehingga pada saat pemantauan, hanya terdapat 6 (enam) unit mobil.

- d. Spesifikasi teknis yang menjadi dasar pengecekan progres kendaraan mobil laboratorium keliling keamanan pangan adalah lampiran Nota Dinas PPK Deputi III Nomor 202/PPK PKKP/D.307/2024 Tanggal 23 Juli 2024 perihal pengadaan mobil laboratorium keliling keamanan pangan yang terdiri dari 5 kelompok uraian pekerjaan, antara lain unit kendaraan, pekerjaan interior, pekerjaan eksterior, peralatan pendukung dan peralatan laboratorium.
 - e. Dari keenam mobil tersebut, pengecekan hanya dilakukan pada 1 mobil dengan nomor seri MHCNLR85ERJ001913.
9. Reviu RKA-KL Revisi Ke 11 Badan Pangan Nasional Reviu RKA-KL ini dilaksanakan pada tanggal 29-31 Juli 2024 untuk memberikan keyakinan terbatas (limited assurance). Fokus Reviu RKA-KL Antara lain :
- a. Kelayakan anggaran untuk menghasilkan sebuah keluaran (output)
 - b. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah perencanaan penganggaran antara lain penerapan standar akuntansi pemerintah, standar biaya masukan, standar biaya kelauran, dan standar struktur biaya, penggunaan akun, hal-hal yang dibatasi, pengalokasikan anggaran untuk kegiatan yang didanai dari penerimaan negara bukan pajak, pinjaman/hibah luar negeri, pinjaman/hibah dalam negeri, dan surat berharga syariah negara, penganggaran badan layanan umum, kontrak tahun jamak dan pengalokasian anggaran yang akan diserahkan menjadi penyertaan modal negara apda badan udaha milik negara.
 - c. Kepatuhan mencantumkan penadaan anggaran sesuai dengan kategori pada semua keluaran (output) yang dihasilkan.
 - d. Kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara lain rencana kerja dan anggaran satuan kerja, term of reference/tincian anggaran biaya, dan dokumen pendukung terkait lainnya;dan
 - e. Kelayakan dan kesesuaian rincan anggaran yang digunakan untuk mendanai inisiatif Baru dan/atau rincian anggaran Angka Dasar yang mengalami perubahan pada level komponen.

3.3 Kegiatan Kepala Badan Pangan Nasional Periode Bulan Juli Tahun 2024

Kepala Badan Pangan Nasional dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya pada bulan Juli Tahun 2024 dengan kegiatan yang telah dilakukan sebagai berikut :

1. Menghadiri Penandatanganan Nota Kesepahaman: Kepala Badan Pangan Nasional Apresiasi Bulog-Pupuk Indonesia Kolaborasi Serap Produksi Pangan Dalam Negeri



Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menghadiri Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Direktur Utama (Dirut) Bulog Bayu Krishnamurti dengan Dirut Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi tentang Optimalisasi Produktivitas Pertanian dan Pembelian Hasil Panen Melalui Program Makmur (Mari Kita Majukan Usaha Rakyat) pada Selasa 9 Juli 2024 di Jakarta. Keberpihakan pada

petani dan peningkatan produktivitas pangan dalam negeri merupakan dua aspek yang menjadi perhatian pemerintah dalam kerangka membangun kemandirian pangan. Untuk itu, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi mengapresiasi kolaborasi yang terbangun antara Perum Bulog dengan PT Pupuk Indonesia.

Dirut Bulog Bayu Krishnamurti mengatakan, dengan kesepahaman tersebut, Bulog akan menyerap atau menjadi offtaker 100 persen dari Program Makmur. Menurutnya, pendapatan petani menjadi aspek penting yang harus diperhatikan dalam mata rantai produksi pangan, sehingga dengan kesiapan Bulog menyerap, pendapatan petani tetap terjaga. "Dengan kesepahaman ini, Bulog siap menjadi offtaker untuk 100 persen produk dari program Makmur. Kami sangat nyaman bekerja sama dengan Pupuk Indonesia sebagai saudara sesama BUMN, sehingga kerja sama ini merupakan suatu hal yang sangat baik.

Upaya tersebut sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menekankan peran BUMN Pangan sebagai offtaker hasil pertanian, sehingga di satu sisi tetap menjaga semangat petani untuk berproduksi, di sisi lain mengoptimalkan peran BUMN pangan dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat konsumen.

2. Launching Penyaluran Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan di Cilacap, Jawa Tengah: Komitmen Dukung Penurunan Kemiskinan Ekstrem, NFA Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan Hingga ke Pelosok Negeri

Kepala Badan Pangan Nasional didampingi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi beserta Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional melaksanakan kegiatan *launching* penyaluran intervensi pengendalian kerawanan pangan di Provinsi Maluku Seram Bagian Barat (SBB) pada Tanggal 15 Juli 2024. Badan Pangan Nasional terus mengencangkan intervensi



pengendalian kerawanan pangan dalam rangka mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem yang menyasar berbagai daerah berdasarkan Peta FSVA/*Food Security and Vulnerability Atlas*. Adapun kegiatan Intervensi Pengendalian Kerawanan Pangan Tahun 2024 dilaksanakan di 8 Provinsi, 20 Kabupaten/Kota, 233 Desa dengan sasaran penerima bantuan berasal dari keluarga rentan rawan pangan pada kelompok pengeluaran 10% terbawah (Desil 1) berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Dalam kesempatan itu, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional, Nyoto Suwignyo juga mengatakan intervensi pengendalian pangan ini juga dalam rangka mendukung upaya percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Upaya ini merupakan upaya bersama untuk mendukung arahan Bapak Presiden Joko Widodo dimana berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, berbagai upaya dilakukan oleh kementerian/lembaga termasuk Badan Pangan Nasional ini diarahkan untuk mencapai target menghapus kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada tahun 2024.

Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan, Sri Nuryanti juga mengungkapkan bahwa pemberian bantuan pangan ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran pangan masyarakat berpendapatan rendah di daerah rentan rawan pangan serta menguatkan daerah tahan pangan, terutama yang relatif sulit terjangkau sangat membutuhkan bantuan ini. menyalurkan secara simbolis bantuan intervensi pengendalian kerawanan pangan kepada 1.824 KK atau sebesar 32% dari total penerima di Provinsi Maluku Seram Bagian Barat (SBB).

3. Penetapan HPP Gabah dan Beras yang Tepat, Langkah Optimis Pemerintah Jaga Asa Petani dan Dukung Produksi Beras Dalam Negeri



Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi saat ditemui di Jakarta pada Tanggal 15 Juli 2024 dalam rangka membahas Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan beras yang ditetapkan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional menjadi basis Perum Bulog dalam menyerap produksi dalam negeri, ditujukan sebagai jaring pengaman harga di tingkat petani. Hal ini dikarenakan fluktuasi harga gabah sangat dipengaruhi oleh musim panen. Penetapan HPP jelang panen raya

memang sangat dibutuhkan sedulur petani. Ini dapat memberi kepastian harga untuk penyerapan Bulog dan terbukti dapat menjaga harga di tingkat produsen terhindar dari kejatuhan harga yang sangat mendalam saat panen raya.

Dalam publikasi 'Evaluasi Statistik Harga Produsen Gabah 2023' yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Juli 2024, disebutkan sepanjang 2023, persentase kasus harga gabah di bawah HPP relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini dipengaruhi meningkatnya harga jual gabah dan permintaan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief menyampaikan bahwa adanya kemunduran panen raya yang biasanya di Maret, ini kita lihat di tahun 2024 panen raya di April, sehingga pada awal April segera kita terapkan kebijakan fleksibilitas HPP gabah menjadi Rp 6.000 per kilo. Tentunya ini sesuai arahan Bapak Presiden Jokowi yang meminta harga petani saat panen raya tidak boleh merosot tajam.

Menukil data KSA BPS amatan Mei, proyeksi produksi beras di Juni 2024 bisa meraih 2,02 juta ton. Lalu di Juli mulai naik ke 2,19 juta ton dan di Agustus 2,67 juta ton. Sementara menurut berita resmi statistik BPS terbitan 1 Juli 2024, rerata harga GKP pada April 2024 sempat berada di Rp 5.686 per kilogram (kg) dengan kadar air 20,74 persen dan mulai membaik mendekati HPP pada Juni 2024 berada di Rp 6.171 per kg dengan kadar air 19,68 persen. Lebih lanjut, dalam publikasi 'Evaluasi Statistik Harga Produsen Gabah 2023', BPS melaporkan persentase tertinggi kasus harga gabah di bawah HPP sempat terjadi pada April 2023 sebesar 22,75 persen di tingkat petani. Persentase ini mengalami penurunan secara perlahan di bulan-bulan berikutnya hingga di Desember 2023 berada di 0,12 persen. Persentase kasus harga gabah di bawah HPP disebutkan tersebut masih lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022.

4. Gerakan Tanam Padi



Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prsaetyo Adi didampingi Deputy Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Andriko Noto Susanto melakukan kunjungan kerja reses bersama komisi IV DPR RI di Mamuju, Sulawesi Barat dalam rangka mendukung program Gerakan Tanam Padi pada tanggal 17 Juli 2024. Hal ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan luas lahan pertanian dan produksi padi di wilayah tersebut.

Pada giat ini, dilakukan penanaman padi bersama yang diharapkan dapat menjadi inisiatif bersama dalam rangka mengurangi ketergantungan Indonesia pada impor beras. Melalui peningkatan produksi padi dalam negeri, kebutuhan pangan nasional diharapkan dapat terpenuhi secara mandiri

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal menekankan pentingnya optimalisasi lahan yang ada melalui berbagai upaya, termasuk pembangunan irigasi, pencetakan sawah baru, pemupukan, serta langkah-langkah lain yang mendukung produktivitas pertanian. "Gerakan Tanam Padi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dan DPR RI untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan petani," ujar Andi Akmal.

Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan, Badan Pangan Nasional, Andriko menambahkan sinergi antara pemerintah dan legislatif sangat penting dalam memastikan program ini dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi sektor pertanian di Mamuju dan daerah lainnya.

5. Panen Jagung bersama Komisi IV DPR RI: Badan Pangan Nasional Mendorong Bulog Serap Jagung Petani, Sebagai Upaya Menjaga Stabilitas Harga dan Memastikan Kesejahteraan Petani

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi didampingi Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Nyoto Suwignyo bersama komisi IV DPR RI melakukan panen jagung sebagai salah satu rangkaian acara dalam rangka kunjungan kerja reses pada Rabu, tanggal 17 Juli 2024 di Kabupaten Aceh Tenggara, dimana lokasi ini merupakan sentra jagung terbesar di Aceh, jumlah produksi pada 2023 sebesar 166.689 ton dengan luas panen 24.037 Ha dan produktivitas 7 ton/Ha.



Dalam kunjungan tersebut, Deputy Nyoto menyampaikan bahwa Badan Pangan Nasional terus mendorong kepada BULOG untuk mengoptimalkan serapan jagung dalam rangka penguatan Cadangan Jagung Pemerintah (CJP), sebagai suatu kebijakan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan kesejahteraan petani serta konsumen di tengah dinamika pasar yang terus mengalami perubahan.

Pada kesempatan tersebut Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Budhi Setiawan meminta kepada Badan Pangan Nasional dan Perum BULOG agar bisa memaksimalkan pembelian jagung petani di Aceh Tenggara dengan harga sesuai HAP yaitu Rp. 5000/kg, sehingga para petani bisa kembali tersenyum.

6. Pelantikan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Pangan Nasional

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi melantik sejumlah Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas lingkup Badan Pangan Nasional di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2024. Pada kesempatan tersebut Arief mengingatkan kembali akan pentingnya integritas kepada seluruh pegawai dan target kita semua bersama di tahun depan harus mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) oleh BPK.



Bapak Arief juga menyampaikan kepada Pejabat Administrator dan Pengawas yang baru saja dilantik bahwa pengambilan sumpah jabatan tersebut hendaknya dipandang sebagai *governance strategy* dalam meningkatkan kualitas pelayanan seiring upaya penggerakkan roda pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Adapun berikut nama-nama Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas yang baru dilantik adalah:

1. Bhaskoro Dwi Widhianto, SP, M.E., M.P.P. sebagai Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan
2. Sadam Mujihartono, S.P, M. Agr, sebagai Kepana Sub Bagian Protokol
3. Afini Sari, A. Md sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepala Badan
4. E. Rini Yusniana, S.P, M.M sebagai Kepala Bagian Rumah Tangga, Pengelolaan Barang Miliki Negara dan Kearsipan
5. Jati Alam, S.P sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Utama
6. Munawwarah, S. Pd., M. Pd sebagai Kepala Sub Bagian tata Usaha Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan
7. Siti Karmila, S.P sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Deputy Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi
8. Puspa Dewi, S.E sebagai Kepala Sub Bagian Tata Usaha Deputy Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan

7. Hadiri Indo Livestock 2024, Kepala NFA Perkuat Integrasi Horizontal Ekosistem Pangan Nasional Ramah Lingkungan

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, menghadiri Indo Livestock 2024 selaku *keynote speaker* pada Seminar Revolusi Pangan dengan tema "Membangun Sistem Integrasi Horizontal Industri Pangan Bangsa" dalam Indo Livestock Expo and Forum yang diselenggarakan oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) bersama Institut Pertanian Bogor (IPB) di JCC Senayan, Jakarta pada Kamis tanggal 18 Juli 2024.



Pewujudan ketahanan pangan nasional yang mandiri dan berdaulat dibangun di atas ekosistem pangan yang berkelanjutan untuk mendorong perlindungan terhadap petani, peternak, dan nelayan guna meningkatkan daya saingnya, menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, serta memastikan pemerataannya baik dari segi infrastruktur maupun pemenuhannya. Melalui ekosistem yang ramah lingkungan ini pula cemaran jejak karbon atau carbon footprints hilirisasi pangan akan dapat dikurangi sedikit demi sedikit.

Dalam kesempatan itu pula, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief mengajak seluruh pelaku usaha pangan untuk bersinergi dalam integrasi horizontal ekosistem pangan nasional demi kepentingan bersama sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya guna mewujudkan Indonesia Emas 2045 dengan tetap memperhatikan kelestarian alam dan lingkungan.

8. Lokakarya Forum Masyarakat Statistik: Kepala Badan Pangan Nasional Tekankan Pemutakhiran Data Dalam Perwujudan Satu Data Pangan Nasional



Adanya keterpaduan satu data pangan di lingkup Nasional, sangat dibutuhkan pemerintah, terutama untuk membangun ketahanan pangan. Upaya perbaikan secara terus menerus dijalankan, sehingga program pemerintah dapat terlaksana berdasarkan data yang akurat. Bah pikiran ini disampaikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional saat memberikan pidato "keynote speaker" dalam acara

Lokakarya Forum Masyarakat Statistik (FMS): 'Ada Apa dengan Data Ketahanan Pangan?' di Hotel The Westin Jakarta pada Rabu tanggal 17 Juli 2024. Melalui penyajian data yang akurat dan kredibel, maka pihaknya secara gesit dapat menentukan langkah penanganannya. Ini penting terutama dalam menangani kejadian kejatuhan harga di tingkat produsen. Terlebih Presiden Joko Widodo selalu meminta harga bisa selalu wajar dan baik mulai dari tingkat petani sampai masyarakat.

Kepala Badan Pangan Nasional menambahkan terdapat salah satu database yang dibangun Badan Pangan Nasional yaitu Panel Harga Pangan. Melalui kolektivitas yang bersumber dari 38 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota. Dashboard ini ada dari level hulu (produksi) sampai hilir (konsumsi). Datanya bisa menjadi acuan kita bersama-sama. Ini bisa dipertanggungjawabkan karena enumeratornya jelas, sehingga bisa kelihatan kapan input, rerata nasional berapa, daerah mana yang mengalami kenaikan atau penurunan.

Adapun enumerator dan pengelola database panel harga pangan totalnya ada 1.053 orang terdiri dari 352 enumerator produsen, 653 enumerator konsumen, 38 pengelola database, dan 10 enumerator pusat/grosir. Setiap harinya data diinput paling lambat sampai pukul 13.00 WIB. Lokasi pasar yang jadi sampel merupakan rekomendasi yang bisa dipilih dari berdasarkan usulan Dinas Pangan pemerintah daerah setempat.

9. Badan Pangan Nasional Cek Stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi melakukan kunjungan ke Gudang Perum BULOG Sidoarjo, Jawa Timur pada tanggal 21 Juli 2024, dalam rangka memastikan ketersediaan stok CPP di daerah. Dalam kunjungan tersebut Arief juga memastikan untuk wilayah Surabaya, stok pangan strategis cukup, terutama beras. Dengan itu, seluruh program intervensi yang dijalankan pemerintah seperti



bantuan pangan hingga SPHP dapat terus memberi manfaat yang luas bagi masyarakat. Dalam kunjungan itu juga diperoleh informasi total stok beras di Kantor Wilayah Bulog Surabaya mencapai 25 ribu ton dan untuk Stock PSO setara beras 155 ribu ton. Sementara realisasi penyaluran bantuan pangan (banpang) beras untuk wilayah Surabaya tahap pertama sudah tuntas dan untuk tahap kedua sebanyak 103 Ribu ton atau 99,94%. Sedangkan Realisasi SPHP 87 Ribu ton atau 74,8% dari target 117 Ribu ton. Selanjutnya Realisasi pengadaan PSO 72 Ribu ton atau 66% dari target 110 Ribu ton.

10. Festival Pangan Nusantara : Apresiasi Untuk Ketahanan Pangan Indonesia, Presiden Joko Widodo akan Terima Agricola Medal dari FAO



Dalam rangkaian 'Festival Pangan Nusantara' yang menjadi peringatan 3 tahun Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan pada Minggu 28 Juli 2024 di Plaza Timur Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta. Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi menuturkan Food and Agriculture Organization (FAO) akan memberikan penghargaan Agricola Medal ke Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat ini.

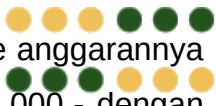
Seperti yang disampaikan oleh Bapak Menteri Pertanian bahwa sesuai surat dari Director General FAO dari Roma, menyampaikan bahwa 30 Agustus nanti, FAO akan datang ke Indonesia memberikan penghargaan Agricola Medal ke Presiden Joko Widodo. Agricola medal ini adalah pemberian penghargaan kepada pimpinan negara, dalam hal ini Presiden. Penghargaan FAO terakhir diberikan ke Indonesia itu 39 tahun lalu kepada Bapak Presiden Soeharto. Kita patut berbangga karena Agricola Medali ini diberikan karena Bapak Presiden tentunya bersama seluruh jajarannya, konsisten memerangi kelaparan dan kemiskinan serta penguatan ketahanan pangan dan gizi masyarakat.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan lingkup Badan Pangan Nasional pada periode bulan Juli Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Terdapat 4 (empat) kegiatan dengan 17 jenis KRO (ABR, AEA, AEC, AFA, BEC, BMA, EBA, EBB, EBC, EBD, PCA, PEH, RAG, QIA, QDD, QEA, QMA) dan 55 output/RO dengan pagu total berdasarkan DIPA Badan Pangan Nasional tahun 2024 sebesar Rp. **15.722.461.932.000** yang dialokasikan untuk mendukung Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas; dan Program Dukungan Manajemen.
2. Realisasi keuangan sampai dengan bulan Juli tahun 2024 sebesar Rp. 407.451.356.492,- dengan persentase realisasi sesuai pagu DIPA sebesar 3,10% dan sesuai pagu revisi sebesar Rp. 3,11%. Sedangkan untuk satker Badan Pangan Nasional sesuai target 0,18% dari pagu Revisi DIPA, realisasi mencapai Rp. 23.691.863.113,- atau mencapai dan mencapai 0,15% dari pagu DIPA atau setara Rp. 28.300.431.478,-
3. Realisasi fisik sampai bulan Juli Tahun 2024 sesuai target pencapaian KRO dan Output/RO Tahun 2024 adalah:
 - a. ABR Kebijakan bidang pertanian dan pangan untuk ABR Rekom Kebijakan Ketersediaan Pangan berupa Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Nasional dan Wilayah; ABR Rekom Kebijakan Distribusi dan Pangan berupa Penguatan Cadangan Pangan dan Penguatan Distribusi Pangan, ABR Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan : Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) dan Kesiapsiagaan Krisis Pangan PusatAEA Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monitoring dan Pelaporan untuk RO Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan berupa koordinasi pemantapan stabilisasi pasokan dan harga pangan, Review Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah dan Penguatan Distribusi dan Cadangan Pangan Pemerintah, Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev.

- 
4. Dinamika anggaran bantuan pangan pada bulan Juli volume anggarannya meningkat sehingga pagu total menjadi Rp.15.722.461.932.000,- dengan adanya penambahan ABT ini dipersiapkan untuk pembiayaan bantuan pangan tahap II (Juli s.d Desember 2024).

4.2 Permasalahan

Pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Badan Pangan Nasional selama periode bulan Juli Tahun 2024, terdapat beberapa permasalahan terkait rendahnya realisasi anggaran pada periode bulan Juli yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

- a. Pemblokiran anggaran pada DIPA induk Badan Pangan Nasional
- b. Adanya penambahan anggaran ABT pada DIPA Revisi ke-10 mengakibatkan pelaksanaan bantuan program dituntut untuk memenuhi regulasi dalam menunjang pelaksanaan kegiatan tersebut dan juga mengakibatkan terjadinya penambahan periode pelaksanaan pada tahap kegiatan sehingga target serapan pada bulan Juli menjadi kecil yang berpengaruh terhadap rendahnya realisasi anggaran di bulan Juli 2024
- c. Kompetensi sumberdaya manusia (SDM) teknis dan administrasi yang terbatas terutama untuk satker urusan pangan pada level seksi/bidang menyebabkan tidak seimbangnya antara banyaknya beban pekerjaan dengan SDM yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan peraturan.

4.3 Rekomendasi

Tindak lanjut atau rekomendasi atas permasalahan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Perlunya dilakukan perencanaan secara profesional yang mengacu pada anggaran berbasis kinerja
- b. Upaya percepatan pemenuhan dokumen administrasi kegiatan terutama satker Dekonsentrasi di 38 provinsi
- c. Percepatan pelaksanaan kegiatan pusat dan satker dekon di 38 provinsi
- d. Perlunya peningkatan kompetensi mengoptimalkan SDM pelaksana kegiatan.

LAMPIRAN

Lampiran 1.
DIPA Revisi ke-10: Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 125.01.1.690590/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



Kementerian Negara/Lembaga : (125) BADAN PANGAN NASIONAL
Unit Organisasi : (01) BADAN PANGAN NASIONAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (690590) BADAN PANGAN NASIONAL

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	690590	BADAN PANGAN NASIONAL													
		RENCANA PENARIKAN DANA	5.428.037	15.128.567	386.894.752	15.215.428	17.164.358	23.877.854	28.202.599	5.783.608.119	36.615.596	9.076.183.968	291.005.210	43.137.444	15.722.461.932
		BELANJA PEGAWAI	1.363.817	3.384.698	7.197.409	4.037.646	3.810.697	7.088.771	3.618.460	3.619.642	3.619.642	3.619.642	3.619.642	3.619.642	48.599.711
		BELANJA BARANG	4.018.230	11.065.617	379.373.854	11.005.837	13.077.363	16.316.591	24.168.115	5.771.876.256	17.300.159	9.071.766.105	285.588.758	35.277.287	15.640.835.172
125.01.HA.6875		BELANJA MODAL	45.990	678.252	323.489	170.945	276.298	472.491	416.023	8.112.221	15.695.794	798.221	1.796.809	4.240.515	33.027.049
		Pemantapan Ketersediaan dan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	2.209.515	2.101.172	371.762.286	3.256.379	3.030.863	5.257.199	3.350.281	5.759.458.963	18.930.936	9.055.700.359	270.257.387	11.553.917	15.506.869.258
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	2.194.199	2.065.344	371.570.867	3.198.704	2.983.676	5.022.215	3.268.457	5.757.374.648	3.581.942	9.055.286.818	268.884.543	11.017.842	15.486.449.258
		53 BELANJA MODAL	15.315	35.827	191.419	57.675	47.187	234.984	81.824	2.084.314	15.348.994	413.541	1.372.844	536.075	20.420.000
125.01.HA.6876		Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemantapan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	86.451	2.005.328	2.657.745	1.992.225	1.846.956	3.981.675	11.224.635	3.683.171	3.701.036	5.633.634	5.854.561	10.098.203	52.765.620
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	84.506	1.968.167	2.601.359	1.977.451	1.822.219	3.955.784	11.165.986	3.588.397	3.623.783	5.488.069	5.696.454	9.924.944	51.887.120
		53 BELANJA MODAL	1.945	37.161	56.386	14.774	24.737	25.891	58.649	94.774	77.253	145.565	168.106	173.259	878.500
		Pemantapan Pengankaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	855.006	2.972.430	1.348.511	1.641.118	3.428.866	3.128.726	3.919.384	10.217.241	4.183.897	4.843.321	4.513.567	9.304.758	50.356.836
125.01.WA.6874		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	834.455	2.889.510	1.314.988	1.598.828	3.321.354	3.032.284	3.771.039	4.369.718	4.024.468	4.678.616	4.348.738	7.142.588	41.325.586
		53 BELANJA MODAL	20.550	82.920	33.523	42.289	107.512	96.442	148.345	5.847.523	159.430	164.705	164.829	2.162.180	9.030.250
		Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	2.277.066	8.049.637	11.126.209	8.325.706	8.857.672	11.510.254	9.708.299	10.248.744	9.799.726	10.006.653	10.379.696	12.180.556	112.470.218
		51 BELANJA PEGAWAI	1.363.817	3.384.698	7.197.409	4.037.646	3.810.697	7.088.771	3.618.460	3.619.642	3.619.642	3.619.642	3.619.642	3.619.642	48.599.711

Lampiran 2.

Realisasi Keuangan Berdasarkan KRO, Output dan Komponen Posisi Bulan Juli Tahun 2024 Sesuai Aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan

URAIAN	TARGET		REALISASI		%	SISA ANGGARAN
	PAGU NON BLOKIR REVISI KE-10	JULI (0,18%)	JULI	s-d JULI		
JUMLAH SELURUHNYA	15.700.030.846.000	28.300.431.478	23.691.863.113	487.943.503.171	3,11%	15.212.087.342.829
HA Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas	15.590.447.566.000	28.097.985.085	14.130.547.752	427.709.199.275	2,74%	15.162.738.366.725
HA.6875 Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	15.498.576.980.000	27.912.364.664	3.025.170.921	390.658.785.366	2,52%	15.107.918.194.634
ABR Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	4.080.798.000	7.345.436	340.672.658	2.585.822.206	63,37%	1.494.975.794
ABR.001 Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan	966.718.000	1.740.092	139.481.695	694.802.980	71,87%	271.915.020
ABR.002 Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.119.080.000	2.014.344	158.213.619	860.787.822	76,92%	258.292.178
ABR.003 Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan	1.995.000.000	3.591.000	42.977.344	1.030.231.404	51,64%	964.768.596
AEA Koordinasi	14.873.048.000	31.791.827	902.765.388	8.388.355.541	56,40%	6.484.692.459
AEA.001 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan	406.850.000	732.330	1.768.500	228.921.480	56,27%	177.928.520
AEA.002 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	6.267.323.000	11.281.181	299.696.592	3.780.268.031	60,32%	2.487.054.969
AEA.003 Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan	8.198.875.000	19.778.315	601.300.296	4.379.166.030	53,41%	3.819.708.970
AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	2.901.375.000	5.222.475	281.527.123	1.751.299.031	60,36%	1.150.075.969
AFA.001 NSPK Ketersediaan Pangan	499.375.000	5.222.475	44.493.474	338.316.573	67,75%	161.058.427
AFA.002 NSPK Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	1.302.000.000	898.875	138.606.528	1.144.771.837	87,92%	157.228.163
AFA.003 NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan	1.100.000.000	2.343.600	98.427.121	268.210.621	24,38%	831.789.379
BEC Bantuan Produk	15.435.192.954.000	1.980.000	0	365.673.617.873	2,37%	15.069.519.336.127
BEC.001 Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah	15.435.192.954.000	27.783.347.317	0	365.673.617.873	2,37%	15.069.519.336.127
QDD Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	2.500.000.000	27.783.347.317	141.664.000	416.071.860	16,64%	2.083.928.140
QDD.001 Pangan yang Terdistribusi	2.500.000.000	4.500.000	141.664.000	416.071.860	16,64%	2.083.928.140
QMA Data dan Informasi Publik	20.078.805.000	4.500.000	1.358.541.752	11.843.618.855	58,99%	8.235.186.145
QMA.001 Data dan Informasi Ketersediaan Pangan	6.374.585.000	46.047.609	203.691.141	4.213.088.727	66,09%	2.161.496.273
QMA.002 Data dan Informasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	12.117.140.000	16.334.253	1.146.104.211	6.467.273.878	53,37%	5.649.866.122
QMA.003 Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan	1.587.080.000	26.856.612	8.746.400	1.163.256.250	73,30%	423.823.750
RAG Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	18.950.000.000	2.856.744	0	0	0,00%	18.950.000.000
RAG.001 Sarana Logistik Pangan	16.950.000.000	34.110.000	0	0	0,00%	16.950.000.000

RAG.002	Sarana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.000.000.000	30.510.000	0	0	0,00%	2.000.000.000
HA.6876	Pengendalian Kerawanan Pangan dan Pemanfaatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	47.588.014.000	3.600.000	7.698.022.677	20.268.403.010	42,59%	27.319.610.990
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	7.761.197.000		819.740.887	4.048.573.071	52,16%	3.712.623.929
ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Kerawanan Pangan	3.123.000.000	94.978.116	614.042.677	1.877.755.802	60,13%	1.245.244.198
ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	4.638.197.000	20.430.000	205.698.210	2.170.817.269	46,80%	2.467.379.731
AEA	Koordinasi	17.884.667.000	7.421.400	555.102.042	5.074.494.140	28,37%	12.810.172.860
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengendalian Kerawanan Pangan	5.111.197.000	13.008.600	66.068.777	1.575.736.814	30,83%	3.535.460.186
AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Kewaspadaan Pangan dan Gizi	12.773.470.000	33.252.246	489.033.265	3.498.757.326	27,39%	9.274.712.674
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	1.800.000.000	10.260.000	79.625.000	531.829.661	29,55%	1.268.170.339
AFA.001	NSPK Pengendalian Kerawanan Pangan	400.000.000	22.992.246	0	251.703.746	62,93%	148.296.254
AFA.002	NSPK Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1.400.000.000	3.240.000	79.625.000	280.125.915	20,01%	1.119.874.085
QEA	Bantuan Masyarakat	17.851.550.000	720.000	6.033.514.748	9.989.439.514	55,96%	7.862.110.486
QEA.001	Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian kerawanan pangan	13.765.000.000	2.520.000	4.665.119.940	8.325.675.414	60,48%	5.439.324.586
QEA.002	Bantuan Pangan dalam rangka kewaspadaan pangan dan gizi	4.086.550.000	33.500.790	1.368.394.808	1.663.764.100	40,71%	2.422.785.900
QMA	Data dan Informasi Publik	2.290.600.000	26.145.000	210.040.000	624.066.624	27,24%	1.666.533.376
QMA.001	Data dan Informasi Pengendalian Kerawanan Pangan	1.035.000.000	7.355.790	60.800.000	471.346.124	45,54%	563.653.876
QMA.002	Data dan Informasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1.255.600.000	4.555.080	149.240.000	152.720.500	12,16%	1.102.879.500
HA.6877	Pemanfaatan Panganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan	44.282.572.000	2.295.000	3.407.354.154	16.782.010.899	37,90%	27.500.561.101
ABR	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan	2.200.400.000	2.260.080	376.445.624	582.742.009	26,48%	1.617.657.991
ABR.001	Rekomendasi Kebijakan Panganekaragaman Konsumsi Pangan	152.000.000		0	0	0,00%	152.000.000
ABR.002	Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi, Label dan Iklan Pangan	2.048.400.000	90.642.305	376.445.624	582.742.009	28,45%	1.465.657.991
AEA	Koordinasi	22.919.912.000	4.497.120	2.522.224.597	11.828.474.285	51,61%	11.091.437.715
AEA.001	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Panganekaragaman Konsumsi Pangan	7.922.818.000	540.000	748.098.546	4.924.255.560	62,15%	2.998.562.440
AEA.002	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Perumusan dan Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	10.521.222.000	3.957.120	885.203.715	4.527.661.877	43,03%	5.993.560.123
AEA.003	Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan	4.475.872.000	4.411.225.980	888.922.336	2.376.556.848	53,10%	2.099.315.152
AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	2.065.000.000	15.664.936	54.704.000	705.924.732	34,19%	1.359.075.268
AFA.001	NSPK Panganekaragaman Konsumsi Pangan	465.000.000	20.288.200	14.750.000	66.410.000	14,28%	398.590.000
AFA.002	NSPK Keamanan, Mutu, Gizi, Label, Iklan dan Kelembagaan Keamanan dan Mutu Pangan	1.400.000.000	8.159.125	30.030.000	514.197.834	36,73%	885.802.166

AFA.003	NSPK Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan	200.000.000	4.050.000	9.924.000	125.316.898	62,66%	74.683.102
PCA	Perizinan Produk	1.516.475.000	1.170.000	99.732.318	668.455.104	44,08%	848.019.896
PCA.001	Sertifikat sarana dan produk pangan segar yang memenuhi standar keamanan dan mutu pangan	1.516.475.000	2.520.000	99.732.318	668.455.104	44,08%	848.019.896
PEH	Promosi	4.130.000.000	360.000	200.055.340	1.547.235.633	37,46%	2.582.764.367
PEH.001	Promosi Pangan B2SA	4.130.000.000	3.081.600	200.055.340	1.547.235.633	37,46%	2.582.764.367
QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	1.940.000.000	3.081.600	98.946.020	424.113.141	21,86%	1.515.886.859
QDD.001	Kelompok masyarakat yang terfasilitasi penganekaragaman pangan	1.940.000.000	9.079.200	98.946.020	424.113.141	21,86%	1.515.886.859
QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	2.272.825.000	9.079.200	49.485.435	943.481.342	41,51%	1.329.343.658
QIA.002	Pangan Segar yang Memenuhi Syarat Keamanan dan Mutu Pangan	2.272.825.000	4.086.000	49.485.435	943.481.342	41,51%	1.329.343.658
QMA	Data dan Informasi Publik	992.660.000	4.086.000	5.760.820	75.020.861	7,56%	917.639.139
QMA.001	Data Situasi Konsumsi Pangan	992.660.000	4.091.085	5.760.820	75.020.861	7,56%	917.639.139
RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	6.245.300.000	4.091.085	0	6.563.792	0,11%	6.238.736.208
RAG.001	Sarana Keamanan dan Mutu Pangan	6.245.300.000	2.628.000	0	6.563.792	0,11%	6.238.736.208
W A	Program Dukungan Manajemen	109.583.280.000	2.628.000	9.561.315.361	60.234.303.896	54,97%	49.348.976.104
WA.6874	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Badan Pangan Nasional	109.583.280.000	15.017.040	9.561.315.361	60.234.303.896	54,97%	49.348.976.104
AEC	Kerja sama	2.824.972.000	15.017.040	33.399.393	1.292.322.084	45,75%	1.532.649.916
AEC.001	Kerja Sama Bidang Pangan	2.824.972.000		33.399.393	1.292.322.084	45,75%	1.532.649.916
BMA	Data dan Informasi Publik	4.649.943.000	202.446.392	454.649.380	2.367.639.794	50,92%	2.282.303.206
BMA.001	Data dan Informasi Pangan	4.649.943.000	202.446.392	454.649.380	2.367.639.794	50,92%	2.282.303.206
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	81.947.742.000	5.220.000	7.652.673.358	48.258.270.315	58,89%	33.689.471.685
EBA.956	Layanan BMN	672.000.000	5.220.000	49.820.350	379.497.092	56,47%	292.502.908
EBA.957	Layanan Hukum	1.391.900.000	9.446.544	83.144.040	641.617.380	46,10%	750.282.620
EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	3.422.000.000	9.446.544	644.634.087	1.727.672.148	50,49%	1.694.327.852
EBA.959	Layanan Protokol	921.000.000	148.186.400	126.637.820	488.611.675	53,05%	432.388.325
EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	950.000.000	1.296.000	56.265.739	513.539.244	54,06%	436.460.756
EBA.962	Layanan Umum	10.715.694.000	2.700.000	1.081.841.073	6.018.677.832	56,17%	4.697.016.168
EBA.994	Layanan Perkantoran	63.875.148.000	6.300.000	5.610.330.249	38.488.654.944	60,26%	25.386.493.056
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	622.900.000	1.755.000	30.500.000	602.600.000	96,74%	20.300.000
EBB.951	Layanan Sarana Internal	622.900.000	1.800.000	30.500.000	602.600.000	96,74%	20.300.000
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	3.400.336.000	19.360.134	200.075.412	1.507.560.865	44,34%	1.892.775.135
EBC.954	Layanan Manajemen SDM	3.400.336.000	114.975.266	200.075.412	1.507.560.865	44,34%	1.892.775.135
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	16.137.387.000	3.428.820	1.190.017.818	6.205.910.838	38,46%	9.931.476.162
EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6.780.083.000	3.428.820	401.651.492	2.431.194.451	35,86%	4.348.888.549
EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	1.000.000.000	6.480.000	63.000.760	506.075.010	50,61%	493.924.990
EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	1.962.000.000	6.480.000	143.074.566	986.783.870	50,29%	975.216.130
EBD.965	Layanan Audit Internal	6.395.304.000	29.684.628	582.291.000	2.281.857.507	35,68%	4.113.446.493